

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH

AGUSTUS 2020





KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya "Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Agustus 2020" dapat dipublikasikan. Buku ini menyajikan berbagai informasi mengenai perkembangan beberapa indikator perekonomian daerah khususnya bidang moneter, perbankan, sistem pembayaran, dan keuangan daerah, yang selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal Bank Indonesia juga sebagai bahan informasi bagi pihak eksternal.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan bagi penyusunan buku ini. Harapan kami, hubungan kerja sama yang baik selama ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan lagi pada masa yang akan datang. Kami juga mengharapkan masukan dari berbagai pihak guna lebih meningkatkan kualitas buku kajian ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-Nya serta kemudahan kepada kita semua dalam upaya menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan ekonomi regional khususnya dan pengembangan ekonomi nasional pada umumnya.

Semarang, Agustus 2020
KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH

Ttd

Soekowardojo
Direktur Eksekutif

Daftar Isi



Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Grafik	vii
Daftar Tabel	xii
Tabel Indikator	xiv
Ringkasan Eksekutif	01

BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL

1.1 Perkembangan Ekonomi Makro Regional Triwulan I 2020	3
1.1.1 Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran	4
1.1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	16
1.2 Tracking Perkembangan Ekonomi Makro Regional Triwulan III 2020	22
1.2.1 Tracking Perkembangan Ekonomi Triwulan III 2020 Sisi Pengeluaran	22
1.2.2 Tracking Perkembangan Ekonomi Triwulan III 2020 Sisi Lapangan Usaha	24

BAB II SUPLEMEN

Studi Kasus : Perlambatan Perekonomian akibat Pandemi COVID-19	25
---	----

BAB II KEUANGAN PEMERINTAH

2.1 Gambaran Umum APBD 2019	33
2.2 Realisasi APBD Triwulan II 2020	33
2.2.1 Realisasi Pendapatan Triwulan II 2020	34
2.2.2 Realisasi Belanja Triwulan II 2020	35
2.2.3 Program dan Anggaran Penanggulangan Pandemi COVID-19	36



LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH AGUSTUS 2020

BAB III PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

3.1 Inflasi Secara Umum	39
3.2 Inflasi Berdasarkan Kelompok	40
3.2.1 Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau	41
3.2.2 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya	42
3.2.3 Kelompok Transportasi	42
3.2.4 Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman	43
3.2.5 Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	43
3.3 Inflasi Kota - Kota di Provinsi Jawa Tengah	43
3.3.1 Disagregasi Inflasi Kota Semarang	44
3.3.2 Disagregasi Inflasi Kota Surakarta	45
3.3.3 Disagregasi Inflasi Kota Cilacap	45
3.3.4 Disagregasi Inflasi Kota Kudus	46
3.3.5 Disagregasi Inflasi Kota Tegal	47
3.3.6 Disagregasi Inflasi Kota Purwokerto	48
3.4 Tracking dan Proyeksi Inflasi	48
3.4.1 Inflasi Juli 2020	48
3.4.2 Inflasi Agustus 2020	50
3.4.3 Proyeksi Inflasi Provinsi Jawa Tengah Triwulan III 2020	50
3.5 Program Pengendalian Inflasi Daerah	50

BAB IV STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

4.1 Kondisi Umum Perbankan Jawa Tengah	55
4.1.1 Perkembangan Bank Umum	56
4.2 Risiko Ketahanan Sistem Keuangan Daerah di Jawa Tengah	59
4.2.1 Ketahanan Lapangan Usaha Jawa Tengah Triwulan II 2020	59
4.2.2 Kerentanan Sektor Rumah Tangga	60

BAB V PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

5.1 Perkembangan Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	67
5.2 Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah	68
5.3 Perkembangan Transaksi Penukaran Valuta Asing	70
5.4 Perkembangan Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif	70



LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH AGUSTUS 2020



BAB VI **KETENAGAKERJAAN** **DAN KESEJAHTERAAN**

6.1 Ketenagakerjaan	75
6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	78
6.3 Nilai Tukar Petani	78
6.4 Tingkat Kemiskinan	80
6.5 Pemerataan Kesejahteraan Penduduk	81

BAB VII **PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH**

7.1 Kondisi Perekonomian Global	85
7.2 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2020 dan Tahun 2020	85
7.2.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran	86
7.2.2 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	86
7.3 Prospek Inflasi Triwulan IV 2020 dan Keseluruhan Tahun 2020	87

Grafik



Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah	3	Grafik 1.20 Pertumbuhan Kredit Investasi dan Suku Bunga Kredit Investasi	9
Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa, dan Nasional	3	Grafik 1.21 Perkembangan SBT Realisasi Investasi (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Investasi	10
Grafik 1.3 Struktur Perekonomian Kawasan Jawa berdasarkan Provinsi	3	Grafik 1.22 Perkembangan SBT Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha (hasil SKDU)	10
Grafik 1.4 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi	4	Grafik 1.23 Hasil Liaison Pada Komponen Investasi	10
Grafik 1.5 Pertumbuhan Tahunan Outflow Uang Kartal, Rata-Rata Perputaran Kliring Harian, dan Pertumbuhan Ekonomi	4	Grafik 1.24 Likert Scale Investasi (Hasil Liaison)	10
Grafik 1.6 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	5	Grafik 1.25 Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri	10
Grafik 1.7 Perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	5	Grafik 1.26 Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri	11
Grafik 1.8 Pergerakan Masyarakat di Pusat Belanja Ritel	6	Grafik 1.27 Pertumbuhan Ekspor Luar Negeri Jawa Tengah per Jenis Komoditas	11
Grafik 1.9 Pergerakan Masyarakat di Perkantoran	6	Grafik 1.28 Komposisi Ekspor Luar Negeri Nonmigas Berdasarkan Komoditas	11
Grafik 1.10 Indeks Keyakinan Konsumen	6	Grafik 1.29 Pertumbuhan Nilai Ekspor TPT	12
Grafik 1.11 Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini	6	Grafik 1.30 Pertumbuhan Volume Ekspor TPT	12
Grafik 1.12 Perkembangan Kredit Konsumsi, DPK Perorangan, dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	7	Grafik 1.31 Pertumbuhan Nilai Ekspor Kayu	12
Grafik 1.13 Perkembangan Kredit Konsumsi berdasarkan Jenis Konsumsi	7	Grafik 1.32 Pertumbuhan Volume Ekspor Kayu	12
Grafik 1.14 Pertumbuhan Konsumsi LNPRT	7	Grafik 1.33 Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan	12
Grafik 1.15 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah	7	Grafik 1.34 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan	12
Grafik 1.16 Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	8	Grafik 1.35 Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri	13
Grafik 1.17 Pertumbuhan Giro Pemerintah dan PDRB Konsumsi Pemerintah	8	Grafik 1.36 Perkembangan Impor Jawa Tengah	13
Grafik 1.18 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	9	Grafik 1.37 Pertumbuhan Impor Migas dan Nonmigas Jawa Tengah	13
Grafik 1.19 Pertumbuhan PDRB Investasi, PDRB Konstruksi, dan Konsumsi Semen	9	Grafik 1.38 Struktur Impor Nonmigas Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran	14
		Grafik 1.39 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran	14

Grafik



Grafik 1.40 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan	14	Grafik 1.57 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai Subsektor Industri Pengolahan (Hasil SKDU)	20
Grafik 1.41 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Komoditas	14	Grafik 1.58 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor	20
Grafik 1.42 Pertumbuhan Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal	14	Grafik 1.59 SBT Kegiatan Usaha, Likert Scale Penjualan Domestik, Pertumbuhan PDRB Perdagangan	20
Grafik 1.43 Pangsa Negara Asal Impor Jawa Tengah	15	Grafik 1.60 Indeks Penjualan Riil (Hasil SPE) dan Pertumbuhan PDRB Perdagangan	21
Grafik 1.44 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal	15	Grafik 1.61 IPR Perdagangan Eceran berdasarkan Kelompok Komoditas	21
Grafik 1.45 Pertumbuhan PDRB Net Ekspor Antardaerah	15	Grafik 1.62 Pertumbuhan PDRB Transportasi dan Pergudangan; serta Informasi dan Komunikasi	21
Grafik 1.46 Indeks Penjualan Riil	15	Grafik 1.63 Pertumbuhan PDRB Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Konsumsi Pemerintah	21
Grafik 1.47 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17	Grafik 1.64 Pertumbuhan PDRB Konstruksi	22
Grafik 1.48 Curah Hujan di Jawa Tengah	17	Grafik 1.65 SBT Kegiatan Usaha, SBT Kegiatan Investasi Bangunan dan Pertumbuhan Konsumsi Semen	22
Grafik 1.49 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Padi di Jawa Tengah	18	Grafik 2.1 APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2019 dan T.A. 2020	34
Grafik 1.50 Pertumbuhan Luas Tanam dan Luas Panen Padi di Jawa Tengah	18	Grafik 2.2 Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Triwulan II 2019 dan Triwulan II 2020	34
Grafik 1.51 Perkembangan Hasil Produksi Padi di Jawa Tengah	18	Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan II (2018-2020)	34
Grafik 1.52 Perkembangan SBT Realisasi Kegiatan Usaha (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Pertanian	18	Grafik 2.4 Realisasi Belanja Daerah Triwulan I (2018-2020)	34
Grafik 1.53 Pertumbuhan dan NPL Kredit Pertanian	18	Grafik 2.5 Kontribusi Pos Pendapatan Daerah Triwulan II 2020	35
Grafik 1.54 Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	19		
Grafik 1.55 SBT Kegiatan Usaha, Likert Scale Penjualan Domestik, dan Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	19		
Grafik 1.56 Pertumbuhan Kredit Industri Pengolahan	19		



LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH AGUSTUS 2020

Grafik 2.6 Perbandingan Pos Pendapatan Daerah Triwulan II 2019 dan Triwulan II 2020	35	Grafik 4.3 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan di Jawa Tengah	56
Grafik 2.7 Kontribusi Pos Belanja Daerah Triwulan II 2020	36	Grafik 4.4 Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan Jawa Tengah	56
Grafik 2.8 Perbandingan Pos Belanja Daerah Triwulan II 2019 dan Triwulan II 2020	36	Grafik 4.5 Perkembangan Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) Perbankan Jawa Tengah	56
Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional	39	Grafik 4.6 Perkembangan Pertumbuhan Indikator Perbankan Jawa Tengah	56
Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi di Kawasan Jawa	39	Grafik 4.7 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan Jawa Tengah	57
Grafik 3.3 Inflasi Tahunan Provinsi di Jawa	39	Grafik 4.8 Perkembangan Pertumbuhan Tabungan Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	57
Grafik 3.4 Inflasi Bulanan Provinsi di Jawa	39	Grafik 4.9 Andil Pertumbuhan Tabungan Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	57
Grafik 3.5 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau	41	Grafik 4.10 Perkembangan Pertumbuhan Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	57
Grafik 3.6 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya	42	Grafik 4.11 Andil Pertumbuhan Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	57
Grafik 3.7 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Transportasi	42	Grafik 4.12 Perkembangan Pertumbuhan Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	58
Grafik 3.8 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Penyediaan Makanan dan Minuman	43	Grafik 4.13 Andil Pertumbuhan Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	58
Grafik 3.9 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	43	Grafik 4.14 Pangsa Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Lapangan Usaha	58
Grafik 3.10 Inflasi Tahunan Triwulan I 2020 pada Seluruh Kota Pantauan di Jawa Tengah	44	Grafik 4.15 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor	58
Grafik 3.11 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Pantauan di Jawa Tengah	44	Grafik 4.16 Perkembangan Rasio NPL Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor	59
Grafik 4.1 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan di Pulau Jawa	55	Grafik 4.17 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Subsektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	59
Grafik 4.2 Perkembangan Rasio Non-Performing Loan (NPL) Kredit Perbankan di Pulau Jawa	55		

Grafik



Grafik 4.18 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Subsektor Industri Pengolahan	59	Grafik 5.4 Pangsa Nominal Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman	67
Grafik 4.19 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, serta Risiko Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	60	Grafik 5.5 Perkembangan Rata-Rata Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong Harian di Jawa Tengah	68
Grafik 4.20 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Konstruksi	60	Grafik 5.6 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah	68
Grafik 4.21 Perkembangan Pertumbuhan DPK, Perseorangan, dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah	61	Grafik 5.7 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal Berdasarkan Wilayah	68
Grafik 4.22 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Jawa Tengah Berdasarkan Komponennya	61	Grafik 5.8 Perkembangan Penarikan dan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar	69
Grafik 4.23 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah	62	Grafik 5.9 Frekuensi dan Nominal Kas Keliling	69
Grafik 4.24 Perkembangan Pangsa Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah	62	Grafik 5.10 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Wilayah	69
Grafik 4.25 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah	63	Grafik 5.11 Persentase Temuan Uang Palsu Berdasarkan Pecahan	69
Grafik 4.26 Perkembangan NPL Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah	63	Grafik 5.12 Persentase Temuan Uang Palsu Berdasarkan Sumber Temuan	69
Grafik 4.27 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah	63	Grafik 5.13 Transaksi Penukaran Valuta Asing	70
Grafik 4.28 Pangsa Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah	63	Grafik 5.14 Pangsa Valuta Asing yang ditukarkan melalui KUPVA Bukan Bank di Jawa Tengah	70
Grafik 5.1 Perkembangan Rata-Rata Perputaran Kliring Harian di Jawa Tengah	67	Grafik 5.15 Rasio Ketersediaan Layanan Keuangan di Jawa Tengah dibandingkan 1.000 km Luas Wilayah	71
Grafik 5.2 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran Kliring dan SBT SKDU	67	Grafik 6.1 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan Penghasilan Saat Ini	75
Grafik 5.3 Pangsa Volume Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman	67	Grafik 6.2 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan Usaha yang Akan Datang	75
		Grafik 6.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah	80
		Grafik 6.4 Perkembangan Koefisien Gini Jawa Tengah dan Nasional	81



LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH AGUSTUS 2020

Grafik 6.5 Perbandingan Ketimpangan Jawa Tengah dan Nasional berdasarkan Daerah	81
Grafik 7.1 Proyeksi Inflasi Tahun 2020	88

Tabel

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Jawa (% , yoy)	3	Tabel 3.4 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok	40
Tabel 1.2 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB menurut Pengeluaran (Rp Miliar)	4	Tabel 3.5 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Semarang Berdasarkan Kelompok	44
Tabel 1.3 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Pengeluaran (Rp Miliar)	5	Tabel 3.6 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Surakarta Berdasarkan Kelompok	45
Tabel 1.4 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ADHK menurut Pengeluaran (% , YOY)	5	Tabel 3.7 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Cilacap Berdasarkan Kelompok	46
Tabel 1.5 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)	16	Tabel 3.8 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Kudus Berdasarkan Kelompok	47
Tabel 1.6 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)	16	Tabel 3.9 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Tegal Berdasarkan Kelompok	47
Tabel 1.7 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ADHK menurut Lapangan Usaha (% , YOY)	17	Tabel 3.10 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Purwokerto Berdasarkan Kelompok	48
Tabel 2.1 Perubahan Anggaran APBD Jawa Tengah Tahun 2020	33	Tabel 4.1 Pengelompokan Kredit Berdasarkan Nilai	59
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi APBD Jawa Tengah Triwulan II-2019 dan Triwulan II-2020 (Rp Miliar)	33	Tabel 4.2 Pengelompokan Tabungan Perseorangan Berdasarkan Nilainya	61
Tabel 2.3 Realisasi Pendapatan Triwulan II - 2019 dan Triwulan II - 2020	35	Tabel 4.3 Perkembangan Rasio Non-Performing Loan Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah	62
Tabel 2.4 Realisasi Belanja Triwulan II 2019 dan Triwulan II 2020	35	Tabel 6.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (juta orang)	76
Tabel 3.1 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan	40	Tabel 6.2 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, (juta orang)	76
Tabel 3.2 Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan	40	Tabel 6.3 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan (juta orang)	77
Tabel 3.3 Inflasi Tahunan Kota di Provinsi Jawa Tengah	40	Tabel 6.4 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (juta orang)	77



LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH AGUSTUS 2020

Tabel 6.5 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang)	79
Tabel 6.6 NTP Jawa Tengah dan Komponen Penyusunnya	79
Tabel 6.7 NTP Jawa Tengah per Subsektor	79
Tabel 6.8 Indeks yang Diterima berdasarkan Subsektor	79
Tabel 6.9 Indeks yang Dibayar berdasarkan Subsektor	80
Tabel 6.10 Garis Kemiskinan Jawa Tengah Menurut Daerah	81
Tabel 6.11 Perbandingan Koefisien Gini Provinsi Peers	82
Tabel 7.1 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan	85
Tabel 7.2 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	86

TABEL INDIKATOR EKONOMI PROVINSI JAWA TENGAH

A. PDRB & Inflasi

INDIKATOR	2018				2018	2019				2019	2020	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
EKONOMI MAKRO REGIONAL *)												
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (% , YOY)	5,37	5,43	5,21	5,28	5,32	5,15	5,56	5,66	5,34	5,41	2,61	-5,94
PERTUMBUHAN BERDASARKAN SEKTOR												
- PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	0,69	4,30	3,26	2,13	2,63	1,13	4,81	-1,62	1,56	1,36	-2,66	2,15
- PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	1,85	5,69	2,17	0,24	2,45	5,94	3,14	2,46	2,04	3,36	5,93	-4,74
- INDUSTRI PENGOLAHAN	4,77	4,35	3,98	4,31	4,35	3,64	3,67	6,18	5,28	5,19	2,70	-4,40
- PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	4,11	5,16	5,85	6,25	5,36	6,21	4,81	4,83	6,05	5,48	4,60	-1,29
- PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	7,11	5,76	4,05	2,74	4,88	2,61	5,35	4,68	5,01	4,42	3,04	1,34
- KONSTRUKSI	6,56	5,34	7,57	4,85	6,07	5,31	3,45	5,67	5,43	4,95	1,08	-5,85
- PERDAGANGAN BESAR-ECERAN DAN REPARASI MOBIL-SEPEDA MOTOR	5,16	5,34	5,81	6,47	5,70	6,80	6,64	6,68	4,05	5,98	1,79	-11,59
- TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	4,90	8,62	6,50	10,07	7,55	9,92	8,32	8,27	7,56	8,49	3,03	-62,95
- PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	10,24	8,29	7,32	6,95	8,17	12,59	19,40	18,84	10,78	9,14	3,98	-19,51
- INFORMASI DAN KOMUNIKASI	17,19	11,83	11,56	9,53	12,39	12,15	12,41	11,52	10,49	11,62	11,27	18,79
- JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	6,37	3,61	1,75	2,73	3,58	2,64	0,18	4,19	6,70	3,51	8,93	1,50
- REAL ESTATE	6,72	5,69	5,26	4,69	5,58	4,27	6,26	6,22	5,38	5,53	3,82	-2,85
- JASA PERUSAHAAN	11,14	11,04	9,48	6,47	9,48	8,76	9,66	13,53	10,24	10,54	5,35	-17,47
- ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	4,08	4,27	2,62	6,62	4,43	2,13	3,82	3,01	3,07	3,71	1,55	-1,42
- JASA PENDIDIKAN	7,08	6,26	7,87	9,75	7,76	7,35	7,19	5,78	8,96	7,59	4,56	-0,76
- JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	8,82	5,99	8,84	11,49	8,80	9,01	7,89	5,11	5,12	6,72	7,99	7,12
- JASA LAINNYA	9,22	9,93	8,92	9,71	9,45	9,68	9,99	9,32	7,19	9,02	4,93	-18,70
PERTUMBUHAN BERDASARKAN PERMINTAAN												
- KONSUMSI RUMAH TANGGA	4,67	5,13	4,29	4,71	4,69	4,79	5,16	4,18	4,36	4,62	3,46	-4,16
- KONSUMSI LNPRT	4,62	6,71	9,20	9,87	7,62	12,41	12,89	7,51	8,15	10,90	-1,88	-5,41
- KONSUMSI PEMERINTAH	5,11	2,44	1,77	3,17	2,98	5,71	5,56	6,23	0,10	3,98	1,92	-9,42
- PMTB	6,60	8,48	9,69	5,95	7,68	6,92	4,14	5,49	2,98	4,85	0,16	-12,69
- EKSPOR LUAR NEGERI	13,69	15,31	12,53	7,12	12,02	3,45	-2,50	18,78	-0,62	4,92	4,58	-7,81
- IMPOR LUAR NEGERI	18,51	45,75	47,81	21,73	32,61	6,13	-11,24	-19,64	-10,10	-9,33	-5,99	-37,93
- NET EKSPOR ANTARDAERAH	18,92	53,02	46,07	137,59	48,66	4,82	-3,40	-39,23	-0,14	-11,75	-9,29	-50,96
- PERUBAHAN INVENTORI	0,26	1,84	181,17	153,84	5,92	1,22	-17,08	-17,13	-13,78	-5,13	1,95	77,83
EKSPOR												
- NILAI EKSPOR NON MIGAS (USD JUTA)	1.975	1.903	2.153	2.036	8.068	2.116	1.956	2.101	2.052	8.224	2.100	1.542
- VOLUME EKSPOR NON MIGAS (RIBU ON)	714	710	793	805	3.022	767	762	850	834	3.212	908	735
IMPOR												
- NILAI IMPOR NON MIGAS (USD JUTA)	2.022	2.311	2.585	2.733	9.652	2.280	2.201	2.214	2.082	8.777	2.016	1.564
- VOLUME IMPOR NON MIGAS (RIBU ON)	1.179	1.242	1.443	1.577	5.441	1.357	1.336	1.331	1.352	5.376	1.320	1.376
INDEKS HARGA KONSUMEN												
PROVINSI JAWA TENGAH	130,94	131,85	131,69	132,98	132,98	133,32	135,16	135,81	136,71	136,71	104,47	104,74
KOTA PURWOKERTO	129,19	130,53	130,30	131,87	131,87	131,99	133,63	134,10	134,88	134,88	103,88	104,42
KOTA SURAKARTA	127,76	128,86	127,98	129,30	129,30	130,05	131,89	131,83	133,10	133,10	103,76	103,82
KOTA SEMARANG	130,71	131,45	131,57	132,70	132,70	132,95	134,87	135,78	136,59	136,59	104,88	105,13
KOTA TEGAL	128,62	130,17	129,95	131,35	131,35	131,44	133,53	133,77	134,71	134,71	104,55	105,16
KOTA KUDUS	138,90	139,55	139,44	140,92	140,92	141,29	142,75	144,33	145,17	145,17	103,81	103,92
KOTA CILACAP	135,58	136,35	136,12	137,73	137,73	138,27	139,93	139,93	140,75	140,75	103,03	103,67
LAJU INFLASI TAHUNAN (% , YOY)												
PROVINSI JAWA TENGAH	3,39	2,72	2,79	2,82	2,82	1,82	2,52	3,13	2,80	2,80	3,25	2,48
KOTA PURWOKERTO	3,17	2,59	2,83	2,98	2,98	2,17	2,37	2,92	2,28	2,28	2,81	2,55
KOTA SURAKARTA	2,83	2,37	2,68	2,45	2,45	1,79	2,35	3,01	2,94	2,94	2,24	1,40
KOTA SEMARANG	3,45	2,82	2,74	2,77	2,77	1,71	2,60	3,20	2,93	2,93	3,64	2,84
KOTA TEGAL	3,78	3,12	2,98	3,08	3,08	2,19	2,58	2,94	2,56	2,56	3,53	2,43
KOTA KUDUS	3,54	2,57	2,90	3,11	3,11	1,72	2,29	3,51	3,02	3,02	2,66	1,65
KOTA CILACAP	3,82	2,77	3,03	3,21	3,21	1,98	2,63	2,80	2,19	2,19	2,15	2,04

*Mulai tahun 2020 perhitungan IHK menggunakan SBH 2018
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

B. Perbankan dan Sistem Pembayaran

INDIKATOR	2018				2018	2019				2019	2020	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
PERBANKAN **)												
DANA PIHAK KETIGA (RP TRILIUN)	270,39	279,53	282,04	285,67	285,67	288,89	305,82	309,81	305,63	305,63	310,74	324,09
- GIRO	39,99	40,68	39,06	35,10	35,10	38,28	41,57	40,19	38,81	38,81	40,75	45,25
- TABUNGAN	135,66	142,07	144,28	152,72	152,72	148,23	154,72	159,31	168,29	168,29	166,91	172,11
- DEPOSITO	94,74	96,78	98,70	97,84	97,84	102,37	109,54	110,30	98,53	98,53	103,08	106,72
KREDIT (RP TRILIUN)	260,10	268,37	272,37	279,82	279,82	282,12	287,54	293,08	299,05	299,05	300,57	295,46
- MODAL KERJA	138,00	145,53	149,63	153,09	153,09	151,16	154,93	157,80	160,87	160,87	160,80	157,68
- KONSUMSI	42,50	43,31	41,60	43,45	43,45	47,05	47,82	48,80	50,44	50,44	51,22	49,84
- INVESTASI	79,59	79,53	81,14	83,28	83,28	83,91	84,79	86,47	87,74	87,74	88,55	87,94
LOAN TO DEPOSIT RATIO (%)	96,19	96,01	96,57	97,95	97,95	97,66	94,02	94,60	97,85	97,85	96,73	91,17
NPL GROSS (%)	2,43	2,43	2,59	2,45	2,45	2,48	2,38	2,88	4,17	4,17	4,80	5,20

**Data Perbankan merupakan data bank umum yang ada di Jawa Tengah (Lokasi Bank Pelapor)

C. Sistem Pembayaran

INDIKATOR	2018				2018	2019				2019	2020	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
SISTEM PEMBAYARAN												
TRANSAKSI KLIRING												
- RATA-RATA HARIAN NOMINAL TRANSAKSI (RP MILIAR)	653	714	702	645	2.715	574	621	609	621	2.410	636	567
- RATA-RATA HARIAN VOLUME TRANSAKSI (LEMBAR)	17.035	18.382	17.601	16.074	69.092	14.214	15.172	14.503	15.370	58.915	15.077	14.033
TRANSAKSI KAS (RP TRILIUN)												
-INFLOW	20,97	24,38	24,77	17,73	87,85	21,90	28,54	21,02	17,62	89,08	24,38	23,60
-OUTFLOW	11,34	29,85	11,41	16,81	69,40	11,04	18,61	14,63	19,86	64,14	12,44	21,01





RINGKASAN UMUM

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Pandemi COVID-19 menekan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II 2020. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Agustus 2020, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi -5,94% (yoy), turun dari pencapaian triwulan I 2020 sebesar 2,61% (yoy). Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak pada menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi barang dan jasa yang terindikasi dari pelemahan ekonomi global dan menurunnya aktivitas ekonomi nasional dan Jawa Tengah sebagai dampak dari kebijakan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19.

Ditinjau dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II 2020 terjadi pada seluruh komponennya. Konsumsi rumah tangga dan investasi merupakan dua komponen dengan sumbangan dampak terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi negatif di Jawa Tengah. Kondisi global turut mempengaruhi kinerja perdagangan luar negeri dimana ekspor dan impor tercatat tumbuh negatif. Lemahnya aktivitas perekonomian domestik membuat impor luar negeri mencatat pertumbuhan terendah setidaknya dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Dampak COVID-19 yang memuncak pada triwulan II 2020 membuat hampir seluruh lapangan usaha di Jawa Tengah mengalami penurunan pertumbuhan. Tercatat hanya lapangan usaha pertanian dan informasi dan komunikasi yang mengalami peningkatan pertumbuhan. Dua sektor dengan pangsa terbesar di Jawa Tengah yaitu industri pengolahan dan perdagangan menjadi pendorong utama pertumbuhan negatif Jawa Tengah di triwulan II 2020. Sementara, sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan negatif terdalam yang disebabkan pembatasan aktivitas transportasi baik darat, laut, maupun udara.

Memasuki triwulan III, perekonomian Jawa Tengah diperkirakan mengalami perbaikan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2019 bersumber dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Pembatasan sosial mulai dilonggarkan sejak Juni 2020 sehingga aktivitas perekonomian mulai meningkat. Aktivitas masyarakat di pusat perbelanjaan kebutuhan pokok yang dicatat Google *Mobility Index* telah kembali ke *baseline*, bahkan sudah mengalami peningkatan di atas normal pada awal Agustus 2020. Pada komponen investasi, peningkatan akan terjadi baik pada sektor pemerintah maupun swasta. Rencana investasi yang tertunda pada semester awal 2020 akan mulai direalisasikan pada semester akhir. Sementara, kinerja ekspor masih diperkirakan masih akan menurun mengingat adanya peningkatan ekspor migas pada triwulan yang sama pada tahun 2019.

Berdasarkan lapangan usaha, pelonggaran pembatasan sosial akan membuat seluruh lapangan usaha bergerak ke arah lebih baik. Sektor-sektor utama Jawa Tengah akan tumbuh meningkat dibanding triwulan II 2020. Meskipun, berkurangnya tenaga kerja akan membuat peningkatan bersifat terbatas. Membaiknya kondisi permintaan domestik dan global akan dimanfaatkan pelaku industri untuk meningkatkan kapasitas utilitasnya. Pelonggaran pembatasan sosial juga memberi ruang yang lebih besar bagi para tenaga kerja untuk lebih produktif.

Keuangan Pemerintah

Pada Triwulan II tahun 2020 anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan. Adanya perubahan tersebut merupakan upaya rasionalisasi dan refocusing penggunaan anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Anggaran pendapatan pemerintah provinsi Jawa Tengah menurun sebesar 8,37% dibandingkan anggaran sebelum perubahan. Sementara anggaran belanja juga menurun sebesar 8,14% dibandingkan anggaran sebelum perubahan. Namun demikian, penurunan anggaran belanja sejatinya adalah refocusing penggunaan anggaran kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya kepada penanggulangan COVID-19 yang nantinya akan tercermin pada anggaran belanja tidak terduga pada APBD.

Realisasi pendapatan daerah pada triwulan laporan tercatat sebesar 35,97%, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 48,17%. Menurunnya realisasi pendapatan daerah bersumber dari menurunnya realisasi anggaran perimbangan, khususnya dana alokasi khusus yang dikarenakan adanya kebijakan rasionalisasi dan refocusing anggaran dari kementerian keuangan.

Realisasi belanja mengalami penurunan yang bersumber dari penurunan penyerapan belanja tidak langsung. Tercatat realisasi belanja tidak langsung hanya sebesar 24,35% pada periode laporan, lebih rendah dari periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 36,83%. Komponen belanja yang mendorong rendahnya penyerapan belanja tidak langsung adalah penurunan belanja hibah yang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu.

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah pada triwulan II 2020 sebesar 2,48% (yoy), melambat dibandingkan triwulan I 2020 yang sebesar 3,25% (yoy). Berdasarkan disagregasi kelompok, perlambatan laju inflasi tahunan Jawa Tengah terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring dengan penurunan harga pada beberapa komoditas bahan makanan utama. Beberapa bahan makanan utama yang mengalami perlambatan laju inflasi adalah cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, dan bawang putih.

Secara keseluruhan 6 kota pantauan inflasi di Jawa Tengah seragam mencatatkan perlambatan laju inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Semarang dengan tingkat inflasi tahunan sebesar 2,83% (yoy) dan inflasi terendah terjadi di Kota Surakarta sebesar 1,40% (yoy).

Kemudian perkiraan pada triwulan III 2020 tekanan inflasi terus melambat dibandingkan triwulan II 2020. Melambatnya laju inflasi diperkirakan bersumber dari kelompok barang dan jasa makanan, minuman, dan tembakau seiring dengan masuknya musim panen salah satu bahan makanan utama, yaitu bawang merah. Kemudian risiko inflasi diperkirakan bersumber dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya seiring dengan terus meningkatnya harga emas global yang tentu saja akan mempengaruhi harga emas perhiasan pada basket inflasi.

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan, dan UMKM

Stabilitas sistem keuangan di Jawa Tengah masih relatif terjaga, walaupun kinerja intermediasi perbankan di Jawa Tengah mengalami penurunan sejalan dengan kinerja perekonomian yang tumbuh melambat. Ditinjau dari sisi lapangan usaha, perlambatan pertumbuhan bersumber dari pelemahan kinerja lapangan usaha perdagangan besar & eceran serta lapangan industri pengolahan. Namun demikian, kinerja penyaluran kredit lapangan usaha utama lainnya yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan tercatat mengalami perbaikan ditopang oleh peningkatan penyerapan kredit modal kerja.

Rumah Tangga memegang peranan besar terhadap perekonomian di Jawa Tengah, baik terhadap komponen pembentukan konsumsi Produk Domestik Regional Bruto,

maupun terhadap penghimpunan dana pihak ketiga serta penyerapan kredit pada sistem keuangan di Jawa Tengah. Pada triwulan laporan, penyaluran kredit rumah tangga tumbuh walaupun relatif terbatas. Mayoritas pembiayaan konsumsi rumah tangga digunakan untuk membiayai multiguna, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB), dengan kualitas kredit yang relatif terjaga.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Perkembangan indikator sistem pembayaran di Jawa Tengah pada triwulan II 2020 sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Nilai transaksi melalui SKNBI menunjukkan kontraksi baik secara triwulanan maupun tahunan. Pertumbuhan triwulanan mengalami kontraksi 16,36% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya, sementara pertumbuhan tahunan juga sejalan mengalami kontraksi sebesar 3,68% (yoy).

Aliran uang di Jawa Tengah mencatatkan posisi net inflow sebesar Rp2,59 triliun, mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami net intflow sebesar Rp11,93 triliun. Sementara itu, transaksi menggunakan Uang Kertas Asing (UKA) di KUPVA BB mengalami penurunan dari sisi pembelian UKA secara triwulanan dan tahunan, seiring dengan menurunnya transfer dana dari Luar Negeri ke Jawa Tengah.

Untuk memperluas implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), sesuai ketentuan Bank Indonesia, per tanggal 1 Januari 2020 pedagang di seluruh Indonesia wajib menggunakan QR Code dengan QR Code Indonesian Standard (QRIS). Pertumbuhan merchant di Provinsi Jawa Tengah yang telah menggunakan QRIS sampai dengan akhir Juni 2020 adalah sebanyak 327.401 merchant.

Penyaluran bansos secara non tunai telah disalurkan kepada 1,55 juta KPM PKH dan 3,5 juta KPM Program Sembako (sebelumnya bernama BPNT) sesuai prinsip 6T (tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi).

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Ketenagakerjaan di Jawa Tengah pada triwulan II 2020 merasakan dampak wabah COVID-19. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia, kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah pada triwulan II 2020 menurun drastis, yang ditunjukkan indeks ketersediaan lapangan kerja menurun dari 116,83 menjadi 38,84. Hal ini juga disertai penurunan penghasilan dimana indeks penghasilan saat ini menurun dari 126,82 menjadi 69,67 pada triwulan II 2020. Penurunan permintaan di tingkat domestik dan global membuat aktivitas produksi melemah. Sehingga beberapa pelaku usaha terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan.

Merujuk pada rilis Badan Pusat Statistik terkini, angka pengangguran mengalami sedikit peningkatan pada Februari 2020 dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau pengangguran pada Februari 2020 tercatat sebanyak 0,80 juta orang, atau bertambah 2,56% (yoy) dibandingkan kondisi Februari 2019 yang berjumlah 0,78 juta orang. Walaupun terjadi peningkatan jumlah pengangguran, namun peningkatan relatif terbatas.

Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juni 2020 mengalami penurunan dibandingkan Maret 2020. NTP pada Juni 2020 tercatat sebesar 101,10, menurun dari Maret 2020 sebesar 102,12. Penurunan NTP pada Juni 2020 terutama didorong kenaikan biaya yang dibayar petani lebih tinggi dari kenaikan penghasilan yang diterima petani pada Juni 2020. Peningkatan biaya yang harus dibayarkan oleh petani terjadi di komponen biaya kebutuhan proses produksi dan penambahan barang modal. Pengeluaran untuk kegiatan usaha pertanian meningkat untuk seluruh jenis komponen biaya yaitu bahan baku, barang modal kerja, dan upah buruh.

Prospek Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan IV 2020 diperkirakan semakin membaik dibanding triwulan III 2020. Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan pada triwulan IV 2020 terutama didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor luar negeri.

Penyebaran COVID-19 diperkirakan mereda sehingga aktivitas perekonomian dapat lebih baik pada periode akhir 2020. Pergeseran cuti bersama ke akhir tahun 2020 juga dapat memicu peningkatan konsumsi rumah tangga. Sementara pada sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.

Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada 2020 diperkirakan akan bergerak di bawah kapasitasnya sehingga lebih rendah dibandingkan 2019. Penyebaran COVID-19 yang meluas di domestik maupun global berdampak besar terhadap ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2020. Pelemahan pertumbuhan ekonomi terutama didorong penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor luar negeri. Dari sisi lapangan usaha, penurunan kinerja perekonomian diperkirakan terjadi pada lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.





PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL

Dampak terbesar akibat COVID-19 di Jawa Tengah terjadi pada triwulan II 2020.

- Pada triwulan II 2020, seluruh komponen pengeluaran perekonomian terpengaruh COVID-19 dengan dampak terbesar terjadi pada konsumsi rumah tangga dan investasi. Pembatasan sosial domestik dan global berpengaruh dominan terhadap aktivitas perekonomian di Jawa Tengah.
- Berbagai lapangan usaha Jawa Tengah mengalami kontraksi termasuk sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Proses produksi tidak dapat berlangsung optimal saat pembatasan sosial dan tingkat permintaan yang rendah.



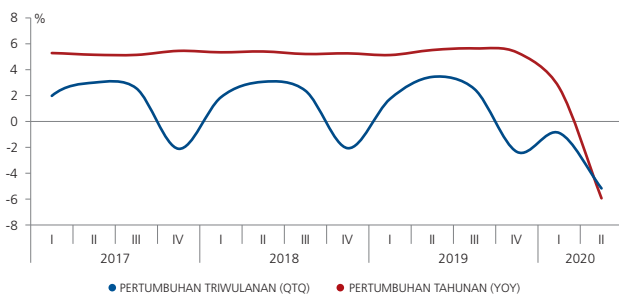
1.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL TRIWULAN I 2020¹

Pandemi COVID-19 menekan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II 2020. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Agustus 2020, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi -5,94% (yoy), mengalami penurunan dari pencapaian triwulan I 2020 sebesar 2,61% (yoy). Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak pada menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi barang dan jasa yang terindikasi dari pelemahan ekonomi global dan menurunnya aktivitas ekonomi nasional dan Jawa Tengah sebagai dampak dari kebijakan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19.

Kinerja perekonomian Jawa Tengah tersebut berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar -5,32% (yoy). Namun, lebih baik dibanding kawasan Jawa yang mengalami penurunan pertumbuhan lebih dalam yaitu sebesar -6,69% (yoy). Lebih lanjut, secara triwulanan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan sebesar -5,17% (qtq), atau menurun signifikan dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 3,45% (qtq).

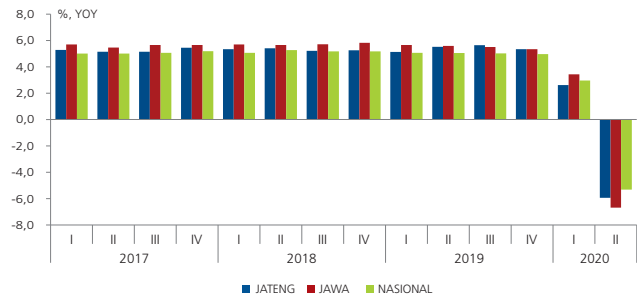
Perlambatan pertumbuhan yang terjadi di Jawa Tengah sejalan dengan perekonomian kawasan Jawa yang tercatat juga melambat. Dampak penyebaran COVID-19 menyebabkan seluruh provinsi di Jawa tumbuh melambat dengan pertumbuhan terdalam terjadi pada DKI Jakarta yang tumbuh -8,22% (yoy), Banten sebesar -7,40% (yoy), dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami pertumbuhan -6,74% (yoy). Sementara, provinsi lainnya di Jawa relatif tumbuh mirip dengan yang terjadi di Jawa Tengah yaitu Jawa Barat tumbuh -5,98% (yoy) dan Jawa Timur tumbuh -5,90% (yoy).

Dengan pertumbuhan yang relatif tidak lebih dalam dibanding provinsi lain di Jawa membuat perekonomian Provinsi Jawa Tengah menyumbang 8,81% terhadap perekonomian Nasional, atau 14,69% terhadap perekonomian kawasan Jawa. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Dengan sumbangan tersebut, Jawa Tengah menjadi provinsi penyumbang keempat terbesar dalam perekonomian nasional maupun kawasan Jawa, setelah DKI Jakarta, Jawa



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah



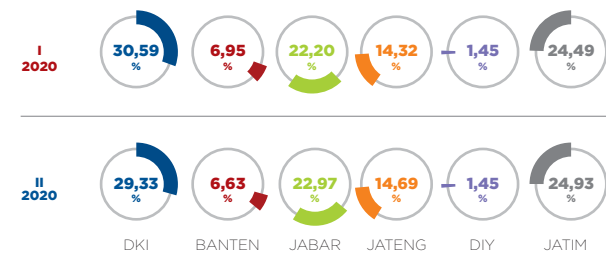
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa, dan Nasional

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Jawa (% yoy)

PROVINSI	TW I 2020	TW II 2020
DKI JAKARTA	5.06	-8.22
BANTEN	3.19	-7.40
JABAR	2.73	-5.98
JATENG	2.61	-5.94
DIY	-0.17	-6.74
JATIM	3.02	-5.90
JAWA	3.43	-6.69

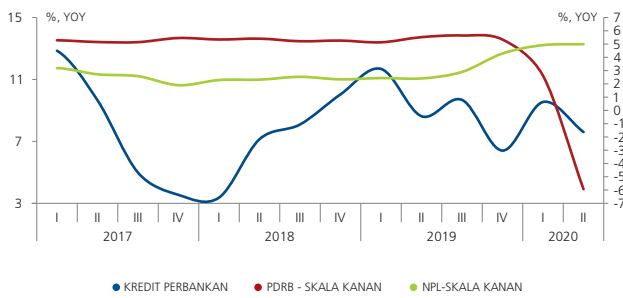
Sumber: BPS, diolah



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.3 Struktur Perekonomian Kawasan Jawa berdasarkan Provinsi

1. Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah diambil dari Berita Resmi Statistik (BRS) Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dengan menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA 2008 yang dikeluarkan BPS Provinsi Jawa Tengah. Apabila terdapat perbedaan angka pertumbuhan tahunan yang tertera pada BRS periode saat ini dengan perhitungan ADHK periode sebelumnya, yang menjadi acuan dalam penulisan LPP adalah angka PDRB ADHK berdasarkan BRS pada saat periode terkini. Hal ini dimungkinkan mengingat besaran PDRB tahun 2019, 2018, dan 2017 masih bersifat sementara.



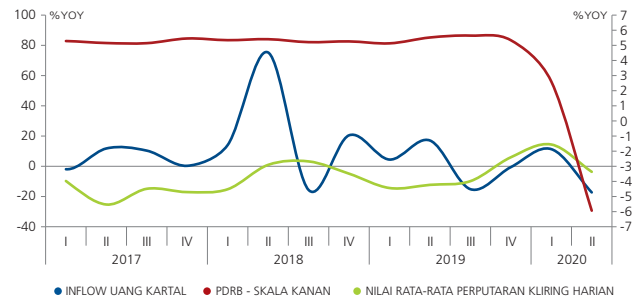
Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.4 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi

Timur, dan Jawa Barat. Perekonomian kawasan Jawa secara dominan masih disumbang oleh Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur dengan kedua daerah ini mencapai pangsa 54,3%.

Kegiatan ekonomi dapat tercermin dari beberapa sarana pendukung, seperti kebutuhan akan pembiayaan. Pada saat perekonomian tumbuh negatif, penyaluran kredit di Jawa Tengah mengalami perlambatan. Pertumbuhan kredit perbankan yang disalurkan di Jawa Tengah tercatat 7,60% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 9,54% (yoy)².

Ditinjau dari sisi pengeluaran, pertumbuhan negatif ekonomi di Jawa Tengah pada triwulan I 2020 terjadi pada semua komponen dengan andil terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Kondisi penyebaran wabah COVID-19 yang mempengaruhi perdagangan Jawa Tengah baik dalam negeri maupun luar negeri. Sementara, kinerja negatif dari impor luar negeri merupakan yang terendah setidaknya dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Meski merupakan komponen pengurang PDRB, penurunan impor merupakan indikasi aktivitas perekonomian lesu di Jawa Tengah.



Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.5 Pertumbuhan Tahunan *Outflow* Uang Kartal, Rata-Rata Perputaran Kliring Harian, dan Pertumbuhan Ekonomi

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan negatif terjadi pada seluruh sektor utama kecuali pertanian yaitu industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Lebih lanjut, lapangan usaha lainnya juga terdampak penyebaran wabah COVID-19 antara lain transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta jasa perusahaan. Namun demikian, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif seperti informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

1.1.1 Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Berdasarkan sisi pengeluaran, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan II 2020 masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan pangsa 61,73%. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi memberikan kontribusi terbesar kedua, yaitu sebesar 29,61%. Lebih lanjut, pangsa pengeluaran impor luar negeri sebesar 8,99%, ekspor luar negeri sebesar 7,86%, konsumsi pemerintah sebesar 6,41%, dan net ekspor antardaerah sebesar 0,70%. Kondisi COVID-19 telah mempengaruhi penurunan pangsa ekspor dan impor luar negeri serta perdagangan antar daerah.

Tabel 1.2 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB menurut Pengeluaran (Rp Miliar)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018*		2018*	2019**				2019**	2020**	
	III	IV		I	II	III	IV		I	II
KONSUMSI RUMAH TANGGA	193.483	196.161	764.808	198.652	205.112	206.664	211.520	821.948	213.219	200.497
KONSUMSI LNPR	3.651	3.793	14.492	3.990	4.207	4.050	4.196	16.443	4.020	4.046
KONSUMSI PEMERINTAH	23.847	37.792	98.717	16.376	23.332	26.002	37.729	103.440	16.982	20.822
INVESTASI	108.660	110.438	413.749	105.188	109.855	118.594	115.849	449.486	105.913	96.151
EKSPOR LUAR NEGERI	33.267	32.329	123.868	31.599	29.422	35.988	31.547	128.555	32.474	25.526
IMPOR LUAR NEGERI	66.100	64.725	234.981	51.454	49.719	49.370	53.403	203.947	46.155	29.208
NET EKSPOR ANTARDAERAH	22.109	10.262	70.600	15.058	12.153	4.939	3.020	35.171	7.385	2.267
PERUBAHAN INVENTORI	8.104	-5.414	17.202	8.490	5.243	4.539	-6.910	11.362	8.485	4.677
PDRB	327.021	320.636	1.268.455	327.899	339.605	351.406	343.548	1.362.457	342.322	324.778

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

2. Pertumbuhan kredit pada Bab I menggunakan lokasi proyek Jawa Tengah, yang berarti kredit yang disalurkan oleh bank se-Indonesia ke debitur atau proyek di Jawa Tengah.

Tabel 1.3 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Pengeluaran (Rp Miliar)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018**		2018**	2019**				2019**	2020**	
	III	IV		I	II	III	IV		I	II
KONSUMSI RUMAH TANGGA	140.425	141.189	556.541	142.435	146.169	146.301	147.349	582.253	147.357	140.094
KONSUMSI LNPRT	2.402	2.479	9.551	2.593	2.718	2.600	2.681	10.593	2.544	2.571
KONSUMSI PEMERINTAH	14.712	23.638	61.331	10.242	14.016	15.852	23.661	63.771	10.439	12.696
INVESTASI	74.464	74.418	285.045	70.442	73.210	78.592	76.634	298.877	70.554	63.921
EKSPOR LUAR NEGERI	22.250	21.527	84.578	21.329	19.792	26.226	21.394	88.741	22.306	18.247
IMPOR LUAR NEGERI	37.707	37.424	138.817	31.824	29.911	30.491	33.644	125.871	29.917	18.565
NET EKSPOR ANTARDAERAH	21.438	13.012	74.611	20.268	19.593	12.989	12.994	65.845	18.385	9.608
PERUBAHAN INVENTORI	3.095	-2.743	8.323	4.734	2.909	2.619	-2.365	7.897	4.827	5.173
P D R B	241.079	236.097	941.164	240.219	248.495	254.687	248.704	992.106	246.495	233.744

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 1.4 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ADHK menurut Pengeluaran (% , YOY)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018**		2018**	2019**				2019**	2020**	
	III	IV		I	II	III	IV		I	II
KONSUMSI RUMAH TANGGA	4,29	4,71	4,69	4,79	5,16	4,18	4,36	4,62	3,46	-4,16
KONSUMSI LNPRT	9,20	9,87	7,62	13,85	13,64	8,23	8,15	10,90	-1,88	-5,41
KONSUMSI PEMERINTAH	3,25	1,44	2,98	4,57	6,28	7,75	0,10	3,98	1,92	-9,42
INVESTASI	9,69	5,95	7,68	6,92	4,17	5,54	2,98	4,85	0,16	-12,69
EKSPOR LUAR NEGERI	12,40	7,10	11,77	3,75	(2,23)	17,87	(0,62)	4,92	4,58	-7,81
IMPOR LUAR NEGERI	47,81	21,73	32,61	6,13	(11,24)	(19,14)	(10,10)	(9,33)	-5,99	-37,93
NET EKSPOR ANTARDAERAH	45,56	142,01	49,00	3,89	(5,12)	(39,41)	(0,14)	(11,75)	-9,29	-50,96
PERUBAHAN INVENTORI	172,37	153,84	4,66	4,62	(15,58)	(15,40)	(13,78)	(5,13)	1,95	77,83
P D R B	5,21	5,26	5,31	5,13	5,52	5,64	5,34	5,41	2,61	-5,94

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

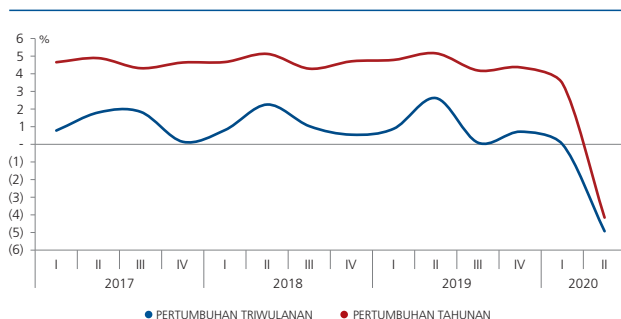
Pertumbuhan ekonomi yang kontraksi pada periode laporan terutama didorong oleh penurunan kinerja investasi dan konsumsi rumah tangga. Komponen lainnya yaitu konsumsi pemerintah dan ekspor luar negeri juga berkontribusi terhadap pertumbuhan negatif Jawa Tengah di triwulan II 2020 meski tidak sebesar investasi dan konsumsi rumah tangga. Sedangkan, impor luar negeri yang merupakan komponen pengurang PDRB melanjutkan tren pertumbuhan negatif yang terjadi sejak triwulan II 2019.

1.1.1.1 Pengeluaran Konsumsi

Secara agregat, permintaan domestik Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan negatif pada triwulan II 2020. Pembatasan sosial yang mulai diberlakukan sejak akhir

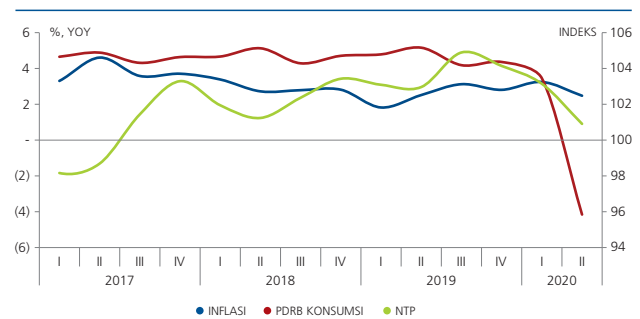
triwulan I 2020 telah mempengaruhi tendensi konsumsi dan daya beli masyarakat. Selain konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah juga terpengaruh kondisi pandemi COVID-19 sehingga tumbuh negatif.

Konsumsi rumah tangga sebagai komponen pengeluaran dengan pangsa terbesar tumbuh -4,16% (yoy) pada triwulan II 2020, berbanding terbalik dibandingkan triwulan I 2020 yang sebesar 3,46% (yoy). Secara triwulanan, konsumsi rumah tangga triwulan laporan tumbuh tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di saat hari besar keagamaan nasional dengan tumbuh -4,93% (qtq). Realisasi ini juga jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 2,62% (qtq).



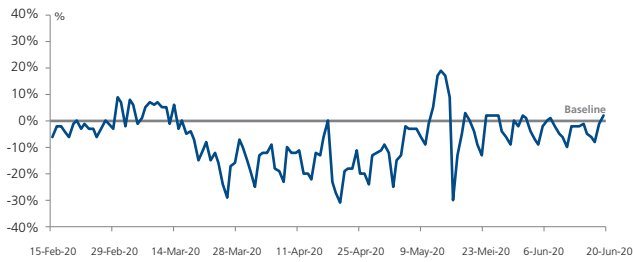
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.6 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.7 Perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga

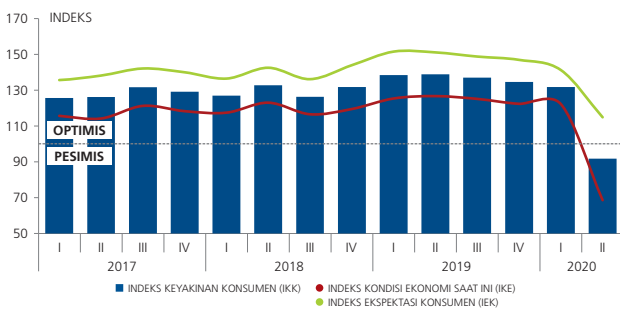


Sumber: Google Mobility Report

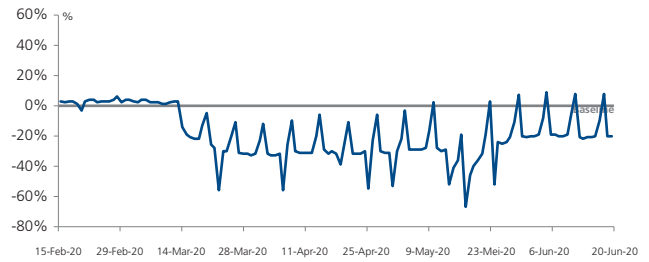
Grafik 1.8 Pergerakan Masyarakat di Pusat Belanja Ritel

Penurunan kinerja konsumsi rumah tangga terutama disebabkan pembatasan aktivitas masyarakat sebagai bentuk kebijakan dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Himbauan untuk tetap di rumah cenderung dipatuhi masyarakat sehingga tempat-tempat umum menjadi minim aktivitas seperti pusat perbelanjaan dan perkantoran. Sejak konferensi pers oleh Presiden Republik Indonesia pada 15 Maret 2020 hingga akhir Mei 2020, penurunan pergerakan masyarakat Jawa Tengah di pusat perbelanjaan dan perkantoran terjadi hingga sebesar 29,0% dari aktivitas masyarakat pada kondisi normal (Grafik 1.8 dan Grafik 1.9). Meski masyarakat masih dapat melakukan konsumsi melalui transaksi daring, nilainya tidak lebih tinggi dibandingkan perilaku konsumsi pada periode normal.

Kegiatan dengan tingkat konsumsi tinggi pun menjadi berkurang seperti acara resepsi pernikahan, konser musik, dan perjalanan bisnis maupun rekreasi. Konsumsi masyarakat cenderung terbatas meski di tengah periode bulan puasa dan Idulfitri. Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) menunjukkan bahwa berdasarkan jenis konsumsi, pelemahan pengeluaran konsumsi rumah tangga terjadi pada hampir seluruh komponen kebutuhan kecuali kesehatan dan peralatan rumah tangga. Pangsa konsumsi rumah tangga yang mencapai 60% dari total PDRB menyebabkan pelemahan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.10 Indeks Keyakinan Konsumen

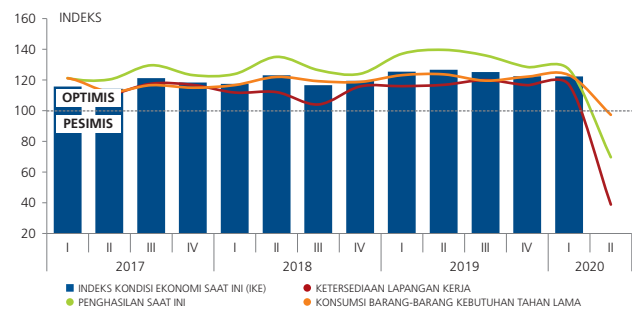
Sumber: Google Mobility Report

Grafik 1.9 Pergerakan Masyarakat di Perkantoran

kinerja konsumsi rumah tangga berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara keseluruhan di triwulan II 2020.

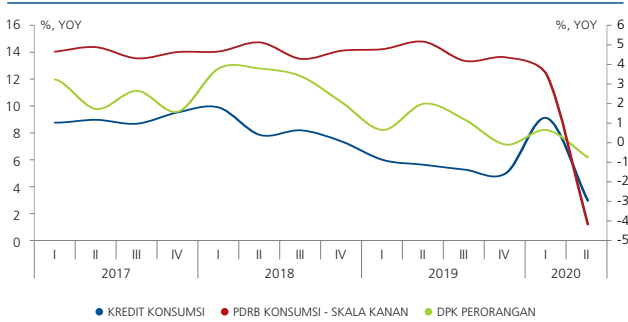
Pelemahan konsumsi rumah tangga ini terkonfirmasi dari hasil Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan survei tersebut, optimisme rumah tangga terhadap kondisi ekonomi rumah tangga triwulan laporan menurun cukup signifikan. Perkembangan tersebut ditunjukkan oleh nilai Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) triwulan II 2020 memasuki level pesimis sebesar 91,75; lebih rendah dibanding IKK triwulan I 2020 sebesar 131,77. Penurunan keyakinan terhadap ekonomi rumah tangga ini terjadi pada kedua komponen utamanya yaitu indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) dan indeks ekspektasi konsumen (IEK). IKE pada triwulan II 2020 memasuki level pesimis sebesar 68,60, lebih rendah dibanding indeks triwulan sebelumnya (122,27), sedangkan IEK menurun dari 141,27 menjadi 114,89.

Komponen IKE yang mengalami penurunan cukup dalam yaitu indeks penghasilan saat ini dan indeks ketersediaan lapangan kerja dimana pembatasan sosial tidak hanya membuat aktivitas konsumsi yang menurun, akan tetapi juga aktivitas produksi. Kondisi penghasilan masyarakat juga



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.11 Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini



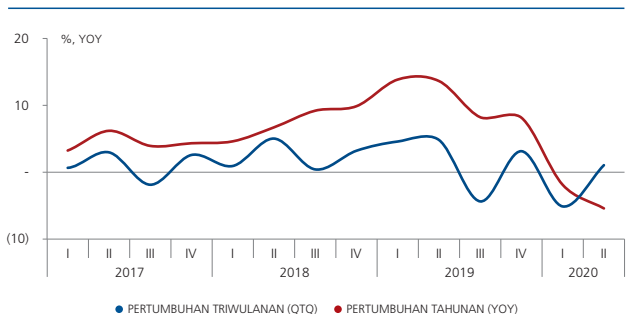
Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.12 Perkembangan Kredit Konsumsi, DPK Perorangan, dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga

tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang menggambarkan kondisi pendapatan masyarakat pada bidang pertanian. NTP pada triwulan II 2020 sebesar 100,91, lebih rendah dari triwulan sebelumnya 103,15. Sementara, ke depannya konsumen memperkirakan kondisi kegiatan usaha, penghasilan, dan lapangan kerja semakin menurun akibat wabah pandemi COVID-19.

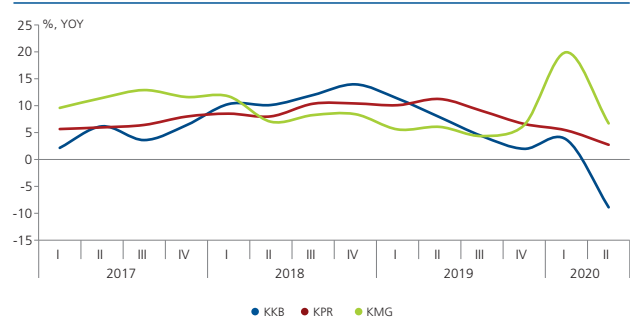
Penurunan kinerja konsumsi rumah tangga ini juga terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia. Berdasarkan survei tersebut, indeks penjualan suku cadang, bahan bakar kendaraan, dan rekreasi mengalami penurunan. Komponen penjualan terakhir menjadi komponen yang mengalami penurunan paling dalam dari 51,73 pada triwulan I 2020 menjadi 25,67 pada triwulan laporan.

Penurunan tendensi konsumsi juga tercermin dari inflasi yang rendah pada triwulan II 2020 mencatatkan inflasi sebesar 2,48% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 3,25% (yoy). Rendahnya inflasi terutama terjadi pada kelompok bahan makanan, makanan jadi, hingga sandang. Terbatasnya pergerakan masyarakat menyebabkan masyarakat cenderung selektif berbelanja dalam menghadapi kondisi ketidakpastian perekonomian di periode yang akan



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.14 Pertumbuhan Konsumsi LNPR

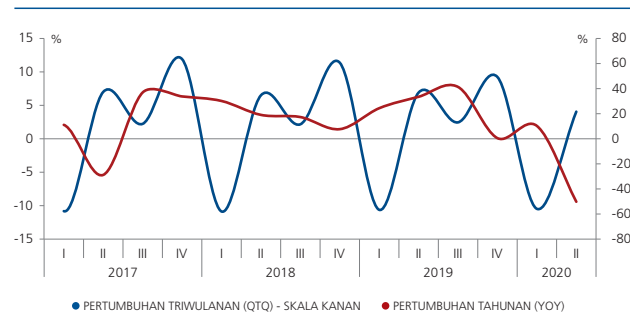


Grafik 1.13 Perkembangan Kredit Konsumsi berdasarkan Jenis Konsumsi

datang. Sementara itu, pembatasan aktivitas sosial di luar rumah mendorong konsumsi listrik rumah tangga yaitu meningkat 12,77% (yoy) pada triwulan II 2020 atau lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya 7,60% (yoy).

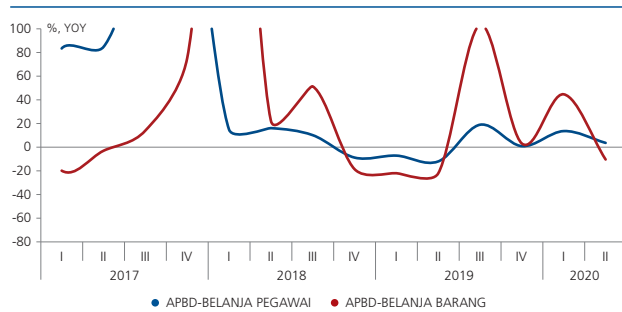
Kinerja konsumsi yang melambat juga terindikasi dari kinerja Dana Pihak Ketiga (DPK) milik perseorangan. Penyebaran COVID-19 telah berdampak pada terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga penghasilan menjadi berkurang. Hal tersebut tercermin dari dana pihak ketiga (DPK) rumah tangga di perbankan Jawa Tengah pada triwulan laporan yang tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan DPK oleh golongan nasabah perorangan menunjukkan melambat dari 8,22% (yoy) menjadi 6,19% (yoy) pada periode laporan.

Begitu pula dengan penyaluran kredit konsumsi di Jawa Tengah yang tumbuh melambat 2,99% (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan pada triwulan I 2020 sebesar 9,10% (yoy). Perlambatan kredit konsumsi semakin menguatkan lemahnya permintaan domestik di Jawa Tengah. Selain keterbatasan penghasilan, rendahnya tendensi konsumsi akibat kekhawatiran akan virus COVID-19, menjadi penyebab rendahnya kredit konsumsi.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.15 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah



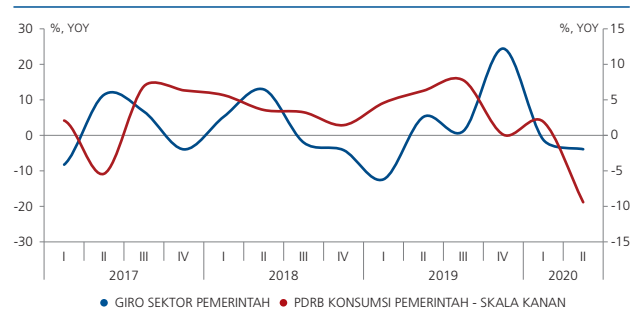
Grafik 1.16 Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPR) pada triwulan II 2020 tumbuh -5,41% (yoy), melanjutkan pertumbuhan negatif triwulan sebelumnya yang tercatat -1,88% (yoy). Perlambatan pertumbuhan pada triwulan laporan terutama akibat base effect kegiatan kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) yang intens terjadi pada triwulan I dan II 2019. Selain itu, pengeluaran lembaga lain seperti organisasi masyarakat dan lembaga sosial masyarakat juga mengalami penurunan. Kegiatan perayaan keagamaan umat Muslim dan Nasrani yang lebih banyak dilakukan di dalam rumah, juga turut mempengaruhi konsumsi LNPR.

Sejalan dengan konsumsi swasta, pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan negatif pada triwulan II 2020. Konsumsi pemerintah tumbuh -9,42% (yoy), lebih rendah dibanding realisasi triwulan sebelumnya yang masih mampu tumbuh positif 1,92% (yoy). Secara triwulanan, komponen pengeluaran ini tercatat tumbuh rendah dibanding periode-periode sebelumnya yaitu 21,63% (qtq) pada triwulan laporan. Sementara, pada triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 36,86% (qtq).

Perkembangan konsumsi pemerintah mengindikasikan wabah COVID-19 turut mempengaruhi kondisi pemerintahan. Pembatasan aktivitas perkantoran membuat belanja barang dan sosial menjadi tidak optimal. Sementara, belanja pegawai menurun karena adanya pengalihan tunjangan hari raya pegawai untuk penanganan COVID-19. Belanja barang yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah tumbuh -10,38% (yoy), lebih rendah dibanding 44,67% (yoy) dari triwulan I 2020. Realisasi belanja barang yang bersumber dari APBN juga mengalami menurun dari -7,15% (yoy) pada triwulan I 2020 menjadi -34,92% (yoy) pada triwulan laporan. Instruksi Presiden Republik Indonesia



Grafik 1.17 Pertumbuhan Giro Pemerintah dan PDRB Konsumsi Pemerintah

Sumber: Laporan Bank Umum, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

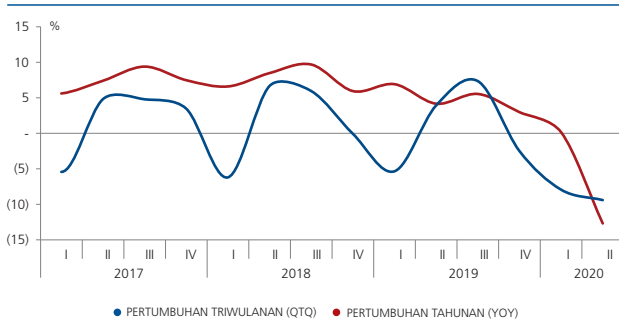
agar perubahan alokasi anggaran lebih banyak dilakukan untuk penanganan COVID-19. Beberapa alokasi untuk kebutuhan modal pembangunan, dialihkan untuk kebutuhan sosial dan barang yang menunjang penanganan COVID-19.

Selain dari minimnya aktivitas pada triwulan II 2020, pelemahan kinerja konsumsi pemerintah juga disebabkan penurunan realisasi pendapatan asli daerah. Hal tersebut tercermin dari penurunan simpanan giro pemerintah yang terdapat di perbankan yang berada di Jawa Tengah, yaitu menjadi tumbuh sebesar -3,91% (yoy), lebih dalam dari -1,23% (yoy) pada triwulan I 2020. Penurunan jumlah dana pemerintah yang berada di perbankan terjadi meski realisasi belanja tidak lebih baik dibanding triwulan sebelumnya.

Seperti halnya konsumsi LNPR, sumbangan konsumsi pemerintah tidak terlalu besar terhadap pertumbuhan ekonomi, namun komponen pengeluaran ini memberikan dampak secara tidak langsung yang dapat menopang konsumsi rumah tangga di tengah pandemi COVID-19. Anggaran bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Daerah Jawa Tengah dapat membantu masyarakat yang tidak dapat memperoleh penghasilan karena dampak pembatasan sosial.

1.1.1.2 Pengeluaran Investasi

Investasi menjadi komponen yang terpengaruh paling dalam akibat wabah COVID-19. Pada triwulan II 2020, investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar -9,42% (yoy), berbanding terbalik dibanding triwulan lalu yang tumbuh positif 0,16% (yoy). Secara triwulanan, investasi tercatat tumbuh negatif 9,40% (qtq), berbeda dengan periode yang sama tahun 2019 yang tercatat tumbuh -3,93% (qtq). Perlambatan kinerja ini diindikasikan terjadi baik di investasi bangunan maupun nonbangunan.

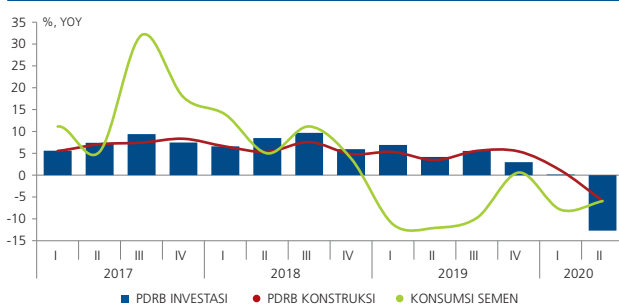


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.18 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto

Menurunnya kinerja investasi pada triwulan laporan terutama dipengaruhi oleh momentum peningkatan pembangunan infrastruktur tertahan penyebaran wabah COVID-19. Beberapa proyek infrastruktur pemerintah seperti peningkatan konektivitas jalur darat dan proyek bendungan di Jawa Tengah yang telah berjalan, terpaksa ditunda pengerjaannya karena pemberlakuan aturan pembatasan aktivitas sosial. Selain itu, beberapa proyek yang tidak termasuk proyek strategis terpaksa dibatalkan. Pengalihan alokasi anggaran dilakukan untuk mengatasi secepatnya penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah. Hal ini dikonfirmasi oleh melambatnya realisasi belanja modal di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalir ke Provinsi Jawa Tengah triwulan II 2020. Realisasi belanja modal tersebut menurun drastis hingga -35,96% (yoy).

Pertumbuhan negatif investasi juga tercermin pertumbuhan PDRB lapangan usaha konstruksi yang juga tumbuh negatif menjadi 5,85% (yoy) pada triwulan laporan. Realisasi pengadaan semen juga mengalami penurunan hingga -7,90% (yoy) dimana pada triwulan sebelumnya masih tumbuh positif 0,60% (yoy). Kinerja investasi yang melambat juga diindikasikan dalam bentuk nonbangunan, yang



Sumber: ASI, BPS Provinsi Jawa Tengah

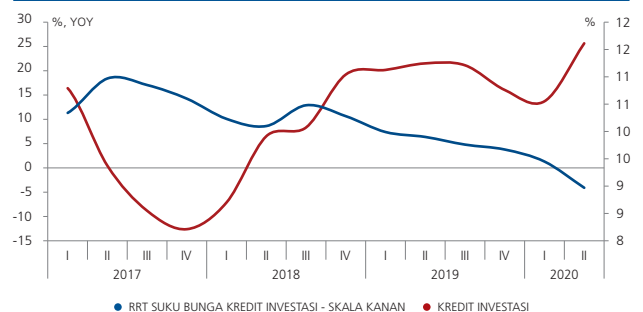
Grafik 1.19 Pertumbuhan PDRB Investasi, PDRB Konstruksi, dan Konsumsi Semen

tercermin dari impor barang modal yang mengalami pertumbuhan negatif 57,5% (yoy), melanjutkan periode sebelumnya yang juga negatif yaitu -30,06% (yoy). Perlambatan impor barang modal terutama berupa impor mesin, perlengkapan transportasi, dan bahan bakar industri.

Meski realisasi tidak begitu menggembirakan, pembiayaan untuk kegiatan investasi mengalami peningkatan pada triwulan II 2020. Pertumbuhan kredit yang disalurkan bank umum untuk kegiatan investasi di Jawa Tengah mengalami peningkatan menjadi 25,64% (yoy), dari tumbuh 13,72% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Investor berupaya memanfaatkan momentum suku bunga yang sedang rendah saat ini sehingga keuntungan saat perekonomian telah pulih meningkat. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit investasi saat ini telah mengalami penurunan dari 9,45% menjadi 8,97% pada periode laporan.

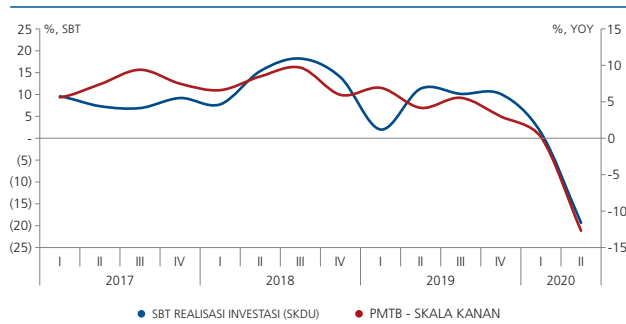
Pada sisi swasta, melemahnya kegiatan investasi terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan Bank Indonesia. Berdasarkan hasil SKDU, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) realisasi investasi pada triwulan laporan tercatat -19,34%; menurun signifikan dari triwulan I 2020 yang sebesar 1,30%. Hasil survei menunjukkan bahwa perlambatan terjadi pada di seluruh lapangan usaha utama seperti pertanian, industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.

Perlambatan kegiatan investasi juga tercermin dari hasil kegiatan liaison pada triwulan laporan. Nilai *likert scale* (LS) realisasi investasi triwulan laporan sebesar 0,26, menurun dibanding LS triwulan sebelumnya sebesar 0,80. Melihat kondisi triwulan II 2020 yang belum kondusif akibat COVID-19, berbagai kontak *liaison* cenderung menahan untuk melakukan investasi hingga kondisi perekonomian lebih baik.



Sumber: Laporan Bank Umum

Grafik 1.20 Pertumbuhan Kredit Investasi dan Suku Bunga Kredit Investasi



Grafik 1.21 Perkembangan SBT Realisasi Investasi (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Investasi

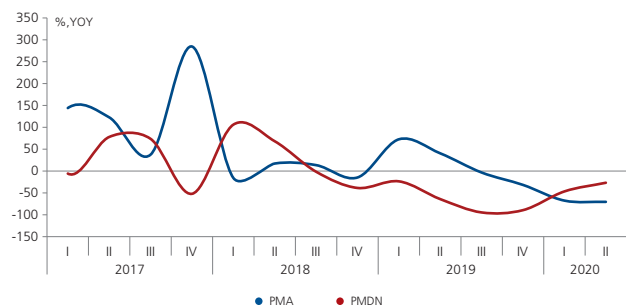


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.23 Hasil Liaison Pada Komponen Investasi

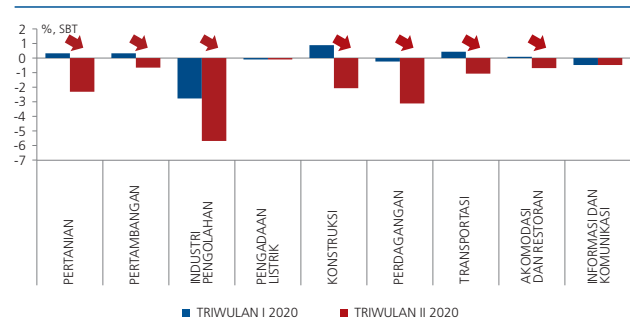
Pelaku usaha di sektor tekstil, kayu olahan, perdagangan, hingga makanan minuman, berupaya fokus dalam menjaga kondisi keuangan karena penjualan yang menurun.

Meskipun terdapat pelemahan kegiatan investasi, optimisme pelaku usaha terhadap kondisi perekonomian ke depan masih terjaga dengan baik. Produk industri Jawa Tengah masih sangat diminati masyarakat global. Hal ini didukung peran pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas industri di Jawa Tengah. Pelaku usaha meyakini pasca COVID-19 berakhir, penjualan produk dari Jawa Tengah akan meningkat. Meski tidak melakukan investasi yang besar, pihak swasta berupaya mempertahankan keberlangsungan usaha sembari



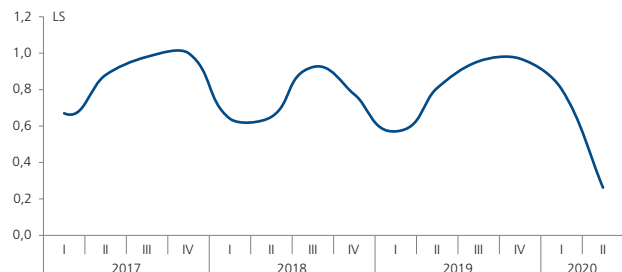
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah

Grafik 1.25 Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.22 Perkembangan SBT Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha (hasil SKDU)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.24 Likert Scale Investasi (Hasil Liaison)

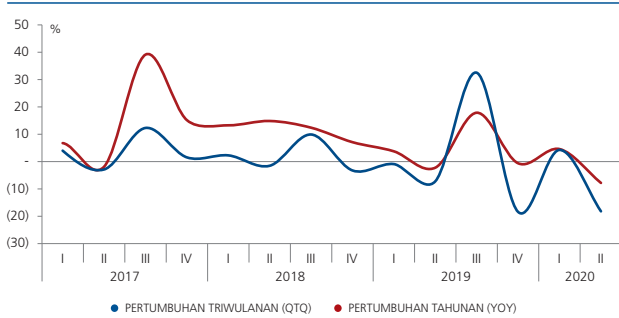
menunggu kondisi COVID-19 berakhir baik pada area domestik maupun global.

Penurunan kinerja investasi juga tercermin dari perlambatan realisasi penanaman modal pada triwulan II 2020. Perlambatan realisasi penanaman modal terjadi pada investasi yang berasal dari pihak asing. Pada triwulan II 2020 penanaman modal asing di Jawa Tengah adalah sebesar USD210,10 juta; atau tumbuh negatif semakin dalam -70,45% (yoy), dari triwulan I 2020 yang tumbuh -67,59% (yoy). Sementara itu, nilai penanaman modal dalam negeri pada triwulan laporan mengalami perbaikan dengan realisasi sebesar Rp1,24triliun; tumbuh 26,74% (yoy), mengalami perbaikan dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar -46,54% (yoy).

1.1.1.3 Ekspor dan Impor Luar Negeri

1.1.1.3.1 Ekspor Luar Negeri

Kondisi penyebaran wabah COVID-19 secara global juga berdampak pada perdagangan luar negeri Jawa Tengah. Ekspor luar negeri Jawa Tengah mengalami kontraksi 7,81% (yoy) pada triwulan II 2020. Kinerja ekspor luar negeri mengalami penurunan jika dibandingkan triwulan I 2020 yang tumbuh 4,58% (yoy). Secara triwulanan, ekspor

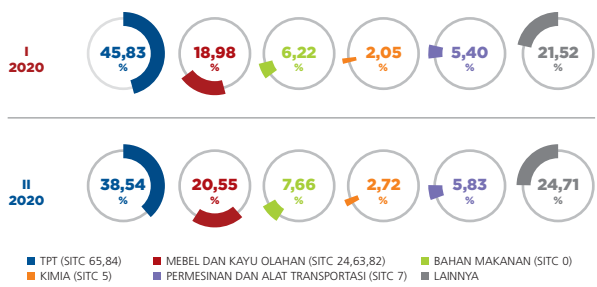


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.26 Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri

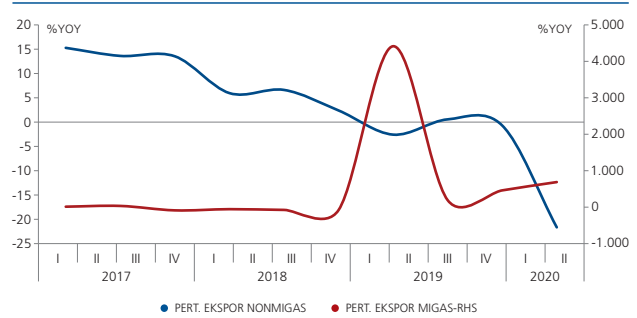
luar negeri pada triwulan II 2020 tumbuh -18,20% (qtq), atau lebih rendah dibanding pertumbuhan pada triwulan yang sama tahun sebelumnya (-7,21%; qtq). Kinerja ekspor dipengaruhi penurunan ekspor nonmigas dari Jawa Tengah. Kondisi tersebut terjadi sejak COVID-19 mulai muncul pada triwulan I 2020. Sebagian negara tujuan ekspor membatasi permintaan produk dari Jawa Tengah karena fokus dalam menangani penyebaran COVID-19 di negara masing-masing. Sedangkan, ekspor migas justru mengalami perbaikan, melanjutkan kinerja tinggi sejak triwulan III 2019.

Ekspor luar negeri nonmigas Jawa Tengah didominasi oleh ekspor komoditas tekstil dan produk tekstil atau TPT (SITC kode 26, 65, dan 84) dengan pangsa pada triwulan laporan mencapai 38,54%, serta kayu dan barang dari kayu (SITC 24, 63, dan 82) dengan pangsa 20,55%. Meski masih tinggi, pangsa TPT mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 45,83%. Hal ini disebabkan penurunan permintaan produk unggulan Jawa Tengah tersebut lebih besar dibanding produk ekspor lainnya. Selain kedua komoditas tersebut, ekspor bahan makanan (SITC 0), ekspor permesinan dan alat transportasi (SITC 7), serta ekspor kimia (SITC 5) juga turut berperan walaupun dengan pangsa masing-masing yang berada di bawah 10%.



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.28 Komposisi Ekspor Luar Negeri Nonmigas Berdasarkan Komoditas

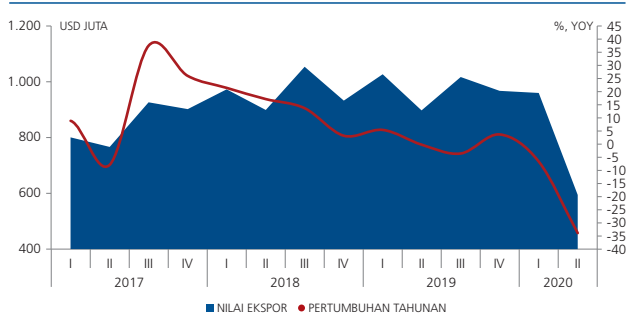


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.27 Pertumbuhan Ekspor Luar Negeri Jawa Tengah per Jenis Komoditas

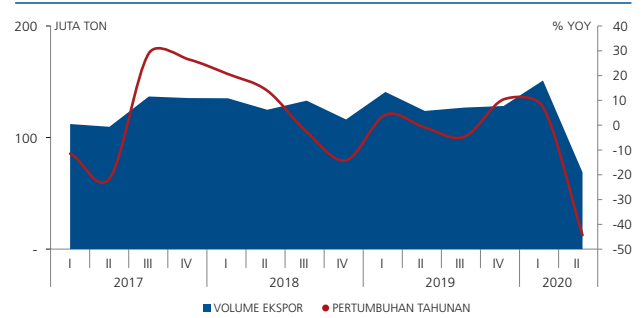
Sebagai komoditas ekspor dengan nilai pangsa terbesar di Jawa Tengah, ekspor TPT menjadi pendorong utama penurunan ekspor nonmigas. Pada triwulan II 2020, ekspor TPT tercatat tumbuh -33,84% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya (-6,54%; yoy). Penurunan tersebut terjadi pada seluruh komponen TPT. Ekspor tekstil berupa benang dan kain turun hingga 56,17% (yoy) pada triwulan laporan, lebih rendah dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya (-25,37%; yoy). Selain itu, ekspor pakaian jadi juga melemah dengan tumbuh -26,19% (yoy) dimana pada triwulan sebelumnya tumbuh -0,04% (yoy). Selain faktor proses ekspor yang menerapkan kebijakan baru dalam rangka pencegahan COVID-19, tingkat permintaan global juga menurun drastis karena kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan.

Hasil *liaison* Bank Indonesia pada triwulan II 2020 menunjukkan bahwa tingkat permintaan produk TPT baik di tingkat domestik maupun global mengalami penurunan. Kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan di tingkat global menyebabkan permintaan produk Jawa Tengah menurun. Tendensi konsumsi tidak hanya turun di Jawa Tengah, namun juga negara tujuan ekspor. Namun demikian, terdapat sisi positif berupa keunggulan produk Jawa Tengah yang masih diminati pasar global hanya saja permintaannya ditunda hingga wabah COVID-19 mereda. Penurunan terbesar terjadi pada kawasan yang menjadi negara tujuan utama ekspor TPT Jawa Tengah yaitu Amerika Serikat dan Eropa. Namun, industri TPT berupaya mencari alternatif ke wilayah Amerika Tengah dan Timur Tengah agar produksi tetap berjalan.



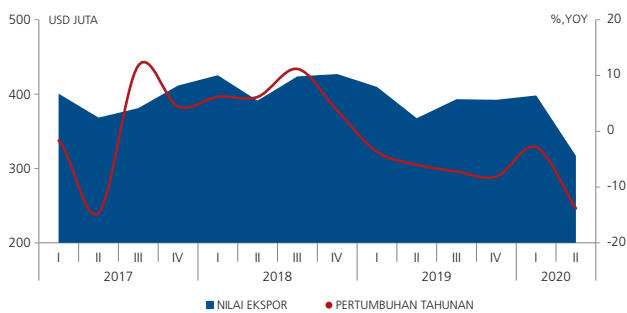
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.29 Pertumbuhan Nilai Ekspor TPT



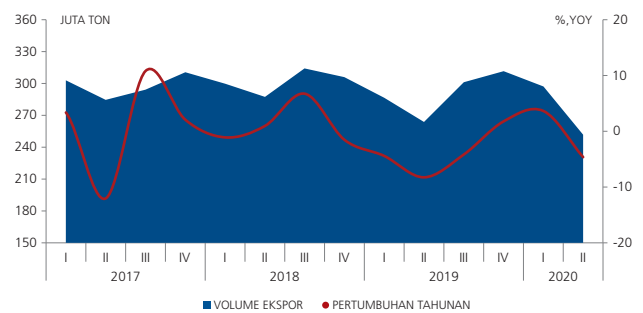
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.30 Pertumbuhan Volume Ekspor TPT



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.31 Pertumbuhan Nilai Ekspor Kayu



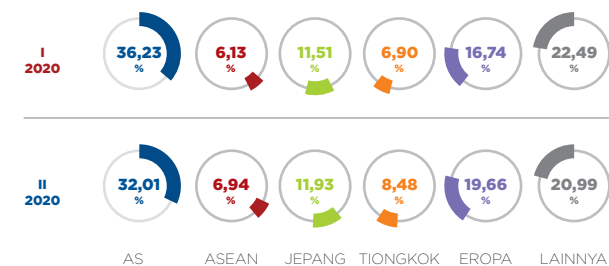
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.32 Pertumbuhan Volume Ekspor Kayu

Seperti yang terjadi pada ekspor TPT, kinerja ekspor kayu dan barang dari kayu Jawa Tengah pada triwulan laporan mengalami penurunan dibandingkan triwulan lalu. Secara nilai, ekspor komoditas tersebut mencatatkan pertumbuhan negatif 13,82% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan I 2020 sebesar -2,85% (yoy). Penurunan kinerja tersebut terjadi pada ekspor komoditas olahan kayu dan gabus serta furnitur. Secara nilai, ekspor komoditas olahan kayu dan gabus tumbuh sebesar -12,47% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar -0,06% (yoy). Sementara ekspor komoditas furnitur tumbuh -18,02% (yoy), melanjutkan tren negatif triwulan sebelumnya (-2,92%, yoy) pada triwulan sebelumnya. Ditinjau lebih jauh, ekspor komoditas kayu dan barang dari kayu terutama ditujukan

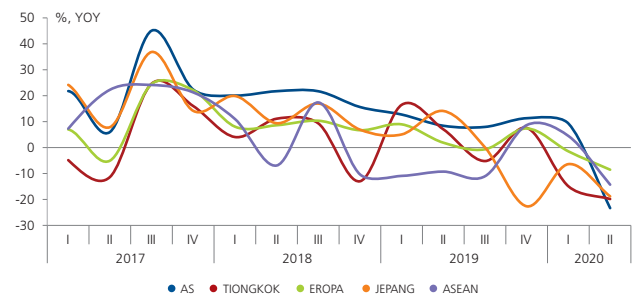
untuk negara kawasan Amerika Serikat (50,0%), Eropa (18,5%), Tiongkok (7,9%), dan Jepang (7,7%). Pada triwulan laporan, penurunan drastis ekspor komoditas ini terjadi beberapa negara seperti Eropa, Tiongkok, dan Jepang.

Dari total ekspor luar negeri, mitra dagang utama Jawa Tengah untuk ekspor nonmigas masih belum mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Meskipun begitu, terjadi penurunan pangsa ekspor pada negara dengan dampak COVID-19 yang tinggi seperti Amerika Serikat. Pangsa ekspor tujuan Amerika Serikat pada triwulan II 2020 sebesar 32,01%, turun dari pangsa pada triwulan I 2020 yang sebesar 36,23%. Tujuan ekspor utama lainnya yaitu Eropa memiliki pangsa sebesar 19,66% dan Jepang dengan pangsa sebesar 11,93%.



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.33 Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.34 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan

Ekspor nonmigas ke Amerika Serikat yang merupakan negara tujuan dengan pangsa terbesar mengalami penurunan paling signifikan pada triwulan laporan dengan tumbuh 23,35% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan I 2020 (9,25%; yoy). Pertumbuhan ekspor nonmigas Jawa Tengah ke Eropa dan Jepang juga menunjukkan pelemahan, yaitu masing-masing menjadi tumbuh -8,53% (yoy) dan -18,82% (yoy), lebih rendah dibanding -1,47% (yoy) dan -6,38% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

1.1.1.3.2 Impor Luar Negeri

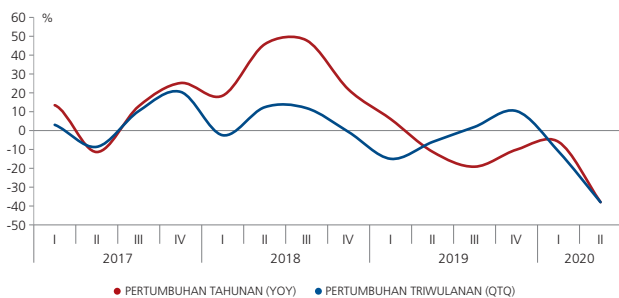
Sejalan dengan yang terjadi pada ekspor, kinerja impor luar negeri Jawa Tengah mengalami penurunan pada triwulan II 2020. Pada periode laporan, impor luar negeri Jawa Tengah tercatat tumbuh sebesar -37,93% (yoy), lebih dalam dari triwulan II 2020 yang tumbuh sebesar -5,99% (yoy). Dengan pertumbuhan negatif yang lebih dalam dibanding ekspor, defisit neraca perdagangan luar negeri Jawa Tengah menjadi menyempit dibanding periode-periode sebelumnya. Secara triwulanan, impor luar negeri mencatatkan pertumbuhan sebesar -37,94% (qtq), lebih rendah dari triwulan yang sama tahun 2019 yang tumbuh -6,01% (qtq).

Pada triwulan laporan, kinerja impor luar negeri didorong oleh pelemahan impor migas dan nomigas. Impor migas Jawa

Tengah pada triwulan laporan mencatatkan pangsa sebesar 23,54% dari total impor Jawa Tengah, sedangkan pangsa impor komoditas nonmigas yaitu 87,46%. Pangsa impor komoditas migas pada triwulan II 2020 menurun cukup signifikan yang disebabkan konsumsi bahan bakar domestik yang menurun akibat pembatasan sosial. Impor luar negeri Jawa Tengah untuk komoditas migas mengalami pertumbuhan negatif secara nominal pada triwulan II 2020. Pada periode laporan, impor migas tercatat tumbuh -77,88% (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 6,03% (yoy).

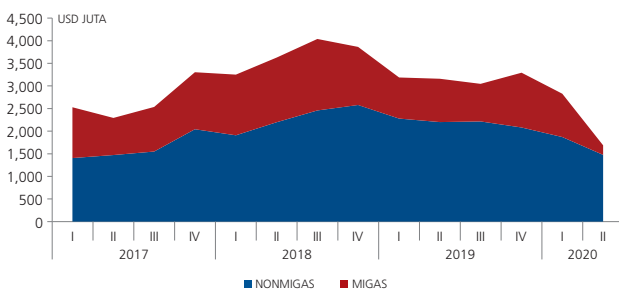
Harga minyak dunia menunjukkan tren semakin menurun pada triwulan II 2020. Rata-rata harga minyak WTI turun menjadi USD28,99 per barel, dibandingkan triwulan I 2020 yang sebesar USD45,97 per barel. Penurunan harga minyak di awal tahun disebabkan pandemi COVID-19 yang membuat banyak negara harus menerapkan lockdown dan pembatasan kegiatan di luar rumah. Selain itu, perang dagang antar negara penghasil minyak meningkatkan ketidakpastian di pasar komoditas.

Seperti halnya impor migas yang tumbuh negatif, pada triwulan laporan komoditas nonmigas mencatatkan penurunan tingkat pertumbuhan. Pada triwulan II 2020, impor nonmigas Jawa Tengah tercatat tumbuh -32,99% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 18,02% (yoy). Impor komoditas nonmigas Jawa Tengah dapat dikatakan cukup produktif. Impor tersebut utamanya ditujukan untuk kegiatan produktif, yaitu bahan baku dengan pangsa mencapai 68,84% dari total impor nonmigas Jawa Tengah, dan impor barang modal dengan pangsa 20,78%. Sementara itu, impor barang konsumsi memiliki pangsa 10,38%. Penurunan pangsa terjadi pada barang modal yang didorong menurunnya aktivitas investasi di Jawa Tengah.



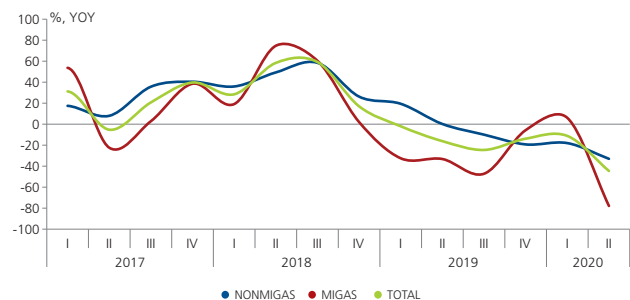
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.35 Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri



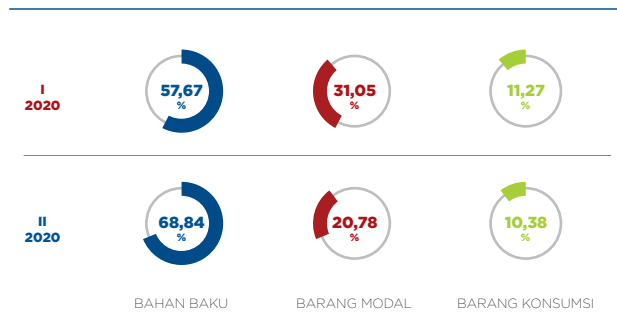
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.36 Perkembangan Impor Jawa Tengah



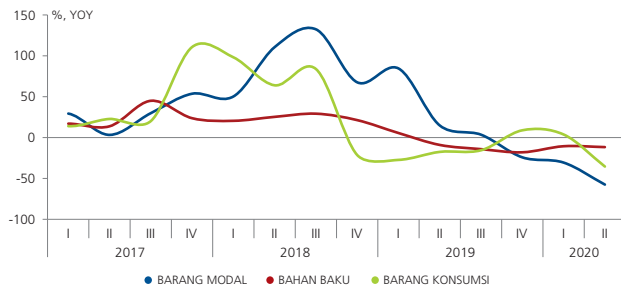
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.37 Pertumbuhan Impor Migas dan Nonmigas Jawa Tengah



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.38 Struktur Impor Nonmigas Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran



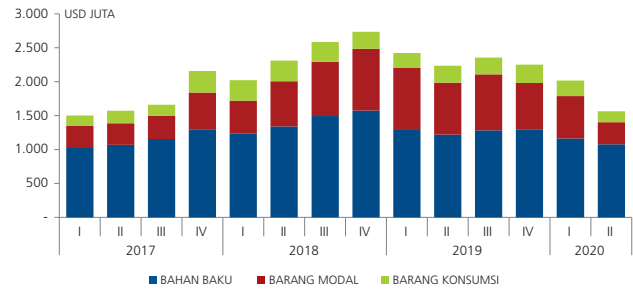
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.40 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan

Secara nilai, penurunan pertumbuhan impor nonmigas triwulan laporan terjadi pada seluruh komponen impor. Impor barang baku yang memiliki pangsa terbesar mencatatkan pertumbuhan sebesar -11,68% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang tumbuh -10,61% (yoy). Penurunan impor tersebut terutama dalam bentuk serat tekstil yang menjadi kebutuhan bahan baku industri TPT. Penurunan permintaan domestik dan luar negeri membuat industri TPT membatasi produksi.

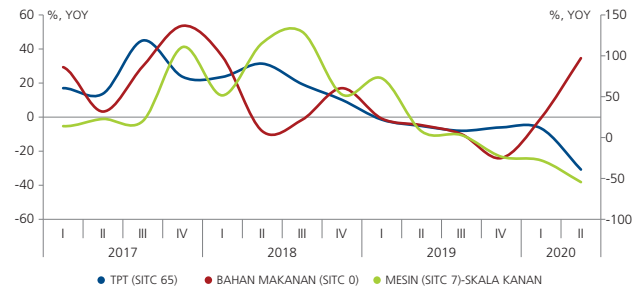
Sementara itu, penurunan impor barang modal dan konsumsi didorong perlambatan aktivitas investasi dan konsumsi rumah tangga akibat wabah COVID-19. Impor barang modal turun 57,52% (yoy), semakin dalam dari triwulan I 2020 yang sebesar -30,61% (yoy). Hal tersebut juga tercermin dari pelemahan impor komoditas mesin dan alat transportasi yang tumbuh -54,49% (yoy) pada periode laporan, turun dari triwulan I 2020 (-27,90%; yoy). Berdasarkan komoditas, perlambatan impor permesinan terutama berupa mesin industri dan perlengkapan, mesin listrik, dan mesin perkantoran termasuk pemrosesan data.

Selanjutnya, impor barang konsumsi yang memiliki pangsa terkecil terhadap total impor Jawa Tengah, tercatat mengalami pertumbuhan negatif. Pada triwulan laporan,



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.39 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran

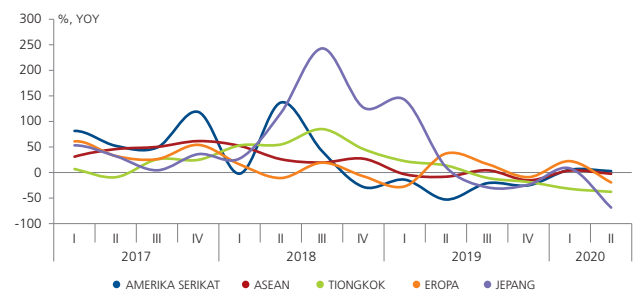


Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.41 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Komoditas

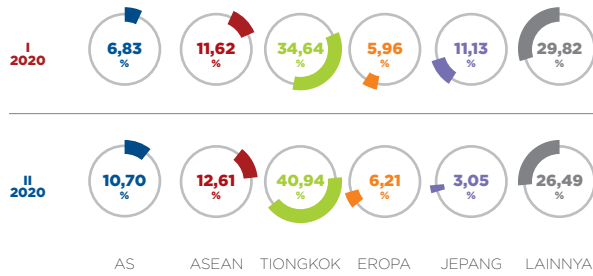
impor barang konsumsi tercatat tumbuh -35,43% (yoy), lebih rendah dari triwulan I 2020 yang tumbuh 3,75% (yoy). Perlambatan impor barang konsumsi utamanya dipengaruhi oleh penurunan impor makanan jadi dan suku cadang kendaraan. Namun, impor bahan makanan terutama gula mengalami peningkatan. Hal ini didorong terbatasnya produksi gula domestik di tengah aktivitas konsumsi pangan di dalam rumah yang meningkat.

Secara keseluruhan, impor nonmigas Jawa Tengah terutama berasal dari Tiongkok dengan pangsa 40,94% dimana angka tersebut meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 34,64%. Pembukaan kebijakan *lockdown*



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.42 Pertumbuhan Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

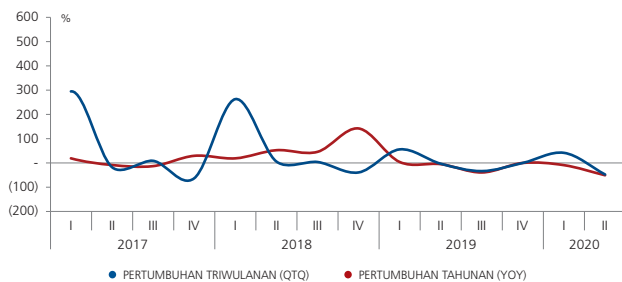
Grafik 1.43 Pangsa Negara Asal Impor Jawa Tengah

pemerintah Tiongkok lebih awal dibanding negara lainnya mendorong impor dari Tiongkok kembali meningkat. Sementara, impor dari negara mitra dagang lainnya adalah sebagai berikut ASEAN (12,61%), Amerika Serikat (10,70%), maupun Eropa (6,21%). Pada periode laporan, penurunan pertumbuhan impor luar negeri terutama bersumber dari Jepang yang turun hingga 68,61% (yoy). Sementara itu, impor negara mitra dagang dari Amerika Serikat masih tumbuh positif 2,73% (yoy), meski pertumbuhan tersebut lebih rendah dari triwulan sebelumnya.

1.1.1.4 Net Ekspor Antardaerah

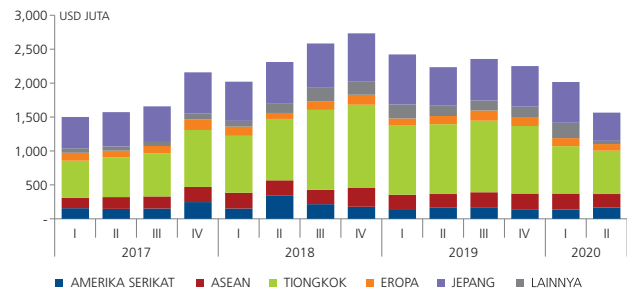
Pada triwulan laporan, pertumbuhan net ekspor antardaerah turun signifikan dengan tumbuh sebesar -50,96% (yoy), menurun dibanding triwulan I 2020 yang tumbuh -9,29% (yoy). Penurunan tersebut diindikasikan berasal dari perlambatan ekspor antardaerah yang lebih tinggi dibanding perlambatan impor antardaerah.

Sebagai salah satu daerah dengan produksi pertanian dan industri yang tinggi, Jawa Tengah menjadi sumber kebutuhan konsumsi maupun produksi di daerah lain. Namun, kondisi penyebaran COVID-19 dan penurunan produksi pertanian



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.45 Pertumbuhan PDRB Net Ekspor Antardaerah

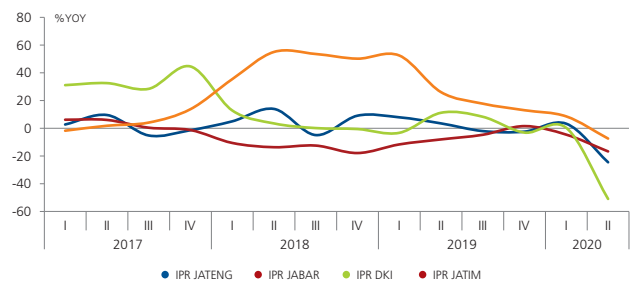


Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.44 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal

mempengaruhi kinerja ekspor antardaerah. Pembatasan sosial tidak hanya membatasi konsumsi masyarakat Indonesia namun juga produktivitas dalam bekerja. Hal ini tercermin dari lemahnya Indeks Penjualan Ritel (IPR) di daerah mitra dagang daerah Jawa Tengah yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. IPR Jawa Barat menurun dari -4,62% (yoy) menjadi -16,72% (yoy) sedangkan IPR Jawa Timur menurun dari 8,53% (yoy) menjadi -7,45% (yoy). Kedua provinsi tersebut merupakan daerah yang menerapkan kebijakan membatasi aktivitas sosial cukup ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sementara itu, daerah lain yang memiliki hubungan erat dengan Jawa Tengah yaitu DKI Jakarta, juga mengalami pelemahan konsumsi. IPR DKI Jakarta mengalami penurunan drastis di tengah wabah COVID-19 dari 0,25% (yoy) menjadi -50,99% (yoy) pada triwulan II 2020.

Sementara itu, impor antardaerah ke Jawa Tengah cenderung melemah karena aktivitas masyarakat yang terbatas. Tidak hanya aktivitas yang lebih banyak dilakukan di rumah, namun kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak menjadi dibatalkan seperti resepsi pernikahan, konser musik, maupun event kejuaran olahraga. Kebutuhan akan bahan makanan dan lainnya sangat tinggi pada kegiatan tersebut.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.46 Indeks Penjualan Ritel

1.1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

Perekonomian Jawa Tengah didominasi dari tiga lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan (35,17%); pertanian, kehutanan dan perikanan (15,55%); serta perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (12,83%). Komposisi ini tidak banyak mengalami perubahan dari periode sebelumnya.

Pandemi COVID-19 membuat hampir seluruh lapangan usaha di Jawa Tengah mengalami penurunan pertumbuhan.

Tercatat hanya lapangan usaha pertanian dan informasi dan komunikasi yang mengalami peningkatan pertumbuhan. Dua sektor dengan pangsa terbesar di Jawa Tengah yaitu industri pengolahan dan perdagangan menjadi pendorong utama pertumbuhan negatif Jawa Tengah di triwulan II 2020. Sementara, sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan negatif terdalam yang disebabkan pembatasan aktivitas transportasi baik darat, laut, maupun udara.

Tabel 1.5 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)

LAPANGAN USAHA	2018*	2019**				2019**	2020**	
		I	II	III	IV		I	II
A PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	178,359	45,904	47,057	51,293	39,999	184,253	45.948	50.495
B PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	32,321	8,270	8,548	8,352	8,557	33,728	8.677	7.928
C INDUSTRI PENGOLAHAN	436,477	112,495	116,613	119,520	120,364	468,992	118.156	114.226
D PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	1,225	312	313	325	344	1,294	323	306
E PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	744	190	196	195	210	791	210	213
F KONSTRUKSI	136,154	34,940	35,463	38,331	38,472	147,206	35.531	33.522
G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	172,954	44,919	47,087	47,900	47,275	187,181	46.638	41.668
H TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	39,593	10,417	11,030	11,043	11,380	43,869	10.907	4.091
I PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	39,507	10,414	10,849	11,018	11,388	43,670	10.993	8.665
J INFORMASI DAN KOMUNIKASI	43,964	11,997	12,293	12,470	12,827	49,587	13.412	14.631
K JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	37,488	9,636	9,542	9,898	10,331	39,406	10.592	9.605
L REAL ESTATE	21,450	5,582	5,721	5,789	5,829	22,920	5.825	5.594
M,N JASA PERUSAHAAN	5,022	1,355	1,439	1,458	1,461	5,712	1.471	1.215
O ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	34,653	8,519	9,320	9,041	9,557	36,436	8.789	8.907
P JASA PENDIDIKAN	57,041	14,686	15,490	16,070	16,693	62,940	15.918	15.787
Q JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	11,301	2,946	3,048	3,068	3,234	12,295	3.319	3.349
R,S,T,U JASA LAINNYA	20,201	5,318	5,596	5,635	5,627	22,177	5.613	4.575
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1,268,455	327,899	339,605	351,406	343,548	1,362,457	342.322	324.778

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 1.6 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)

LAPANGAN USAHA	2018*	2019**				2019**	2020**	
		I	II	III	IV		I	II
A PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	121.557	30.762	32.447	33.776	26.229	123.214	29.943	33.145
B PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	20.856	5.317	5.457	5.343	5.440	21.557	5.633	5.199
C INDUSTRI PENGOLAHAN	322.201	81.795	84.665	86.278	86.199	338.938	84.003	80.940
D PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	1.029	262	265	272	287	1.085	274	262
E PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	659	168	173	173	174	688	173	176
F KONSTRUKSI	98.394	24.594	24.899	26.864	26.906	103.262	24.860	23.442
G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	136.588	35.067	36.464	36.912	36.316	144.758	35.695	32.238
H TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	32.121	8.371	8.719	8.748	9.011	34.848	8.624	3.231
I PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	30.667	8.039	8.311	8.436	8.684	33.470	8.358	6.690
J INFORMASI DAN KOMUNIKASI	45.501	12.324	12.601	12.745	13.120	50.789	13.713	14.968
K JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	25.636	6.510	6.422	6.670	6.933	26.535	7.092	6.518
L REAL ESTATE	17.798	4.584	4.692	4.741	4.765	18.782	4.759	4.558
M,N JASA PERUSAHAAN	3.609	959	1.009	1.010	1.011	3.990	1.011	833
O ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	24.138	5.975	6.204	6.163	6.691	25.034	6.068	6.116
P JASA PENDIDIKAN	36.286	9.203	9.618	9.971	10.249	39.041	9.623	9.544
Q JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	8.188	2.122	2.167	2.175	2.274	8.738	2.291	2.321
R,S,T,U JASA LAINNYA	15.937	4.168	4.383	4.411	4.414	17.376	4.373	3.563
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	941.164	240.219	248.495	254.687	248.704	992.106	246.495	233.744

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 1.7 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ADHK menurut Lapangan Usaha (% , YOY)

LAPANGAN USAHA	2018*	2019**				2019**	2020**	
		I	II	III	IV		I	II
A PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	2,62	1,13	4,65	-1,55	1,56	1,36	-2,66	2,15
B PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	2,45	5,94	3,14	2,46	2,04	3,36	5,93	-4,74
C INDUSTRI PENGOLAHAN	4,35	4,16	4,53	6,78	5,28	5,19	2,70	-4,40
D PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	5,36	6,21	4,81	4,83	6,05	5,48	4,60	-1,29
E PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	4,88	2,61	5,35	4,68	5,01	4,42	3,04	1,34
F KONSTRUKSI	6,07	5,31	3,45	5,55	5,43	4,95	1,08	-5,85
G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	5,77	6,80	6,55	6,59	4,05	5,98	1,79	-11,59
H TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	7,55	9,92	8,32	8,27	7,56	8,49	3,03	-62,95
I PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	8,17	5,99	9,39	10,33	10,78	9,14	3,98	-19,51
J INFORMASI DAN KOMUNIKASI	12,39	12,15	12,41	11,52	10,49	11,62	11,27	18,79
K JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	3,58	2,64	0,18	4,47	6,70	3,51	8,93	1,50
L REAL ESTATE	5,58	4,27	6,26	6,22	5,38	5,53	3,82	-2,85
M,N JASA PERUSAHAAN	9,48	8,76	9,66	13,53	10,24	10,54	5,35	-17,47
O ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	3,58	2,98	4,68	4,16	3,07	3,71	1,55	-1,42
P JASA PENDIDIKAN	7,76	7,35	7,19	6,82	8,96	7,59	4,56	-0,76
Q JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	8,80	9,01	7,89	5,11	5,12	6,72	7,99	7,12
R,S,T,U JASA LAINNYA	9,45	9,68	9,99	9,32	7,19	9,02	4,93	-18,70
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,31	5,13	5,52	5,64	5,34	5,41	2,61	-5,94

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

1.1.2.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 2,15% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh -2,66% (yoy). Secara triwulanan, lapangan usaha ini tumbuh 10,69% (qtq), lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 4,65% (qtq).

Kinerja lapangan usaha pertanian yang tumbuh meningkat pada triwulan laporan didorong oleh kenaikan produksi pada subsektor tanaman pangan terutama komoditas padi. Berdasarkan hasil FGD, peningkatan pertumbuhan di triwulan II 2020 disebabkan oleh pergeseran musim tanam yang mengakibatkan puncak panen padi berada pada triwulan II 2020. Kondisi kemarau panjang di tahun 2019 menyebabkan proses tanam padi mengalami pergeseran untuk mencapai titik panen optimum. Tidak hanya padi, komoditas tanaman pangan lainnya seperti jagung dan kedelai juga mengalami peningkatan produksi selama triwulan II 2020. Selain dari

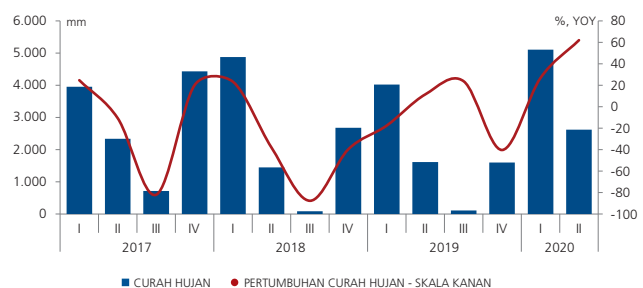
tanaman pangan, komoditas tebu yang juga menjadi andalan Jawa Tengah, mengalami musim panen yang berlangsung pada Juni 2020.

Berdasarkan *monitoring* BMKG selama triwulan II 2020, curah hujan di Jawa Tengah tercatat mengalami peningkatan yang signifikan dibanding triwulan sebelumnya. Curah hujan meningkat hingga 62,04%, lebih tinggi dari 26,91% pada triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut sangat optimal dalam mendukung masa tanam komoditas tanaman pangan. Meskipun demikian, curah hujan yang tinggi juga berpotensi menurunkan produksi tanaman bumbu-bumbuan di Jawa Tengah yang menjadi lumbung nasional.

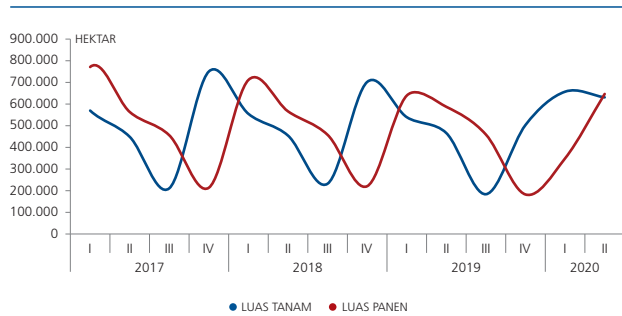
Pada triwulan laporan, hasil panen komoditas padi yang merupakan komoditas pertanian utama Jawa Tengah mengalami peningkatan. Luas panen padi pada triwulan II 2020 diperkirakan menjadi sekitar 646,5 ribu hektar, atau



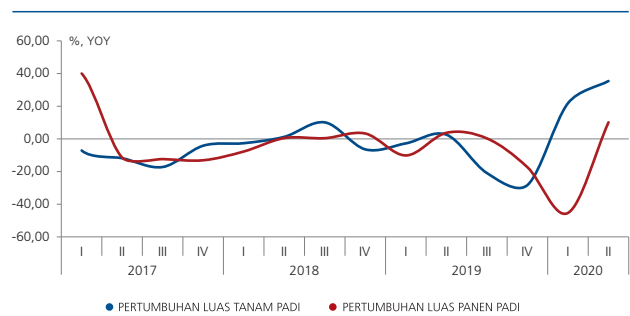
Grafik 1.47 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan



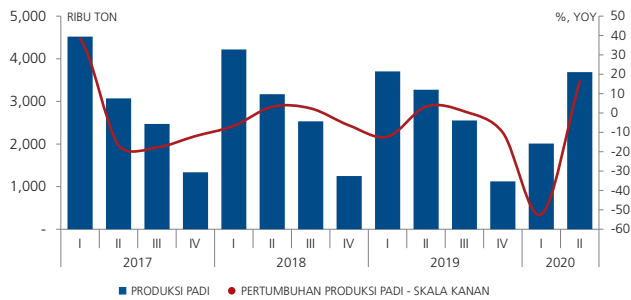
Grafik 1.48 Curah Hujan di Jawa Tengah



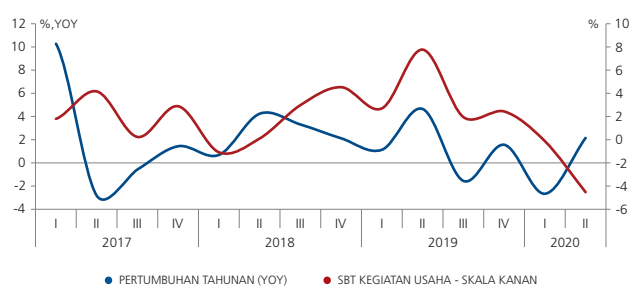
Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.49 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Padi di Jawa Tengah

Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.50 Pertumbuhan Luas Tanam dan Luas Panen Padi di Jawa Tengah

Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.51 Perkembangan Hasil Produksi Padi di Jawa Tengah

Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.52 Perkembangan SBT Realisasi Kegiatan Usaha (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Pertanian

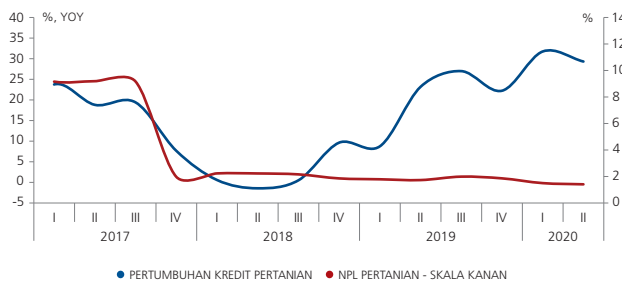
meningkat dari perkiraan luas panen triwulan yang sama tahun sebelumnya seluas 587,2 ribu hektar. Data perkiraan Dinas Pertanian menunjukkan peningkatan luas panen sebesar 10,12% (yoy). Peningkatan luas panen tersebut menyebabkan produksi padi selama triwulan II 2020 diperkirakan meningkat 16,31% (yoy). Angka produksi padi yang diperkirakan meningkat menjadi ±3,7 juta ton GKG, lebih tinggi dari triwulan II 2019 yang sekitar 3,3 juta ton GKG. Sejalan dengan peningkatan produksi padi, sejak Mei 2020 komoditas beras mencatatkan deflasi secara bulanan.

Meski produksi meningkat, aktivitas kegiatan usaha di lapangan usaha ini mengalami penurunan berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia. SBT di

sektor pertanian tercatat turun dari -0,12% pada triwulan I 2020 menjadi -4,52% pada periode laporan. Kondisi pembiayaan pada sektor ini juga mengalami perlambatan dimana kredit ke sektor pertanian Jawa Tengah tumbuh 29,31% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya (31,75%, yoy).

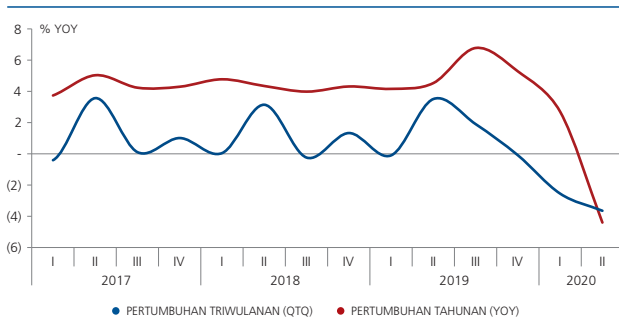
1.1.2.2 Industri Pengolahan

Sebagai lapangan usaha dengan pangsa terbesar, penurunan kinerja industri pengolahan menjadi penyebab utama penurunan kondisi ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II 2020. Akibat COVID-19, industri pengolahan harus mencatatkan pertumbuhan negatif pertama setidaknya dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Pada triwulan II 2020, industri pengolahan tercatat tumbuh negatif 4,40 (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 2,70% (yoy). Secara triwulanan, lapangan usaha ini tercatat mengalami pertumbuhan -3,65% (qtq), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada periode triwulan II 2019 sebesar 3,51% (qtq). Berdasarkan rilis BPS, penurunan kinerja industri pengolahan terjadi hampir di seluruh subkategori kecuali industri kimia, farmasi, dan obat tradisional.



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 1.53 Pertumbuhan dan NPL Kredit Pertanian

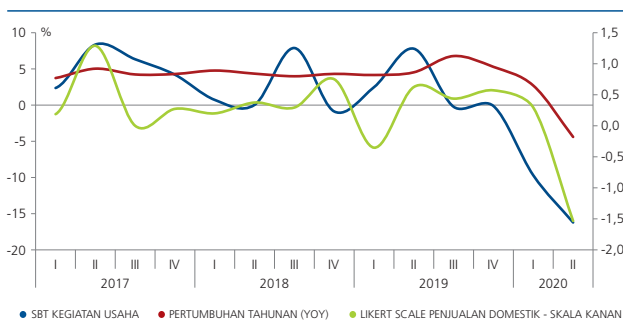


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.54 Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

Pembatasan aktivitas masyarakat tidak hanya menurunkan dari sisi permintaan produk industri, akan tetapi juga aktivitas produksi menjadi tidak optimal karena pembatasan jam kerja operasional dan ketatnya protokol kesehatan. Pada industri pengolahan nonmigas secara umum terpengaruh pelemahan permintaan domestik dan global. Laju konsumsi rumah tangga nasional tumbuh sebesar -5,51% (yoy) pada triwulan II 2020, jauh lebih rendah dibanding triwulan I 2020 (2,83%, yoy). Permintaan dari dalam provinsi sendiri ditengarai juga menunjukkan pelemahan. Hal tersebut diindikasikan oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga Jawa Tengah dari 3,46% (yoy) menjadi -4,16% (yoy) pada periode laporan. Pelemahan kinerja industri pengolahan nonmigas ini tidak sejalan dengan pola konsumsi hari besar keagamaan nasional, dimana permintaan barang dan jasa oleh masyarakat biasanya cenderung meningkat. Permintaan global akan produk nonmigas Jawa Tengah sebenarnya masih kuat, namun karantina yang dilakukan negara tujuan ekspor membuat produk ekspor tertunda pengirimannya. Hal ini tercermin dari pelemahan ekspor luar negeri nonmigas Jawa Tengah yang menurun hingga 21,7% (yoy).

Perkembangan industri pengolahan secara keseluruhan sejalan dengan hasil kegiatan liaison yang dilakukan Bank



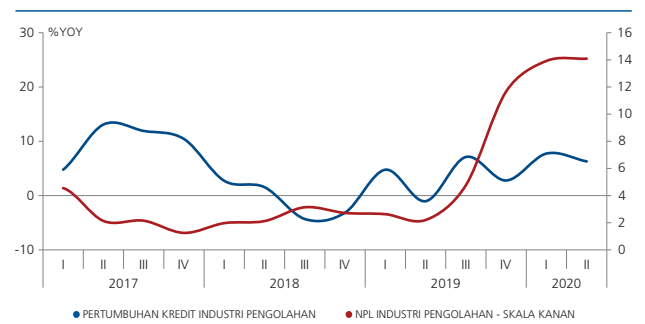
Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.55 SBT Kegiatan Usaha, Likert Scale Penjualan Domestik, dan Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

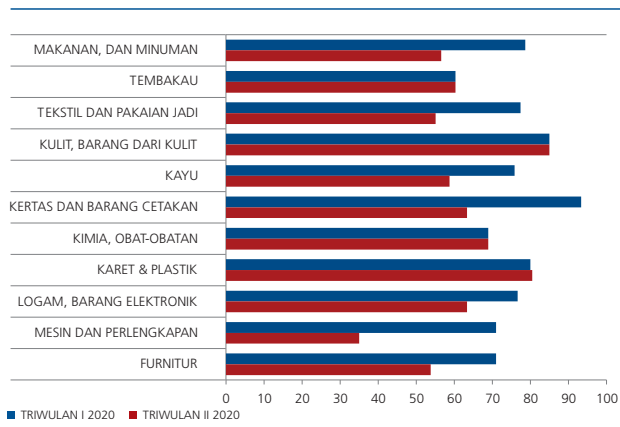
Indonesia, yang juga menunjukkan penurunan penjualan ekspor di sektor industri pengolahan. *Likert scale* penjualan ekspor industri pengolahan melambat dari 0,29 pada triwulan I 2020 menjadi -1,53 pada triwulan laporan. Penjualan domestik pun diindikasikan menurun dari LS yang sebesar -1,61 pada triwulan I 2020 dimana artinya penjualan industri pengolahan pada triwulan II 2020 tidak lebih baik dibanding triwulan yang sama tahun 2019. Seluruh subsektor pelaku usaha mengkonfirmasi terdapat penurunan. Produk industri dari sektor tekstil, pakaian jadi, kayu olahan, furnitur, dan mesin menyatakan penurunan penjualan.

Kinerja industri pengolahan juga terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia. Berdasarkan survei tersebut, terindikasi adanya penurunan SBT kegiatan usaha dari -9,70% menjadi -16,22% pada triwulan II 2020. Selain itu, kapasitas produksi terpakai industri pengolahan juga turun dari 73,30% pada triwulan I 2020 menjadi 58,72% pada triwulan laporan. Penurunan kapasitas produksi terpakai yang paling besar terjadi pada subsektor pengolahan tekstil dan pakaian jadi serta kertas dan barang cetakan. Lebih lanjut, indikator industri pengolahan nonmigas lainnya yaitu Prompt Manufacturing Index (PMI) yang dihasilkan dari SKDU menunjukkan penurunan yang cukup dalam menjadi 18,44%, dari triwulan I 2020 sebesar 43,72%. Penurunan tersebut terjadi pada seluruh komponen PMI yaitu penerimaan barang pesanan input, jumlah tenaga kerja, volume produksi, volume persediaan barang jadi, dan volume total pesanan. PMI dengan nilai di bawah 50% mengindikasikan kondisi industri pengolahan memasuki fase kontraksi sehingga produksi berpotensi mengalami pertumbuhan negatif.

Lemahnya kondisi industri pengolahan juga diindikasikan dari pembiayaan perbankan. Penyaluran kredit pada triwulan II



Grafik 1.56 Pertumbuhan Kredit Industri Pengolahan

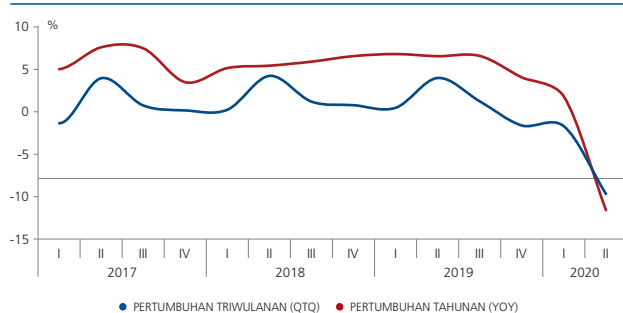


Grafik 1.57 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai Subsektor Industri Pengolahan (Hasil SKDU)

2020 tumbuh 6,29% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan I 2020 yang sebesar 7,74% (yoy). Pelaku usaha melihat kondisi triwulan II 2020 belum kondusif untuk mengembangkan usaha lebih lanjut dan menunggu hingga COVID-19 mereda. Selain itu, penurunan produksi menyebabkan kondisi keuangan korporasi menjadi menurun sehingga tingkat pengembalian terhadap kredit menurun dimana rasio *Non Performing Loan* (NPL) meningkat dari 13,92% menjadi 14,09%.

1.1.2.3 Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

Sejalan dengan kondisi perekonomian Jawa Tengah yang menurun, lapangan usaha perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor mencatatkan penurunan pertumbuhan menjadi **-11,53% (yoy)**, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2020 yang tumbuh 1,79% (yoy). Secara triwulanan, lapangan usaha ini tercatat tumbuh -9,68% (qtq), menurun dibanding pertumbuhan triwulan II 2019 yang sebesar 3,98% (qtq).



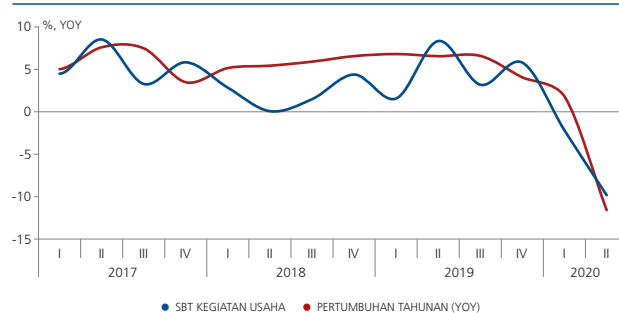
Grafik 1.58 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Selain lapangan usaha industri pengolahan yang terdampak besar dari COVID-19, kinerja lapangan usaha perdagangan juga mencatatkan penurunan di triwulan laporan. Produk hasil industri mengalami penurunan menjadikan lapangan usaha perdagangan tidak tumbuh sebagaimana historisnya yang tumbuh rata-rata 5,89% (yoy) dalam tiga tahun terakhir sebelum dilanda COVID-19. Penutupan pusat perbelanjaan yang tidak hanya terjadi di Jawa Tengah namun juga di daerah tujuan dagang seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, semakin menekan kinerja perdagangan. Pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah menyebabkan penjualan mengalami penurunan signifikan.

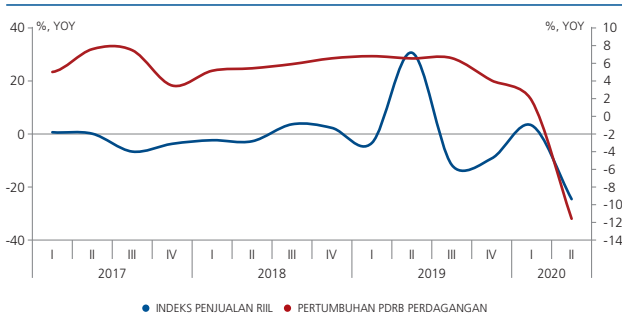
Kinerja lapangan usaha perdagangan yang menurun sejalan dengan penurunan pertumbuhan penyaluran kredit di lapangan usaha ini. Pada triwulan II 2020, penyaluran kredit perdagangan tercatat tumbuh -1,54% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan I 2020 sebesar 5,78% (yoy). Tingkat permintaan yang turun baik di tingkat domestik maupun global, menyebabkan pelaku usaha di bidang perdagangan menahan untuk melakukan kegiatan ekspansi usaha.

Hasil SKDU yang dilakukan Bank Indonesia juga mengindikasikan pelemahan kinerja perdagangan pada periode laporan. SBT kegiatan usaha sektor perdagangan menurun dari -2,20% pada triwulan I 2020 menjadi -9,82% pada triwulan II 2020. Perlambatan kinerja perdagangan juga terjadi pada perdagangan eceran. Hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia menunjukkan indeks penjualan riil menurun 24,6% (yoy) pada triwulan II 2020, lebih rendah dari 3,3% (yoy) pada triwulan lalu. Penurunan aktivitas belanja masyarakat terjadi meski terdapat hari besar keagamaan nasional untuk agama Nasrani dan Muslim.



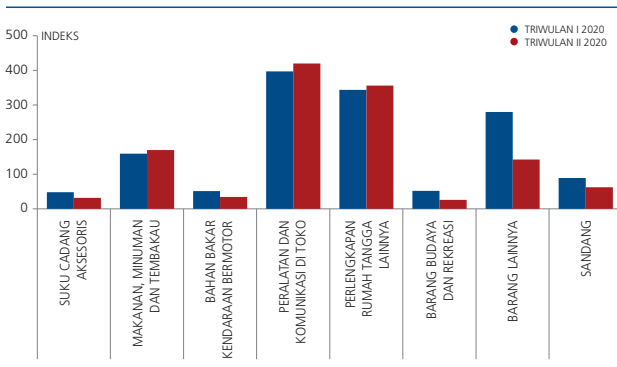
Grafik 1.59 SBT Kegiatan Usaha, Likert Scale Penjualan Domestik, Pertumbuhan PDRB Perdagangan

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Bank Indonesia, diolah



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Bank Indonesia, diolah

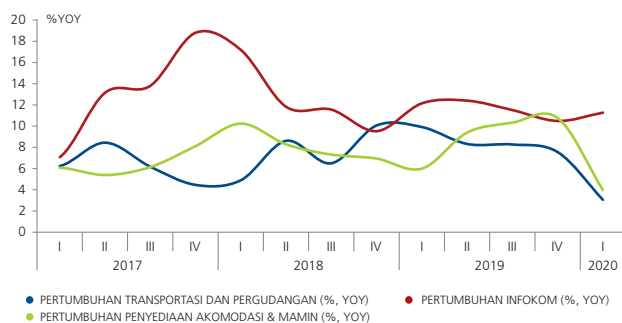
Grafik 1.60 Indeks Penjualan Riil (Hasil SPE) dan Pertumbuhan PDRB Perdagangan



Grafik 1.61 IPR Perdagangan Eceran berdasarkan Kelompok Komoditas

1.1.2.4 Lapangan Usaha Lainnya

Selain ketiga lapangan usaha utama Jawa Tengah yang telah dijelaskan sebelumnya, lapangan usaha lainnya turut mengalami penurunan kinerja pada triwulan laporan. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan negatif paling besar yaitu -62,95% pada triwulan II 2020. Penurunan kinerja pertumbuhan lapangan usaha ini sejalan dengan pembatasan aktivitas masyarakat. Perjalanan masyarakat dari dan ke luar Jawa Tengah terpaksa dibatalkan guna mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

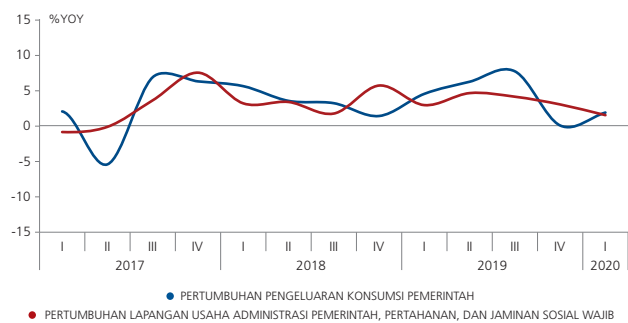
Grafik 1.62 Pertumbuhan PDRB Transportasi dan Pergudangan; serta Informasi dan Komunikasi

melakukan perjalanan termasuk kembali ke kampung halaman. Penurunan terdalam terjadi pada sektor transportasi udara dan kereta api yang merupakan angkutan massal.

Selain transportasi dan pergudangan, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman juga terdampak aktivitas masyarakat yang rendah. Lapangan usaha tersebut tumbuh -19,51% (yoy), padahal pada triwulan I 2020 masih tumbuh 3,98% (yoy). Tingkat hunian hotel di Jawa Tengah menurun drastis sejak pertengahan Maret 2020. Begitu juga dengan restoran yang minim pengunjung karena himbauan untuk tidak makan di tempat dipatuhi masyarakat.

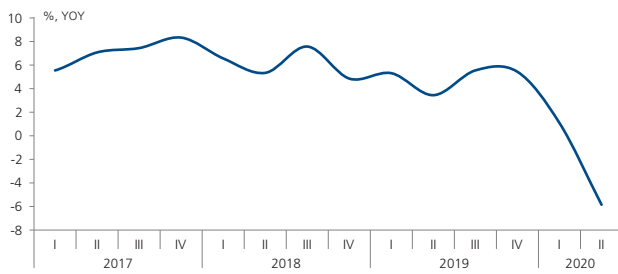
Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib turut terdampak wabah COVID-19. Pada triwulan II 2020 lapangan usaha ini tumbuh -9,42% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan I 2020 yang tumbuh 1,92% (yoy). Penurunan kinerja lapangan usaha ini disebabkan pelanggaran kebijakan pemerintah dalam hal layanan masyarakat seperti perpanjangan surat izin mengemudi dan pembayaran pajak kendaraan.

Lapangan usaha konstruksi yang merupakan lapangan usaha dengan pangsa terbesar keempat di Jawa Tengah juga mencatatkan penurunan kinerja pada triwulan II 2020. Pada periode laporan, lapangan usaha konstruksi tumbuh negatif 5,85% (yoy) pada triwulan II 2020, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,08% (yoy). Melambatnya kinerja konstruksi tercermin dari *likert scale* penjualan domestik yang sebesar -1,75 pada triwulan II 2020. Perlambatan pada triwulan laporan terutama dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas konstruksi bangunan proyek pemerintah yang ditunda hingga wabah COVID-19 mereda.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.63 Pertumbuhan PDRB Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Konsumsi Pemerintah



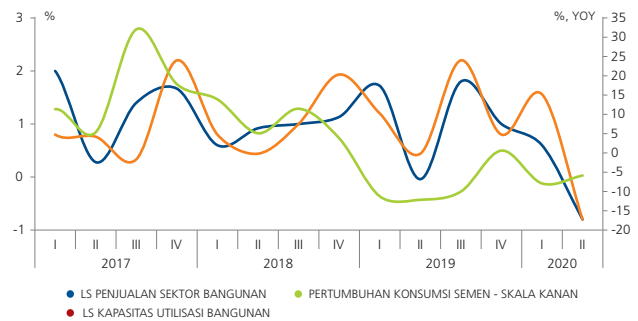
Grafik 1.64 Pertumbuhan PDRB Konstruksi

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Lapangan usaha informasi dan komunikasi menjadi sektor yang mengalami peningkatan pertumbuhan di tengah penyebaran COVID-19 yang semakin meluas. Pada triwulan II 2020 mengalami pertumbuhan 18,79% (yoy). Angka tersebut lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 11,27% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong tingginya aktivitas digital dari dalam tempat tinggal masyarakat. Kebutuhan akan hiburan hingga aktivitas belanja daring menjadikan pengeluaran untuk internet mengalami peningkatan yang pesat. Namun, mengingat pangsa ekonomi yang tidak terlalu besar, lapangan usaha informasi dan komunikasi hanya menyumbang 0,95% terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di triwulan II 2020. Selain itu, perkembangan teknologi yang diikuti dengan meningkatnya kesadaran teknologi masyarakat mendorong penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan usaha semakin masif dalam beberapa periode terakhir. Hal tersebut dapat terlihat dari maraknya perkembangan *e-commerce*, dan *start up company* yang berbasis teknologi informasi.

1.2 TRACKING PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL TRIWULAN III 2020

Perekonomian Jawa Tengah diperkirakan mengalami perbaikan pada triwulan III 2020. Dari sisi pengeluaran, perbaikan perekonomian triwulan III 2019 bersumber dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Pembatasan sosial mulai dilonggarkan sejak Juni 2020 sehingga aktivitas perekonomian mulai meningkat. Selain itu, bantuan sosial dari pemerintah juga dapat menopang konsumsi rumah tangga. Pada komponen investasi, peningkatan akan terjadi baik pada sektor pemerintah maupun swasta. Rencana investasi yang tertunda pada semester awal 2020 akan mulai direalisasikan pada semester akhir. Sementara, kinerja ekspor diperkirakan masih akan menurun mengingat adanya



Grafik 1.65 SBT Kegiatan Usaha, SBT Kegiatan Investasi Bangunan dan Pertumbuhan Konsumsi Semen

Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

peningkatan ekspor migas pada triwulan yang sama pada tahun 2019. Berdasarkan lapangan usaha, pelonggaran pembatasan sosial akan menyebabkan seluruh lapangan usaha bergerak ke arah positif. Sektor-sektor utama Jawa Tengah akan tumbuh lebih baik dari triwulan II 2020. Meskipun, pengurangan tenaga kerja tersebut akan menyebabkan peningkatan bersifat terbatas.

1.2.1 Tracking Perkembangan Ekonomi Triwulan III 2020 Sisi Pengeluaran

Pada triwulan III 2020, konsumsi rumah tangga dipengaruhi pelonggaran pembatasan aktivitas sosial sejak Juni 2020. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan mengalami perbaikan dibanding triwulan I 2020 meski belum signifikan. Dengan pangsa lebih dari 60%, perbaikan pada komponen pengeluaran tersebut akan mendorong pemulihan perekonomian Jawa Tengah ke depan.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh lebih baik pada triwulan III 2020. Permintaan domestik pada tahun 2020 diperkirakan akan mengalami perbaikan, seiring pembatasan sosial yang lebih longgar sehingga aktivitas perekonomian masyarakat lebih baik. Aktivitas masyarakat di pusat perbelanjaan kebutuhan pokok yang dicatat *Google Mobility Index* telah kembali ke *baseline*, bahkan sudah mengalami peningkatan di atas normal pada awal Agustus 2020. Adanya subsidi gaji bagi pekerja swasta juga mampu menopang konsumsi rumah tangga ke arah yang lebih tinggi.

Meskipun demikian, peningkatan konsumsi rumah tangga tertahan keyakinan konsumen yang belum membaik. Rendahnya keyakinan konsumen disebabkan wabah COVID-19 yang masih berada di sekitar masyarakat sehingga

keawatiran akan kesehatan masih tinggi. Berdasarkan hasil survei, konsumsi tertahan indeks keyakinan konsumen (IKK) Jawa Tengah pada bulan Agustus 2020 yang sebesar 84,14, atau lebih rendah dibanding 91,75 pada triwulan II 2020. Penurunan IKK tersebut terutama didorong kondisi yang dirasakan konsumen di triwulan III 2020 yang tidak lebih baik dibanding triwulan II 2020. Indeks ketersediaan lapangan kerja lebih rendah dibanding triwulan II 2020 yaitu sebesar 31,04. Optimisme perbaikan konsumsi rumah tangga dicerminkan indeks penghasilan yang meningkat menjadi 68,23. Pendapatan masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian juga mengalami penurunan.

Pada periode mendatang, konsumen optimis kondisi lebih baik dibanding triwulan II 2020. Indeks ekspektasi konsumen (IEK) berada pada level optimis pada Agustus 2020 yaitu 108,53. Konsumen optimis kondisi lapangan kerja dan penghasilan akan lebih baik ke depan pasca wabah COVID-19 berakhir dimana masing-masing indeksnya 103,9 dan 118,14. Begitu pula kondisi kegiatan usaha ke depannya yang berada di level optimis 103,55.

Perbaikan konsumsi rumah tangga juga ditunjukkan dari meningkatnya pertumbuhan kredit konsumsi. Kredit konsumsi tumbuh sebesar 3,00% (yoy) per Juli 2020 atau sedikit lebih baik dibanding triwulan II 2020 sebesar 2,99% (yoy). Peningkatan penyaluran kredit konsumen terjadi pada kredit multiguna (KMG) yang meningkat dari 6,70% (yoy) pada triwulan II 2020 menjadi 7,67% (yoy). Pelonggaran aktivitas dimanfaatkan konsumen untuk mulai meningkatkan konsumsi kebutuhan nonpangan seperti perlengkapan rumah tangga.

Pada sisi pemerintah, konsumsi diperkirakan mengalami peningkatan pada triwulan III 2020. Penanganan COVID-19 menjadi prioritas pemerintah saat ini. Tidak hanya penanganan di bidang kesehatan akan tetapi juga menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan sosial. Re-alokasi anggaran dilakukan untuk menyediakan pos anggaran khusus penanganan wabah COVID-19. Program jaring pengaman sosial (social safety net) Pemerintah Pusat disalurkan juga untuk wilayah Jawa Tengah berupa Program Keluarga Harapan (PKH) kepada keluarga penerima manfaat (KPM), subsidi gaji karyawan swasta, kartu sembako selama 9 bulan, kartu prakerja, bantuan biaya listrik selama 3 bulan, insentif perumahan, serta dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok.

Kinerja investasi diprediksi tumbuh lebih baik pada triwulan III 2020, seiring dengan dimulainya kembali pembangunan beberapa proyek strategis yang ada di Jawa Tengah. Proyek yang sempat tertunda antara lain tol Solo-Jogja yang memasuki tahap penerbitan Izin Penetapan Lokasi (IPL), KRL Solo-Jogja, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) oleh Akuo Energy, dan kawasan industri Batang. Pelaku usaha pun meyakini investasi akan membaik di triwulan III 2020 meski belum signifikan. Berdasarkan informasi kontak *liaison*, terdapat pelaku usaha bidang kimia berencana meningkatkan kapasitas produksi. Demikian pula dengan perusahaan tekstil asal Taiwan telah memulai pembangunan pabrik di Kawasan Industri Kendal. Hasil kegiatan *liaison* selama Juli-Agustus 2020 juga menunjukkan tendensi investasi yang meningkat dimana LS dari 0,26 menjadi 0,56. Peningkatan investasi pada triwulan III 2020 tercermin dari kredit investasi yang mengalami perbaikan dengan tumbuh 26,54% (yoy) pada Juli 2020, lebih tinggi dari triwulan II 2020 yang sebesar 25,64% (yoy).

Pertumbuhan ekspor luar negeri Jawa Tengah di triwulan III tahun 2020 diperkirakan melambat. Hilirisasi produk migas Jawa Tengah dengan orientasi ekspor pada September 2020, masih akan memberi dampak terhadap pertumbuhan agregat ekspor luar negeri Jawa Tengah. Hasil kegiatan *liaison* menunjukkan penurunan ekspor masih terjadi pada Juli-Agustus 2020 disebabkan masih minimnya permintaan pada negara Asia dan Eropa. Namun, ekspor luar negeri nonmigas diharapkan mengalami perbaikan pada periode ini, jika melihat perekonomian global yang membaik. Purchasing Manager Index (PMI) sektor Manufaktur yang memasuki fase ekspansif dalam pada Juli 2020 dibanding triwulan II 2020 pada negara-negara tujuan ekspor dari Jawa Tengah seperti Eropa (51,8) dan AS (50,9). Fase ekspansi pada kedua tujuan ekspor Jawa Tengah tersebut diperkirakan masih berlanjut pada Agustus 2020.

Impor luar negeri akan meningkat pada triwulan III 2020. Kondisi negara Tiongkok sebagai sumber impor utama telah pulih dalam hal aktivitas perekonomian. Apabila dilakukan pengamatan pada indikator PMI manufaktur yang berada pada level 52,8, semakin meyakinkan bahwa produksi Tiongkok telah kembali normal. Bahkan, rilis pertumbuhan ekonomi Tiongkok triwulan II 2020 lebih baik dari triwulan I 2020 yaitu sebesar 3,2% (yoy). Kondisi ini akan meningkatkan aktivitas impor bahan baku industri di Jawa

Tengah. Selain faktor Tiongkok, kondisi domestik juga telah membaik sehingga komponen impor lain seperti barang modal dan konsumsi dapat meningkat seiring peningkatan aktivitas perekonomian.

1.2.2 **Tracking Perkembangan Ekonomi Triwulan III 2020 Sisi Lapangan Usaha**

Dari sisi lapangan usaha, peningkatan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III 2020 diperkirakan berasal dari lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta konstruksi. Kinerja industri pengolahan memiliki pangsa terbesar, yaitu lebih dari 30%, diperkirakan mulai pulih pada triwulan III 2020, karena telah melewati puncak dampak COVID-19 yang terjadi pada periode sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja lapangan usaha perdagangan diperkirakan turut meningkat. Lapangan usaha konstruksi diperkirakan akan semakin aktif dalam meningkatkan pembangunan di Jawa Tengah.

Kinerja lapangan usaha industri pengolahan pada triwulan III 2020 diperkirakan mengalami perbaikan. Kondisi permintaan domestik dan global yang membaik ini akan dimanfaatkan oleh para pelaku industri untuk meningkatkan kapasitas utilisasi. Pelonggaran pembatasan sosial juga memberi ruang yang lebih besar bagi para tenaga kerja untuk lebih produktif. Kondisi keuangan yang terganggu akibat minimnya penjualan di triwulan II 2020, diharapkan tidak memburuk dengan adanya kebijakan stimulus dari pemerintah.

Hasil SKDU Bank Indonesia menunjukkan bahwa pelaku usaha memperkirakan kegiatan usaha di lapangan usaha industri pengolahan akan lebih baik pada triwulan III 2020. Hal ini tercermin dari perkiraan *Prompt Manufacturing Index* (PMI) hasil SKDU menunjukkan usaha sektor industri pengolahan pada triwulan III 2020 diperkirakan berada pada level 31,09 atau lebih baik dibanding triwulan II 2020.

Sejalan dengan kinerja industri pengolahan, pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor diproyeksikan mengalami peningkatan pada triwulan III 2020. Peningkatan tersebut didorong oleh pelonggaran pembatasan sosial sehingga aktivitas konsumsi masyarakat mengalami peningkatan. Pergerakan masyarakat pada pusat

perbelanjaan kebutuhan pokok meningkat hingga Agustus 2020 dan mendekati kondisi normal. Selain itu, masyarakat mulai terbiasa meningkatkan aktivitas belanja secara daring yang lebih mudah dan cepat dimana berbagai pelaku usaha telah menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari aktivitas pemasaran.

Selanjutnya, pertumbuhan lapangan usaha pertanian diprediksi mengalami peningkatan pada triwulan III 2020, seiring kondisi iklim yang mendukung produksi. Beberapa komoditas akan mengalami masa panen di triwulan III 2020 seperti padi dan hortikultura serta tebu. Berdasarkan hasil liaison, produksi padi cenderung stabil dibandingkan periode yang sama tahun lalu, didukung oleh ketersediaan air yang cukup serta relatif terkendalinya hama dan penyakit tanaman. Hasil SKDU menunjukkan terdapat perbaikan dunia usaha sektor pertanian dari -4,52% pada triwulan II 2020 menjadi 3,59% pada triwulan III 2020. Selain itu, program bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah juga mampu mendorong penyerapan produk hasil pertanian.

STUDI KASUS:

SUPLEMEN I

PERLAMBATAN PEREKONOMIAN AKIBAT PANDEMI COVID-19***Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian.***

Pandemi virus corona Covid-19 berawal di Tiongkok pada Desember 2019 yang selanjutnya menyebar ke seluruh dunia, berdampak signifikan terhadap aspek sosial ekonomi manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada masa modern ini, perekonomian global sangat terhubung satu dengan yang lainnya, sehingga gejala yang berlangsung di satu negara akan mempengaruhi kinerja di negara lainnya.

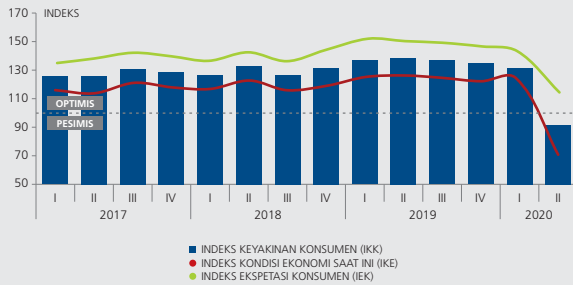
Dampak paling awal gejala tersebut berlangsung pada komponen ekspor-impor Indonesia yang sangat erat kaitannya dengan perdagangan internasional di kawasan Asia Pasifik. Pada awal periode penyebaran Covid-19, gangguan rantai perdagangan barang di kawasan Asia Pasifik belum berdampak signifikan dikarenakan tindakan para pelaku industri yang telah meningkatkan stok persediaan barang dalam mengantisipasi periode libur Tahun Baru China yang berlangsung di akhir Januari 2020. Namun demikian, pasca penetapan karantina wilayah di Tiongkok pada 23 Januari 2020, terjadi kemacetan dan penumpukan (*bottleneck*) perdagangan barang di pelabuhan perdagangan utama Tiongkok khususnya pelabuhan Guangzhou dan pelabuhan pelabuhan Shenzhen (sumber: Bloomberg). Kemacetan perdagangan barang tersebut selanjutnya berdampak pada penumpukan di pelabuhan-pelabuhan transit utama, khususnya barang-barang produk ekspor serta bahan baku dan setengah jadi yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di Indonesia. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) serta Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan bahwa sepanjang Februari-April 2020 mengalami keterlambatan transportasi barang-barang dengan rentang waktu 4-8 minggu.

Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya terbatas pada penundaan aliran rantai perdagangan barang ekspor-impor, namun berlanjut pada penurunan penjualan produk ekspor Indonesia. Asosiasi Pengusaha Indonesia

(APINDO) menyatakan bahwa terjadi peningkatan tren pembatalan pemesanan produk ekspor untuk penjualan 6-12 bulan ke depan, khususnya pada produk-produk tekstil serta produk makanan minuman. Pembatalan tersebut bersumber hampir dari seluruh mitra perdagangan Indonesia negara, khususnya Tiongkok, Jepang, serta Eropa Barat. Penurunan penjualan ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh para pelaku industri dengan menurunkan tingkat utilisasi produksinya sebesar 50-90% yang diperkirakan akan berlangsung selama periode Maret-Juni 2020. Data terbaru Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa hingga periode April 2020, sebanyak 101 perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 4.100 pekerja dan merumahkan 67.400 pekerja dengan fasilitas upah parsial maupun peniadaan upah sepenuhnya. Hal ini juga tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang menunjukkan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha pada triwulan I-2020 menurun signifikan dibanding rerata historisnya. Penurunan ini terutama berlangsung pada lapangan usaha Industri Pengolahan serta lapangan usaha Perdagangan, Hotel dan Restoran.

Para pelaku usaha industri pengolahan serta industri hotel dan restoran memperkirakan tidak akan mampu bertahan dan menyatakan kebangkrutan, apabila kondisi berlanjut hingga triwulan IV 2020. Tingkat kegagalan pembayaran hutang juga meningkat, khususnya pada kredit modal kerja perbankan yang disalurkan kepada lapangan usaha industri pengolahan. Data perbankan di Jawa Tengah juga menunjukkan peningkatan rasio *non-performing loan* (NPL) yang drastis pada kredit lapangan usaha industri pengolahan pada periode April 2020, atau yang tertinggi sejak periode krisis moneter tahun 1998.

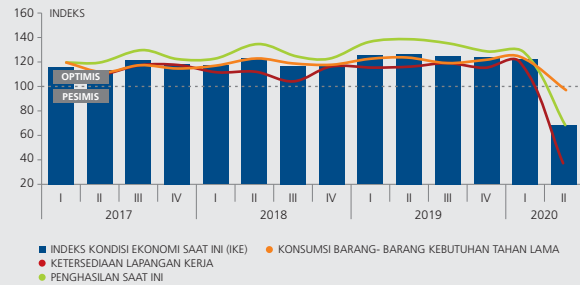
SUPLEMEN I



Grafik 1. Indeks Keyakinan Konsumen di Jawa Tengah

Transmisi selanjutnya dari dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia berlangsung di komponen ekspor jasa, khususnya sektor pariwisata. Pasca penetapan karantina wilayah di Tiongkok pada Januari 2020, beberapa negara menetapkan travel warning kepada warganya sehingga terjadi penurunan yang signifikan pada kunjungan wisatawan asing ke destinasi wisata utama di Indonesia. Informasi yang disediakan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) serta Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) menunjukkan bahwa terjadi pembatalan pemesanan akomodasi dan perjalanan wisata hingga 90% untuk periode 2020-2021. Komponen ekspor jasa dari pekerja migran Indonesia (PMI) juga diperkirakan akan mengalami penurunan, tercermin dari tingkat keputungan PMI sebesar 13% dari total 270 ribu PMI di seluruh dunia pada periode Februari-Maret 2020.

Konsensus para ahli ekonomi dan sosiologi menyatakan bahwa dampak terbesar yang akan dialami Indonesia diperkirakan akan berlangsung pada komponen konsumsi rumah tangga. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa faktor kebijakan penetapan karantina wilayah yang berdampak pada penghentian sebagian kegiatan usaha, sehingga masyarakat (konsumen) juga cenderung mengambil perilaku berhati-hati (*wait and see*) dan mengurangi kegiatan konsumsi non primer, seperti konsumsi hiburan,



Grafik 2. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini

peralatan rumah tangga, dan pendidikan. Hal ini juga tercermin hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi 3-6 bulan ke depan juga mengalami penurunan, dengan mencatatkan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) terendah sejak periode krisis finansial global tahun 2008. Penurunan ekspektasi konsumen ini khususnya berlangsung pada komponen ekspektasi perkiraan penghasilan dan konsumsi barang-barang tahan lama.

Kebijakan Penyelamatan Ekonomi Nasional

Pemerintah telah berusaha mengantisipasi gejala tersebut, dengan mengeluarkan kebijakan fiskal insentif untuk membantu baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 sebagai payung hukum untuk mengambil langkah-langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi untuk menghadapi Pandemi Covid-19. Pokok-pokok pengaturan yang tercantum dalam Perppu tersebut meliputi:

1. Kebijakan Keuangan Negara

- Penyesuaian batasan defisit APBN
- Penggunaan sumber pendanaan alternatif anggaran
- Penyesuaian *mandatory spending*, pergeseran dan *refocusing* anggaran pusat dan daerah

SUPLEMEN I

- Program penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman dalam rangka pembiayaan tambahan defisit
- Insentif dan fasilitas perpajakan
- Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk kesinambungan sektor riil dan sektor keuangan.
- Perluasan kewenangan Bank Indonesia, termasuk membeli Surat Berharga Negara jangka panjang di pasar perdana untuk mendukung penanganan Covid-19
- Penguatan kewenangan OJK dan LPS untuk mencegah risiko yang membahayakan stabilitas sistem keuangan serta perlindungan nasabah perbankan
- Penguatan kewenangan Pemerintah dalam menangani permasalahan stabilitas sistem keuangan akibat dampak Covid-19.

2. Kebijakan Sektor Keuangan

- Perluasan kewenangan dan ruang lingkup rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan

		
<ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan pemberian Pinjaman/Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek (LJPP) kepada bank sistem maupun bank selain bank sistem. • Kewenangan pemberian Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) kepada bank sistem berdasarkan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). • Kewenangan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar perdana, untuk mendukung pendanaan bagi pemerintah. • Kewenangan pembelian (repo) surat berharga negara yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). • Kewenangan pembelian (repo) Surat Berharga Negara (SBN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dimiliki swasta atau korporasi. • Kewenangan mengatur kewajiban penemiraan dan penggunaan devisa bagi penduduk, termasuk penyerahan, repatrasi, dan konversi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan untuk memerintahkan penggabungan, pengambilalihan, konversi kepada lembaga jasa keuangan. • Kewenangan untuk mengecualikan keterbukaan informasi bagi pihak tertentu di bidang pasar modal dalam rangka penanganan krisis sistem keuangan. • Kewenangan untuk mewajibkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat lainnya oleh pelaku industri jasa keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan pengembalian keputusan penyelamatan bank selain bank sistemik, mempertimbangkan dampak perekonomian, kompleksitas permasalahan, ketersediaan investor, dan lain-lain. • Kewenangan menyusun kebijakan program penjamin yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah, diluar program penjaminan simpanan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga penjamin Simpanan. • Kewenangan menghimpun sumber dana apabila kesulitan likuiditas dalam penanganan bank gagal, melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Penjualan surat berharga negara kepada Bank Indonesia melalui mekanisme repo; - Penerbitan surat utang; - Peminjaman kepada Pemerintah; - Peminjaman kepada pihak lain.

SUPLEMEN I

Pada tahap selanjutnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan kebijakan stimulus fiskal untuk meningkatkan ketahanan pelaku usaha maupun konsumen melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020 yang telah berlaku sejak 27 April 2020, yang meliputi:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah bagi pelaku usaha yang termasuk dalam 1.062 jenis Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), Wajib Pajak yang memiliki fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), serta Wajib Pajak yang berada dalam Kawasan Berikat.
2. Pajak Penghasilan Final ditanggung Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun.
3. Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 bagi pelaku usaha impor yang termasuk dalam 431 jenis Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), Wajib Pajak yang memiliki fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), serta Wajib Pajak yang berada dalam Kawasan Berikat.
4. Pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Usaha, bagi jenis usaha yang termasuk dalam 846 jenis Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), Wajib Pajak yang memiliki fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), serta Wajib Pajak yang berada dalam Kawasan Berikat.
5. Akselerasi pengembalian/restitusi pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai bagi pelaku usaha yang termasuk dalam 431 jenis Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), Wajib Pajak yang memiliki fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), serta Wajib Pajak yang berada dalam Kawasan Berikat.

Kebijakan insentif perpajakan yang ditujukan kepada para pelaku usaha, khususnya bagi sektor manufaktur tertentu diharapkan dapat meningkatkan ketahanan manufaktur dari risiko kebangkrutan.

Tabel 2. Kebijakan Stimulus Fiskal Nasional.

Insentif	Plafon Anggaran	Jumlah Wajib Pajak
Relaksasi PPh 21	Rp25,6 T	43.775
Relaksasi PPh 25 Badan	Rp14,4 T	8.901
Relaksasi PPh 22 Impor	Rp14,7 T	2.886
Relaksasi Restitusi Ppn	Rp5,8 T	720

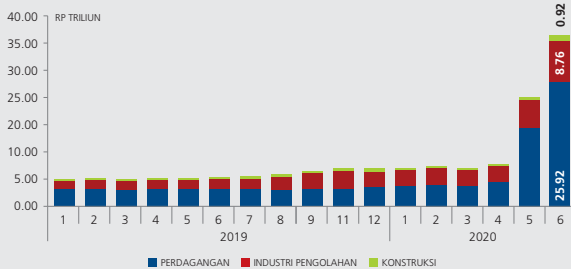
Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Pemerintah juga telah menerbitkan Surat Edaran Menperin No. 4/2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 bagi kawasan industri. Hal ini menjadi hal yang tidak terpisah dari kebijakan Pemerintah dalam merelaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara bertahap, agar kegiatan produksi dapat kembali pulih, tanpa mengorbankan risiko kesehatan.

Perkembangan penyebaran Covid-19 berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur baik pada korporasi besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical*. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:

- 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/ pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar.
- 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya Peraturan tersebut. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

SUPLEMEN I



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3. Perkembangan Nilai Restrukturisasi Kredit Modal Kerja yang disalurkan di Jawa Tengah.

Bauran kebijakan Pemerintah dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk merelaksasi restrukturisasi kredit dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 telah dimanfaatkan oleh debitur di Jawa Tengah, tercermin pada meningkatnya restruksasi kredit secara signifikan sejak April 2020.

Selanjutnya, Pemerintah juga meningkatkan dan memperluas stimulus jaring pengaman sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini bertujuan untuk menjaga ketahanan keluarga pra sejahtera yang sangat terdampak pada pembatasan aktivitas ekonomi non-formal.

Penyaluran bantuan jaring pengaman sosial tersebut terdiri dari bantuan sosial reguler seperti Program Sembako bagi 20 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM, serta program khusus tambahan yaitu Program Subsidi Listrik untuk 31,4 juta konsumen listrik rumah tangga. Program Sembako tersebut akan disalurkan dalam bentuk paket sembako sebanyak 1,9 juta KPM yang berada di wilayah Jabotabek, sementara 9 juta KPM yang berada di luar Jabotabek akan menerima Bantuan Sosial Tunai. Bantuan paket sembako yang diberikan kepada keluarga pra-sejahtera dan keluarga rentan pra-sejahtera, diberikan setiap 2 minggu sepanjang periode April-Juni 2020, yang terdiri dari paket beras dan aneka ragam sembako (minyak goreng,

mie instan, susu, sabun, dan lain-lain) secara bergantian dengan nilai setara Rp300.000 per bulan.

Dalam hal pemberian bantuan, Pemerintah Pusat sangat mengharapkan dukungan yang optimal dari Pemerintah Daerah, agar data yang diajukan oleh Pemerintah Daerah diharapkan tepat sasaran dan tepat waktu. Dari sebanyak 9 juta KPM yang berada di luar Jabotabek, penyaluran bantuan hingga Juni 2020 baru terealisasi sebesar 5,34 juta KPM, dengan 801 ribu di antaranya disalurkan melalui perbankan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta PT Pos Indonesia.

Sinergi dari Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat memiliki data keluarga pra-sejahtera dan keluarga rentan yang akurat serta up-to-date. Pemerintah dapat memperbaiki data tersebut dengan melibatkan agen pendamping Program Keluarga Harapan, pendamping desa, tenaga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan lain-lain. Undang-Undang No.23 tahun 2014 telah mengatur pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah dalam pengelolaan data tingkat kesejahteraan sosial, dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang sosial, bertanggung jawab dalam melakukan pendataan dan pengelolaan data keluarga rentan miskin.

Outlook Pengelolaan Keuangan Negara

Kebijakan penyesuaian perekonomian dalam kondisi kedaruratan Covid-19 tersebut tentunya berdampak pada perubahan yang drastis dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah telah melakukan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dengan mengurangi belanja Kementerian dan Lembaga serta Transfer Daerah & Dana Desa (TKDD) hingga mencapai Rp190 triliun. Pengurangan terbesar khususnya berlangsung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik hingga mencapai 25% dari rencana APBN 2020, dengan pengecualian pada bidang Pendidikan dan Kesehatan.

SUPLEMEN I

Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa hingga akhir tahun 2020, pendapatan negara diperkirakan akan turun sebesar 10% dari realisasi pada tahun fiskal 2019 atau hanya setara dari 78,9% dari target APBN 2020. Penerimaan perpajakan diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 5,4% dari sisi nominal, yang utamanya disebabkan oleh penurunan penerimaan Pajak Penghasilan baik dari perseorangan maupun Badan. Pendapatan Bea dan Cukai diperkirakan juga akan mengalami kontraksi 2,2%, sebagai dampak dari stimulus pembebasan bea masuk bagi 19 jenis industri yang dibantu. Selanjutnya Penerimaan Negara Bukan Pajak juga akan mengalami kontraksi hingga mencapai 26% sebagai dampak turunnya penerimaan sektor migas karena lesunya permintaan energi global pada masa pandemi Covid-19.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah memperkirakan rasio defisit anggaran mencapai 5,07% dari PDB, meningkat drastis dari sebelumnya 1,76 dari rencana awal APBN 2020. Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut Pemerintah akan memenuhi kekurangan pembiayaan yang mencapai Rp654,5 triliun, melalui beberapa instrumen, antara lain (i) penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), baik di pasar domestik maupun global, atau (2) penarikan pinjaman, dari lembaga multilateral dan bilateral.



KEUANGAN PEMERINTAH

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang mulai masuk di Indonesia sejak pertengahan Maret 2020.

- Anggaran pendapatan pada APBD-P Pemprov. Jawa Tengah menurun 8,37% dibandingkan sebelumnya. Seiring dengan itu anggaran belanja juga menurun sebesar 8,14% dibandingkan anggaran APBD sebelumnya.
- Realisasi pendapatan daerah pada triwulan laporan sebesar 35,97%, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 48,17%.
- Realisasi belanja daerah pada triwulan laporan sebesar 27,13% dari pagu anggaran perubahan tahun 2020. Realisasi tersebut lebih rendah daripada realisasi pada tahun 2019 yang mencapai 33,36%.



2.1. GAMBARAN UMUM APBD 2019

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami perubahan. Adanya perubahan tersebut didorong oleh kebijakan rasionalisasi dan *refocussing* anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Secara umum anggaran pendapatan dan anggaran belanja mengalami penurunan pada beberapa pos belanja dibandingkan dengan APBD sebelum perubahan. Anggaran Pendapatan mengalami penurunan sebesar 8,37%. Sementara itu, anggaran belanja juga mengalami penurunan sebesar 8,14%. Penurunan anggaran pendapatan utamanya bersumber dari pengurangan anggaran pendapatan asli daerah sebesar 12,43%. Komponen yang mengalami pengurangan yang signifikan adalah target penerimaan retribusi daerah sebesar 25,93%, pengurangan target penerima pajak daerah sebesar 10,66%. Pengurangan target anggaran pada dua komponen utama pendapatan asli daerah tersebut merupakan bentuk rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai dampak pandemi COVID-19. Lebih lanjut anggaran penerimaan dari dana perimbangan juga mengalami penurunan sebesar

3,05%, angka tersebut lebih kecil daripada penurunan anggaran pendapatan asli daerah. Komponen dana perimbangan yang mengalami penurunan paling besar adalah dana alokasi umum yang menurun sebesar 9,68% atau secara nominal sebesar Rp371 miliar.

Belanja daerah dianggarkan menurun 8,14% menjadi sebesar Rp26,1 triliun pada anggaran perubahan tahun 2020. Penurunan anggaran belanja daerah tersebut utamanya bersumber dari pengurangan alokasi anggaran untuk belanja modal sebesar 45,05% atau secara nominal Rp815 miliar. Kemudian pengurangan alokasi anggaran belanja yang cukup besar juga dilakukan terhadap belanja barang dan jasa sebesar 17,99% atau secara nominal sebesar Rp835 miliar. Pengurangan pada dua komponen belanja ini merupakan bentuk *refocussing* anggaran yang kemudian akan dialokasikan pada belanja tidak terduga untuk penanggulangan dampak pandemi COVID-19.

2.2. REALISASI APBD TRIWULAN II 2020

Realisasi anggaran pendapatan di Jawa Tengah tercatat sebesar Rp9,3 triliun atau pencapaian terhadap anggaran sebesar 35,97%. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 48,17%. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat Rp7,2 Triliun atau baru terealisasi sebesar 27,13% dari total belanja daerah pada tahun 2020. Realisasi pendapatan tersebut tidak lebih baik daripada rata-rata realisasi pendapatan daerah pada triwulan II selama 5 tahun terakhir yang berada pada angka 48,03%. Sementara itu, penyerapan realisasi belanja justru lebih baik daripada rata-rata realisasi belanja daerah pada triwulan II dalam 5 tahun terakhir yang hanya 26,01%.

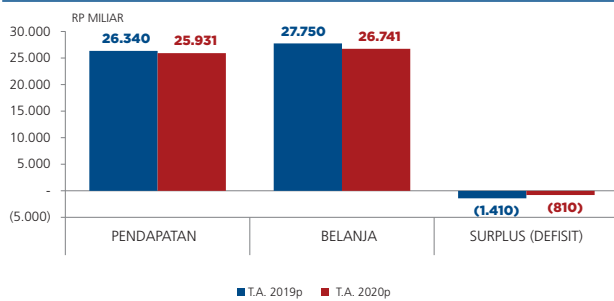
Tabel 2.1 Perubahan Anggaran APBD Jawa Tengah Tahun 2020

KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH	(RP MILIAR)			%
	2020	2020p	CHANGE	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	15,993	14,005	(1,988)	-12.43
PAJAK DAERAH	13,440	12,007	(1,433)	-10.66
RETRIBUSI DAERAH	127	94	(33)	-25.93
HSL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	523	529	6	1.15
LAIN-LAIN PAD YG SAH	1,903	1,375	(528)	-27.75
DANA PERIMBANGAN	12,215	11,842	(373)	-3.05
DANA BAGI HSL PIK/BUKAN PIK	777	970	193	24.84
DANA ALOKASI UMUM	3,831	3,460	(371)	-9.68
DANA ALOKASI DANA KHUSUS	7,607	7,412	(195)	-2.56
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	93	84	(9)	-9.68
HIBAH	24	23	(1)	-4.17
DANA PENY. DAN OTONOMI KHUSUS			-	
DANA INSENTIF DAERAH	69	61	(8)	-11.59
PENDAPATAN LAINNYA			-	
JUMLAH PENDAPATAN	28,301	25,931	(2,370)	-8.37
KOMPONEN BELANJA DAERAH				
BELANJA TIDAK LANGSUNG	21,567	20,895	(672)	-3.12
BELANJA PEGAWAI	5,703	5,672	(31)	-0.54
BELANJA HIBAH	5,915	5,761	(154)	-2.60
BELANJA BANTUAN SOSIAL	48	48	-	0.00
BLN BAGI HASIL KPD KAB/KOTA	5,683	5,257	(426)	-7.50
BLN BANT.KEU. KPD KAB/KOTA	2,230	2,169	(61)	-2.74
BELANJA TDK TERDUGA	1,988	1,988	-	-
BELANJA LANGSUNG	7,543	5,846	(1,697)	-22.50
BELANJA PEGAWAI	1,093	1,046	(47)	-4.30
BELANJA BARANG DAN JASA	4,641	3,806	(835)	-17.99
BELANJA MODAL	1,809	994	(815)	-45.05
JUMLAH BELANJA	29,110	26,741	(2,369)	-8.14

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi APBD Jawa Tengah Triwulan II-2019 dan Triwulan II-2020 (Rp Miliar)

URAIAN	REALISASI TW II 2019	% REALISASI	REALISASI TW II 2020	% REALISASI
PENDAPATAN	12,687	48.17%	9,327	35.97%
PAD	6,233	43.02%	6,428	45.90%
DANA PERIMBANGAN	6,411	54.49%	2,851	24.08%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	43	50.00%	48	57.14%
BELANJA	9,258	33.36%	7,256	27.13%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,209	36.83%	5,089	24.35%
BELANJA LANGSUNG	2,049	25.06%	2,167	37.07%
SURPLUS/DEFISIT	3,429		2,071	

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, diolah



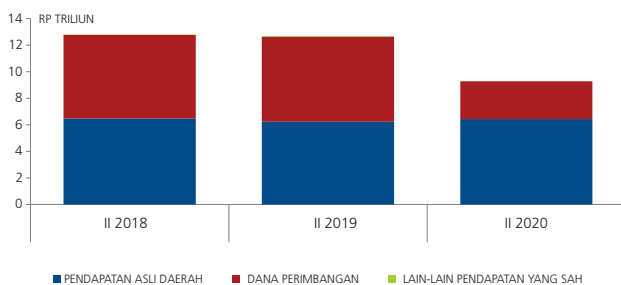
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jawa Tengah

Grafik 2.1 APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2019 dan T.A. 2020

Penurunan realisasi pendapatan disebabkan oleh realisasi dana perimbangan dari pemerintah pusat yang turun signifikan. Hingga triwulan II 2020 dana perimbangan baru terealisasi sebesar 24,08% dari total anggaran. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata realisasi dana perimbangan pada triwulan II selama lima tahun terakhir yang mencapai 53,57%. Sementara itu, penurunan realisasi belanja bersumber dari pos belanja tidak langsung. Realisasi belanja tidak langsung pada triwulan II 2020 tercatat hanya 24,35%, lebih rendah dari rata-rata realisasi belanja tidak langsung pada triwulan II selama lima tahun terakhir yang mencapai 36,87%.

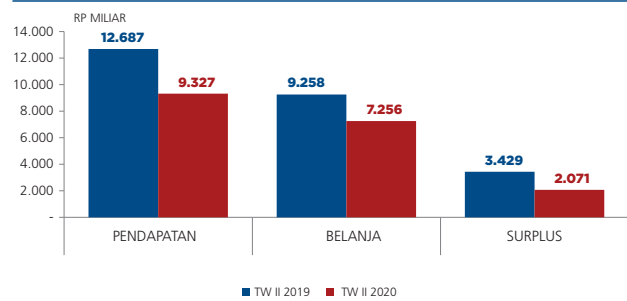
2.2.1. Realisasi Pendapatan Triwulan II 2020

Realisasi pendapatan Provinsi Jawa Tengah pada triwulan II 2020 adalah Rp9,32 Triliun atau secara persentase baru terealisasi sebesar 35,97% dari target. Persentase ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang mencapai 48,17%. Realisasi pendapatan utamanya bersumber dari komponen Pendapatan Asli Daerah dengan porsi sebesar 68,92% dari total pendapatan. Sisanya sebesar 30,57% merupakan komponen pendapatan dana perimbangan dan 0,51% merupakan komponen pendapatan lain-lain yang sah.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jawa Tengah

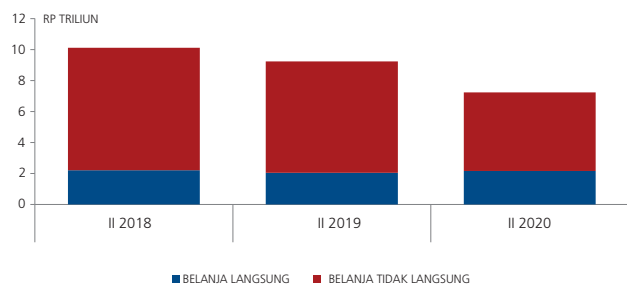
Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan II (2018-2020)



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jawa Tengah

Grafik 2.2 Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Triwulan II 2019 dan Triwulan II 2020

Realisasi dana pendapatan asli daerah pada triwulan laporan sebesar 45,90% dari anggaran pendapatan daerah. Berdasarkan komponen, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada triwulan laporan realisasi pajak daerah sebesar 43,17%, dimana pencapaian ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang mencapai 45,67%. Penurunan realisasi pendapatan pajak daerah ditengarai karena pembatasan aktivitas ekonomi sebagai langkah penanggulangan penyebaran COVID-19. Sementara itu, realisasi retribusi daerah justru mengalami perbaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Tercatat realisasi retribusi daerah sebesar 52,29% lebih baik daripada realisasi pada periode yang sama pada tahun lalu yang hanya sebesar 41,32%. Begitupun dengan realisasi lain-lain PAD yang sah juga mengalami peningkatan realisasi dari 11,37% pada triwulan II tahun 2019 menjadi 63,71% pada triwulan II tahun 2020. Meskipun demikian, peningkatan dua komponen ini tidak dapat membuat realisasi PAD jauh lebih baik dari tahun sebelumnya karena porsi anggaran pendapatan dari pajak daerah merupakan yang terbesar, yaitu 85,74% dari total anggaran PAD.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jawa Tengah

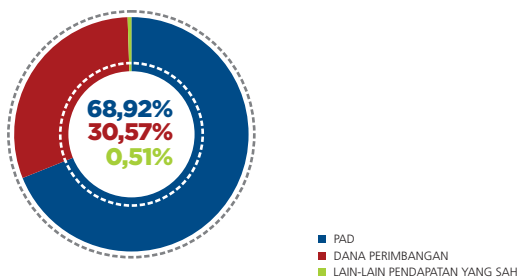
Grafik 2.4 Realisasi Belanja Daerah Triwulan I (2018-2020)

Tabel 2.3 Realisasi Pendapatan Triwulan II - 2019 dan Triwulan II - 2020

KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH	TW II 2019	TW II 2020
PENDAPATAN	48.17%	35.97%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	43.02%	45.90%
PAJAK DAERAH	45.67%	43.17%
RETRIBUSI DAERAH	41.32%	52.29%
HSL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	95.91%	60.49%
LAIN-LAIN PAD YG SAH	11.37%	63.71%
DANA PERIMBANGAN	54.49%	24.08%
DANA BAGI HSL PJK/BUKAN PJK	41.48%	49.38%
DANA ALOKASI UMUM	58.35%	52.20%
DANA ALOKASI DANA KHUSUS	53.88%	7.64%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	50.00%	57.14%
HIBAH	52.17%	52.17%
DANA PENY. DAN OTONOMI KHUSUS		
DANA INSENTIF DAERAH	49.21%	59.02%
PENDAPATAN LAINNYA		

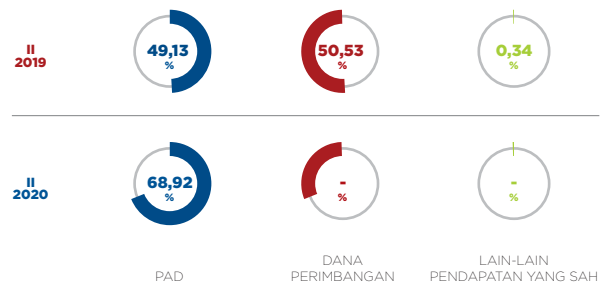
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, diolah

Selanjutnya, realisasi Dana Perimbangan tidak sampai separuh dari tahun lalu. Realisasi dana perimbangan pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 24,08%. Realisasi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi dana perimbangan pada periode yang sama di tahun lalu yang mencapai 54,49%. Penurunan realisasi dana perimbangan paling utama disebabkan oleh realisasi dana alokasi khusus yang turun secara signifikan. Realisasi dana alokasi khusus pada triwulan II 2020 tercatat hanya 7,64%, angka ini jauh di bawah realisasi pada triwulan II tahun 2019 yang mencapai 53,88%. Sejalan dengan itu, realisasi dana alokasi umum juga tidak lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada triwulan II 2020 tercatat realisasi dana alokasi umum hanya sebesar 52,20%, lebih rendah daripada periode yang sama di tahun lalu yang mencapai 58,35%. Namun demikian, realisasi bagi hasil pajak / bukan pajak justru mengalami peningkatan pada triwulan II 2020. Realisasi dana bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar 49,38%, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 41,48%. Penurunan realisasi dana perimbangan dari pemerintah pusat



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jawa Tengah

Grafik 2.5 Kontribusi Pos Pendapatan Daerah Triwulan II 2020



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 2.6 Perbandingan Pos Pendapatan Daerah Triwulan II 2019 dan Triwulan II 2020

yang cukup signifikan ini merupakan konsekuensi atas dilakukannya rasionalisasi dan *refocusing* anggaran yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Langkah ini diambil untuk penanggulangan penyebaran COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN).

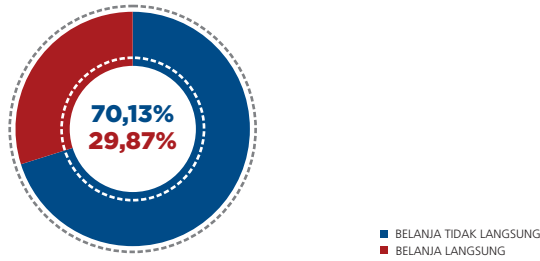
2.2.2. Realisasi Belanja Triwulan II 2020

Realisasi belanja Provinsi Jawa Tengah pada triwulan II 2020 tercatat sebesar Rp7,25 triliun atau 27,13% dari pagu anggaran belanja tahun 2020. Realisasi ini tidak lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan II 2019 sebesar 33,36%. Postur realisasi belanja masih didominasi oleh belanja tidak langsung dengan kontribusi sebesar 70,13% dari total belanja. Namun demikian, realisasi belanja tidak langsung pada periode laporan tidak lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Realisasi belanja tidak langsung hanya 24,35%, lebih rendah daripada tahun lalu yang mencapai 36,83%. Sumber penurunan penyerapan belanja tidak langsung adalah belanja hibah yang turun cukup signifikan pada triwulan II 2020. Realisasi belanja hibah pada triwulan laporan hanya terealisasi sebesar 3,06%, jauh di bawah realisasi pada tahun lalu yang

Tabel 2.4 Realisasi Belanja Triwulan II 2019 dan Triwulan II 2020

KOMPONEN BELANJA DAERAH	TW II 2019	TW II 2020
BELANJA TIDAK LANGSUNG	36.83%	24.35%
BELANJA PEGAWAI	39.15%	42.92%
BELANJA HIBAH	51.01%	3.06%
BELANJA BANTUAN SOSIAL	20.00%	35.42%
BLNJ BAGI HASIL KPD KAB/KOTA	36.68%	38.90%
BLNJ BANT.KEU. KPD KAB/KOTA	3.04%	1.06%
BELANJA TDK TERDUGA	4.35%	19.77%
BELANJA LANGSUNG	25.06%	37.07%
BELANJA PEGAWAI	31.45%	37.28%
BELANJA BARANG DAN JASA	26.86%	39.07%
BELANJA MODAL	19.15%	29.18%
JUMLAH BELANJA	33.36%	27.13%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, diolah



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jawa Tengah

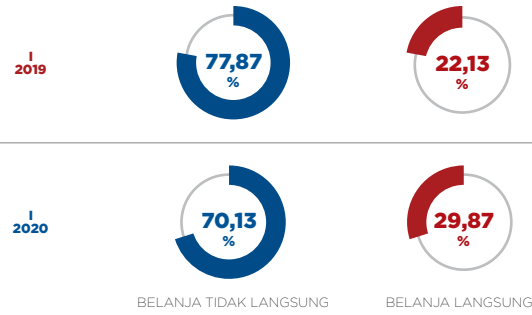
Grafik 2.7 Kontribusi Pos Belanja Daerah Triwulan II 2020

mencapai 51,01%. Penurunan belanja hibah ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah melakukan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 yang nantinya akan dialokasikan untuk bantuan sosial sebagai jaring pengaman ekonomi.

Sementara itu, realisasi belanja langsung lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Tercatat realisasi belanja langsung mencapai 37,07% dari total anggaran atau sebesar Rp2,16 triliun. Realisasi tersebut lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya sebesar 25,06%. Seluruh komponen belanja langsung menunjukkan peningkatan realisasi. Peningkatan terbesar terjadi pada belanja barang dan jasa dari 26,86% pada triwulan II 2019 menjadi 39,07% pada triwulan laporan. Sejalan dengan itu, belanja pegawai dan belanja modal juga mengalami peningkatan realisasi anggaran dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Adapun realisasi anggaran belanja pegawai sebesar 37,28% dan realisasi belanja modal sebesar 29,18%.

2.2.3. Program dan Anggaran Penanggulangan Pandemi COVID-19

Sesuai keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 360/3 tahun 2020 tentang penetapan status tanggap darurat bencana COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah Pemerintah telah menetapkan realokasi anggaran penanganan COVID-19 di Jawa Tengah. Jumlah dana yang digunakan untuk refocussing kegiatan dan dialokasikan pada belanja tidak terduga untuk penanganan COVID-19 pada APBD Jawa Tengah 2020 adalah sebesar Rp1,98 triliun. Dana tersebut akan digunakan pada tiga program kegiatan, diantaranya: Penanganan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp426 Miliar, penanganan dampak ekonomi dengan alokasi



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 2.8 Perbandingan Pos Belanja Daerah Triwulan II 2019 dan Triwulan II 2020

anggaran sebesar Rp222 miliar, dan penyediaan jaring pangan sosial bagi masyarakat dengan total anggaran sebesar Rp1.3 triliun. Selain melakukan *refocussing* anggaran, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan menambahkan alokasi tambahan APBD yang bersumber dari pergeseran dalam SKPD sebesar Rp139 Miliar. Adapun pos penggunaan anggaran tersebut berupa penanganan kesehatan dengan alokasi anggaran Rp29,06 miliar, penanganan dampak ekonomi dengan alokasi anggaran sebesar Rp107,38 miliar, dan penyesiaian sosial *safety net* dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,4 miliar.



PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Tekanan Inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah pada triwulan II 2020 melambat dibandingkan triwulan I 2020.

- Berdasarkan disgregasi kelompok, perlambatan laju inflasi tahunan Jawa Tengah paling utama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Tekanan inflasi pada Kelompok tersebut melambat disebabkan oleh penurunan harga pada komoditas bahan pangan utama.
- Sejalan dengan itu, melambatnya tekanan inflasi juga bersumber dari kelompok barang dan jasa penyediaan makanan dan minuman, kelompok barang dan jasa transportasi, dan kelompok barang dan jasa pakaian dan alas khaki.



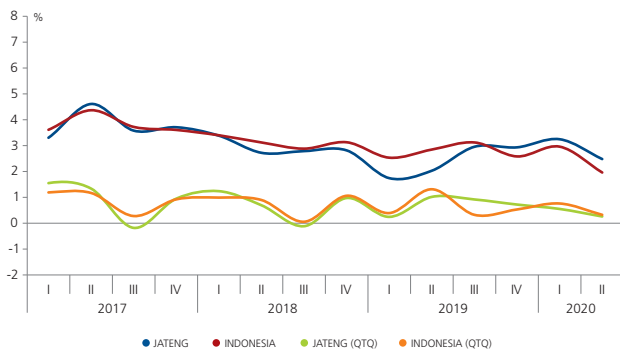
3.1. INFLASI SECARA UMUM

Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 2,48% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,25% (yoy). Lebih lanjut, capaian inflasi tahunan tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan II pada tahun 2019 sebesar 2,51% (yoy). Sesuai dengan pola historis, secara triwulanan Jawa Tengah mengalami inflasi sebesar 0,26% (qtq), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2020 yang mencatatkan inflasi sebesar 0,55% (qtq).

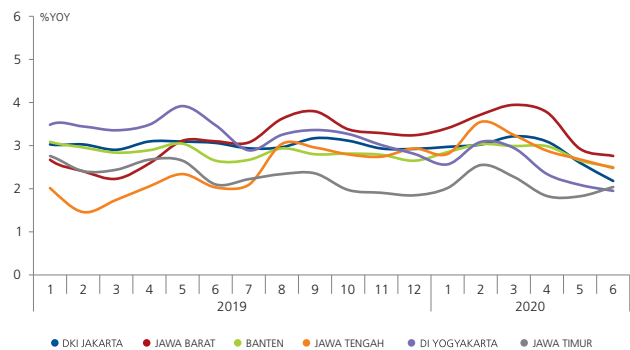
Realisasi inflasi tersebut, membuat laju inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan laporan tidak lebih baik dibanding dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,96% (yoy) dan inflasi kawasan Jawa yang berada pada angka 2,38% (yoy). Perlambatan tekanan inflasi tahunan Jawa Tengah tersebut juga sejalan dengan tren penurunan tekanan harga yang berlangsung di kawasan Jawa, dimana seluruh provinsi di kawasan Jawa mencatatkan perlambatan inflasi tahunan pada triwulan laporan. Dengan perkembangan tersebut, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi ketiga tertinggi di kawasan Jawa pada triwulan laporan, setelah Provinsi Jawa Barat dan Banten.

Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulanan di Jawa Tengah pada triwulan II 2020 menunjukkan intensitas peningkatan tekanan harga pada bulan Mei 2020 yang bertepatan dengan perayaan hari raya Idul Fitri. Namun demikian, realisasi inflasi pada bulan tersebut sebesar 0,07% (mtm) merupakan yang terendah dibandingkan periode perayaan hari raya Idulfitri pada tahun-tahun sebelumnya dengan rata-rata inflasi dalam lima tahun terakhir sebesar 0,52% (mtm). Kemudian pada bulan Juni 2020 realisasi inflasi kembali meningkat, yaitu 0,20% (mtm) lebih rendah daripada rata-rata inflasi pada bulan yang sama dalam lima tahun terakhir sebesar 0,55% (mtm). Rendahnya inflasi tersebut seiring dengan harga kelompok barang dan jasa bahan makanan dan transportasi yang terkendali.

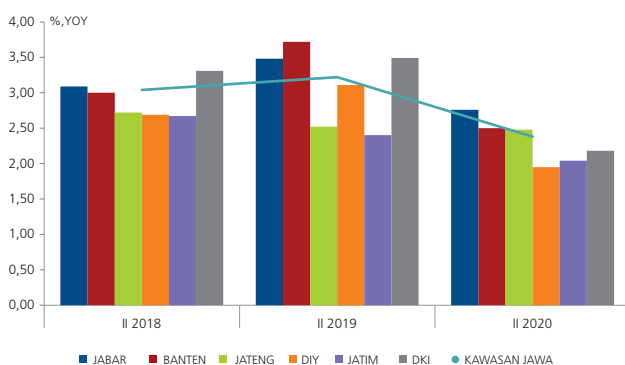
Lebih lanjut tekanan inflasi triwulanan Jawa Tengah juga melambat pada triwulan laporan. Penurunan tekanan harga utamanya disumbangkan oleh kelompok barang dan jasa makanan, minuman, dan tembakau; kelompok barang dan jasa kesehatan; kelompok barang dan jasa rekreasi, olahraga, dan budaya; dan kelompok barang dan jasa penyediaan makanan dan minuman. Penurunan tekanan harga



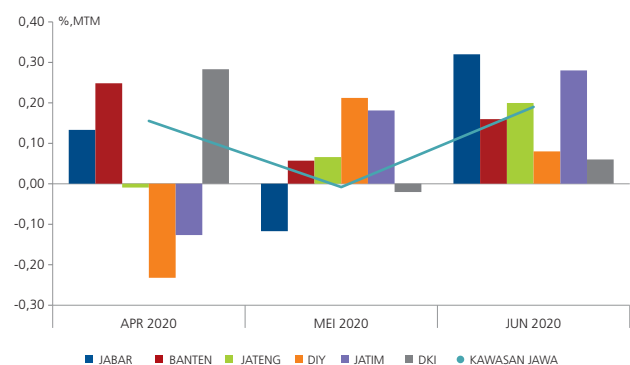
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah
Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah
Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi di Kawasan Jawa



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah
Grafik 3.3 Inflasi Tahunan Provinsi di Jawa



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah
Grafik 3.4 Inflasi Bulanan Provinsi di Jawa

Tabel 3.1 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan

APRIL		MEI		JUNI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
EMAS PERHIASAN	0.110%	BAWANG MERAH	0.091%	DAGING AYAM RAS	0.145%
BAWANG MERAH	0.070%	DAGING AYAM RAS	0.069%	TELUR AYAM RAS	0.090%
GULA PASIR	0.030%	ANGKUTAN UDARA	0.056%	ANGKUTAN ANTAR KOTA	0.040%
BERAS	0.010%	JERUK	0.025%	IKAN LELE	0.010%
DAGING SAPI	0.010%	ROKOK KRETEK FILTER	0.010%	SABUN DETERGEN BUBUK/CAIR	0.010%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 3.2 Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan

APRIL		MEI		JUNI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
CABAI MERAH	-0.110%	TELUR AYAM RAS	-0.090%	BAWANG PUTIH	-0.060%
DAGING AYAM RAS	-0.090%	BAWANG PUTIH	-0.080%	GULA PASIR	-0.030%
BAWANG PUTIH	-0.060%	CABAI MERAH	-0.040%	ANGKUTAN UDARA	-0.028%
TELUR AYAM RAS	-0.050%	CABAI RAWIT	-0.040%	EMAS PERHIASAN	-0.020%
CABAI RAWIT	-0.030%	MINYAK GORENG	-0.020%	CABAI MERAH	-0.010%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

triwulanan kelompok makanan, minuman, dan tembakau bersumber dari deflasi yang terjadi pada sub-kelompok makanan. Beberapa komoditas utama bahan makanan mengalami penurunan harga yang cukup signifikan, diantaranya aneka cabai yang rata-rata turun sebesar 34% dari triwulan I 2020 dan komoditas bawang putih yang mengalami penurunan harga sebesar 42% dari triwulan sebelumnya. Penurunan harga komoditas aneka cabai didorong oleh peningkatan pasokan seiring dengan masa panen raya. Sementara penurunan harga komoditas bawang putih seiring dengan pasokan impor yang mulai masuk guna mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Tabel 3.3. Inflasi Tahunan Kota di Provinsi Jawa Tengah

NO.	KOTA	INFLASI II 2019 (%,YOY)	INFLASI I 2020 (%,YOY)	INFLASI II 2020 (%,YOY)
1.	CILACAP	2.63	2.15	2.05
2.	PURWOKERTO	2.37	2.81	2.55
3.	KUDUS	2.29	2.66	1.65
4.	SURAKARTA	2.35	2.24	1.40
5.	SEMARANG	2.60	3.64	2.83
6.	TEGAL	2.58	3.53	2.42

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Apabila dicermati lebih lanjut, penurunan tekanan inflasi tahunan di Jawa Tengah pada triwulan laporan berlangsung pada seluruh kota pantauan di Jawa Tengah dengan intensitas yang bervariasi. Penurunan tekanan harga tertinggi terjadi di Kota Tegal yang mencatatkan perlambatan laju inflasi dari sebesar 3,53% (yoy) pada triwulan I 2020, menjadi sebesar 2,42% (yoy) pada triwulan II 2020. Sementara itu, penurunan tekanan harga terendah terjadi di Kota Cilacap yang mencatatkan perlambatan laju inflasi dari sebesar 2,15% (yoy) pada triwulan I 2020, menjadi sebesar 2,05% (yoy) pada triwulan laporan. Secara keseluruhan, perkembangan inflasi tahunan pada seluruh kota pantauan di Jawa Tengah sejalan dengan tren peningkatan di kawasan Jawa.

3.2. INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kontributor utama penahan laju inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan II 2020. Kelompok barang dan jasa ini memiliki bobot terbesar dalam basket inflasi, yaitu 24,19%.

Tabel 3.4 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok

INFLASI KELOMPOK (%; YOY)	2019				2020	
	I	II	III	IV	I	II
UMUM	1.74	2.03	2.96	2.93	3.25	2.48
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	0.88	2.10	3.20	3.98	6.82	4.13
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	2.31	2.02	2.16	1.93	1.83	1.36
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	1.03	0.90	3.47	3.24	3.09	3.26
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	4.53	4.35	4.07	4.00	2.22	2.19
KESEHATAN	1.66	2.51	2.54	2.67	2.61	2.19
TRANSPORTASI	3.00	2.51	2.27	1.45	1.00	0.47
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	0.29	0.61	0.44	0.24	0.07	-0.20
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	1.66	1.70	1.71	1.90	1.50	1.29
PENDIDIKAN	1.78	1.72	3.22	3.33	-0.71	-0.68
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	1.98	2.47	2.46	2.40	2.70	1.68
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	2.98	3.23	4.77	4.02	5.15	6.26

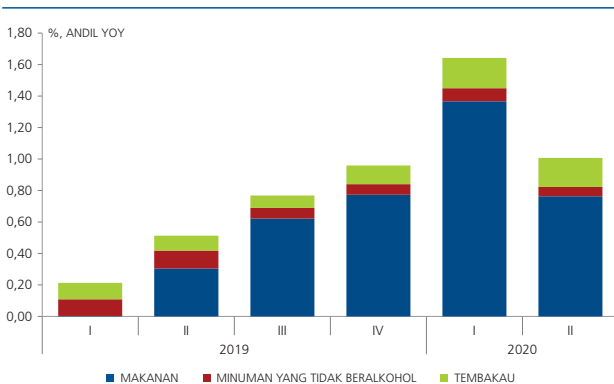
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Sejalan dengan itu, perlambatan laju inflasi tahunan juga dicatatkan oleh enam kelompok barang dan jasa lainnya, diantaranya: Kelompok Transportasi; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki; Kelompok Kesehatan; Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan; Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya; serta Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman.

3.2.1. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Penurunan laju inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu faktor penahan laju inflasi tahunan Jawa Tengah. Inflasi kelompok ini pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 4,13% (yoy), mengalami penurunan signifikan dibandingkan triwulan I 2020 yang sebesar 6,82% (yoy). Sepanjang bulan April-Juni 2020, penurunan indeks harga triwulanan kelompok ini tercatat cukup tinggi, bahkan mengalami deflasi sebesar -0,19% (qtq). Angka triwulanan tersebut lebih rendah dibanding perkembangan indeks harga pada triwulan yang sama pada tahun 2019 sebesar 2,39% (qtq).

Perlambatan laju inflasi tahunan kelompok makanan, minuman, dan tembakau bersumber dari penurunan indeks harga pada seluruh sub-kelompok. Adapun sub-kelompok makanan memiliki penurunan laju inflasi tertinggi, menurun dari 7,04% (yoy) pada triwulan I 2020 menjadi 3,87% (yoy) pada triwulan laporan. Seiring dengan itu penurunan juga terjadi pada sub-kelompok minuman tidak beralkohol dan tembakau, masing-masing mencatatkan laju inflasi sebesar 2,86% (yoy) dan 7,01% (yoy).



Grafik 3.5 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tingginya penurunan laju inflasi sub-kelompok makanan didorong oleh penurunan harga pada komoditas bahan pangan utama. Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga secara tahunan, antara lain: bawang putih, cabai merah, dan cabai hijau. Komoditas bawang putih merupakan komoditas yang mengalami penurunan indeks harga tahunan yang sangat signifikan, tercatat penurunan harga pada komoditas ini mencapai 31,50% (yoy). Faktor yang menyebabkan koreksi harga bawang putih adalah masuknya pasokan bawang putih impor sebagai langkah stabilisasi harga yang diambil pemerintah setelah pada triwulan lalu harga bawang putih meningkat signifikan akibat berkurangnya pasokan. Faktor lain yang menekan harga bawang putih adalah pasokan bawang putih impor masuk ketika terdapat beberapa daerah sentra penghasil yang sudah mulai panen, sehingga harga bawang putih semakin tertekan akibat melimpahnya pasokan. Kemudian penurunan harga cabai merah dan cabai hijau juga dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan karena pada bulan Juni merupakan puncak panen cabai di sentra penghasil cabai di Jawa Tengah. Tercatat harga cabai merah mengalami penurunan indeks harga sebesar 27,52% (yoy) dan cabai hijau mengalami penurunan indeks harga sebesar 10,06% (yoy). Sejalan dengan itu faktor lain yang mendorong koreksi harga bawang putih dan aneka cabai adalah penurunan permintaan karena banyak kegiatan usaha yang menggunakan komoditas tersebut, seperti catering dan restoran yang berhenti beroperasi dengan pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah preventif penyebaran COVID-19.

Lebih lanjut perlambatan laju inflasi sub-kelompok tembakau didorong oleh melambatnya peningkatan harga rokok. Pada triwulan laporan seluruh komoditas rokok memang mengalami peningkatan indeks harga secara tahunan. Namun demikian, peningkatan indeks harga pada rokok putih, rokok kretek filter, hingga rokok kretek tersebut melambat dibandingkan dengan triwulan I 2020. Melambatnya peningkatan indeks harga rokok tersebut mengindikasikan masih terjadi penyesuaian harga rokok sebagai langkah antisipasi peningkatan cukai rokok oleh pemerintah pada awal tahun, akan tetapi penyesuaian harga tersebut sudah tidak setinggi pada awal tahun.

3.2.2. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar lainnya

Laju inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya meningkat pada triwulan laporan.

Peningkatan laju inflasi bersumber dari peningkatan indeks harga pada sub-kelompok sewa dan kontrak rumah; sub-kelompok penyediaan air dan layanan perumahan lainnya; serta sub-kelompok listrik, gas, dan bahan bakar lainnya. Peningkatan indeks harga tertinggi terjadi pada sub-kelompok listrik, gas, dan bahan bakar lainnya dengan realisasi inflasi tahunan sebesar 0,04% (yoy), meningkat dari triwulan I 2020 yang mencatatkan deflasi sebesar 0,45% (yoy). Peningkatan laju inflasi tersebut lebih disebabkan oleh *base effect* pada tarif listrik, dimana pada triwulan I 2020 terjadi deflasi pada komoditas tersebut. Sementara itu, pada triwulan laporan tarif listrik sama sekali tidak mengalami perubahan indeks.

Sejalan dengan itu, peningkatan laju inflasi juga terjadi pada sub-kelompok penyediaan air dan layanan perumahan lainnya. Peningkatan laju inflasi utamanya bersumber dari peningkatan pada indeks harga tarif air minum PAM dan jasa pembuangan sampah. Tarif air minum PAM kembali mengalami peningkatan indeks harga sebesar 29,21% (yoy). Demikian pula jasa pembuangan sampah mengalami peningkatan indeks harga dari 0,50% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 2,02% (yoy) pada triwulan laporan.

3.2.3. Kelompok Transportasi

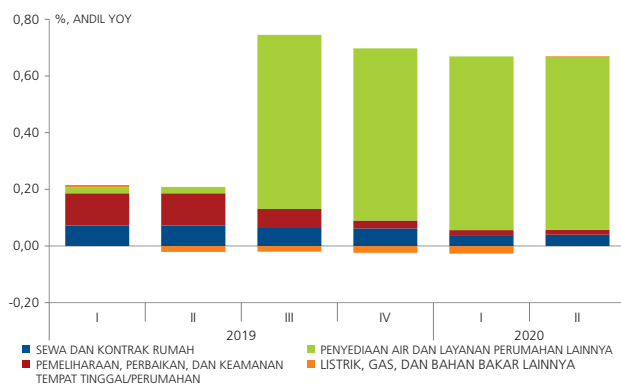
Kelompok komoditas Transportasi mengalami perlambatan laju inflasi pada triwulan II 2020.

Perlambatan laju inflasi pada kelompok barang dan jasa ini bersumber dari perlambatan laju inflasi seluruh sub-

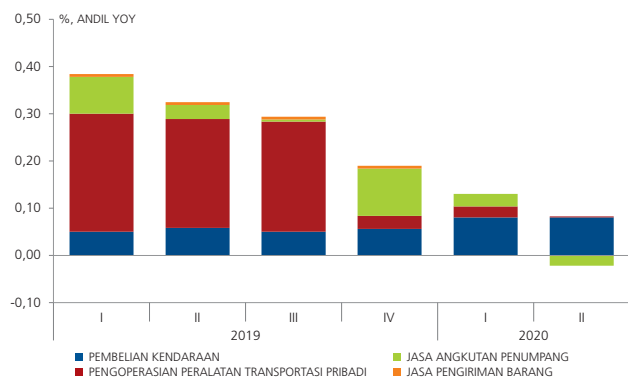
kelompok, kecuali sub-kelompok jasa pengiriman barang yang tidak mengalami perubahan indeks harga. Perlambatan laju inflasi tertinggi bersumber dari kelompok jasa angkutan. Pada triwulan laporan sub-kelompok jasa angkutan mengalami deflasi sebesar 1,08% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan I 2020 yang mengalami inflasi sebesar 1,38% (yoy). Deflasi yang terjadi pada sub-kelompok jasa angkutan bersumber dari penurunan tarif pada dua moda transportasi umum utama, yaitu Pesawat udara dan kereta api. Tarif angkutan udara tercatat mengalami deflasi sebesar 7,91% (yoy) begitupun dengan tarif kereta api yang mengalami deflasi sebesar 7,05% (yoy). Guna mendorong permintaan yang lesu saat pemberlakuan pembatasan mobilitas masyarakat di masa pandemi, dilakukan penurunan tarif pada moda transportasi pesawat dan kereta api.

Perlambatan laju inflasi juga terjadi pada sub-kelompok barang dan jasa pengoperasian peralatan transportasi pribadi.

Pada triwulan laporan inflasi tahunan sub-kelompok tersebut mencatatkan inflasi sebesar 0,03% (yoy), menurun signifikan daripada triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,32% (yoy). Penurunan laju inflasi pada sub-kelompok ini bersumber dari deflasi yang terjadi pada komoditas energi, yaitu solar dan bensin. Adapun penurunan harga solar tercermin pada indeks harga yang mengalami deflasi sebesar 2,75% (yoy). Sementara penurunan harga bensin tercermin pada indeks harga yang mengalami deflasi sebesar 3,05% (yoy). Koreksi harga yang terjadi pada kedua komoditas tersebut seiring dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi akibat rendahnya harga minyak dunia.

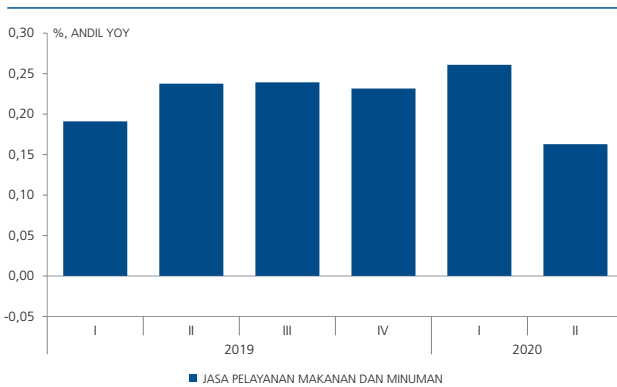


Grafik 3.6 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan - Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya



Grafik 3.7 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan - Kelompok Transportasi

3.2.4. Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman



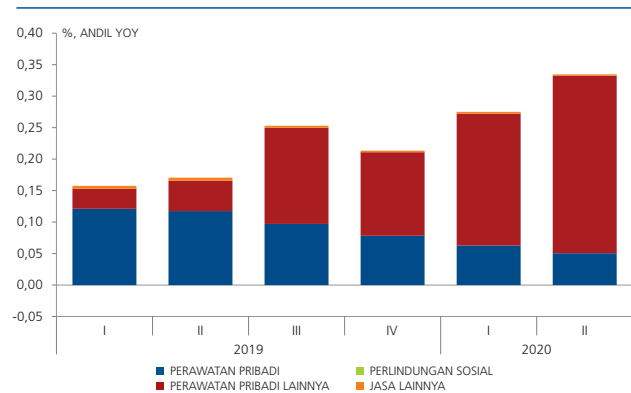
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.8 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan - Penyediaan makanan dan minuman

Laju inflasi kelompok penyediaan makanan dan minuman melambat pada triwulan laporan. Inflasi tahunan pada kelompok ini tercatat sebesar 1,68% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 2,70% (yoy). Perlambatan laju inflasi pada kelompok barang dan jasa ini bersumber dari melambatnya laju inflasi pada beberapa komoditas makanan, diantaranya: pecel, bubur kacang hijau, tahu campur, bubur, dan pizza. Beberapa dari komoditas tersebut tidak mengalami perubahan indeks harga dibandingkan triwulan I 2020, diantaranya: bubur kacang hijau, pizza, dan tahu campur. Sementara komoditas yang mengalami perubahan indeks harga yang lebih rendah daripada triwulan I 2020 adalah pecel, menurun dari 11,92% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 2,34% (yoy) pada triwulan laporan.

3.2.5. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Laju inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya meningkat pada triwulan laporan. Tercatat inflasi tahunan kelompok barang dan jasa ini sebesar 6,26% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,15% (yoy). Meningkatnya laju inflasi tersebut bersumber dari peningkatan laju inflasi sub-kelompok perawatan pribadi lainnya. Inflasi sub-kelompok perawatan pribadi lainnya sebesar 16,71% (yoy), lebih tinggi daripada triwulan I 2020 yang tercatat hanya 12,47% (yoy). Peningkatan laju inflasi pada sub-kelompok ini didorong oleh peningkatan harga pada komoditas emas perhiasan yang cukup signifikan. Tercatat inflasi tahunan pada komoditas ini sebesar 31,61% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

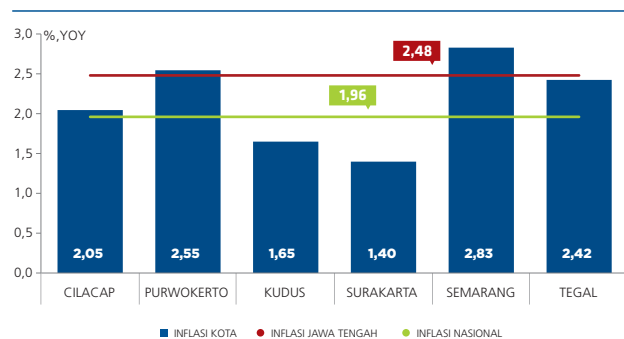
Grafik 3.9 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan - Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

hanya sebesar 23,66% (yoy). Peningkatan harga emas perhiasan ini seiring dengan peningkatan harga emas global yang terus mengalami kenaikan dari awal tahun. Tercatat pada akhir triwulan II harga emas dunia mencapai 1.772 USD per troy ounce, lebih tinggi daripada awal tahun yang berada pada kisaran 1.582 USD per troy ounce.

3.3. INFLASI KOTA – KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Seluruh kota pantauan inflasi yang disurvei oleh BPS di Jawa Tengah mencatatkan perlambatan laju inflasi tahunan pada triwulan laporan dibandingkan triwulan I 2020. Perlambatan laju inflasi tertinggi terjadi di Kota Tegal dari 3,53% (yoy) pada triwulan I 2020 menjadi 2,42% (yoy). Sementara perlambatan laju inflasi terendah terjadi di Kota Cilacap dari 2,13% (yoy) menjadi 2,24% (yoy). Dari 6 kota pantauan inflasi, hanya 1 kota yang memiliki tingkat inflasi lebih tinggi daripada tingkat inflasi nasional dan Jawa Tengah sementara 3 kota lain masih berada di atas tingkat inflasi nasional dan di bawah tingkat inflasi Jawa Tengah. Adapun 2 kota lain berada di bawah tingkat inflasi nasional maupun Jawa Tengah, yaitu Kota Kudus dan Surakarta.

Disparitas inflasi antarkota di Jawa Tengah pada triwulan laporan mengalami perbaikan dibandingkan triwulan I 2020. Selisih tingkat inflasi antar kota yang memiliki inflasi tertinggi dan terendah tercatat sebesar 1,43%. Sebelumnya pada triwulan I 2020 disparitas inflasi antar kota sebesar 1,49%. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Semarang sebesar 2,83% (yoy), sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Surakarta sebesar 1,40% (yoy).

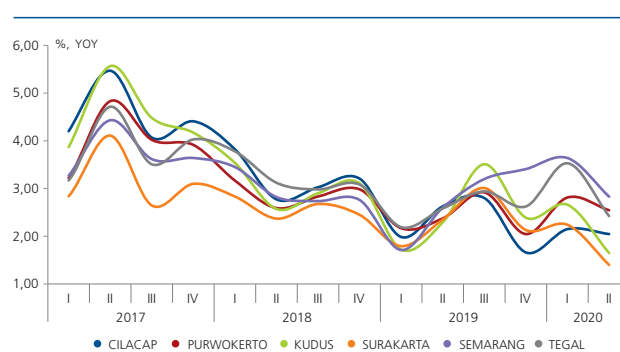


Grafik 3.10 Inflasi Tahunan Triwulan I 2020 pada Seluruh Kota Pantauan di Jawa Tengah

Ditinjau berdasarkan kelompok, kota-kota pantauan inflasi di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan inflasi kelompok yang beragam. Namun demikian, seluruh kota pantauan inflasi di Jawa Tengah mencatatkan perlambatan inflasi yang signifikan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada triwulan laporan. Pada triwulan II 2020, kelompok makanan, minuman, dan tembakau secara rata-rata tercatat mengalami perlambatan laju inflasi sebesar 2,69% (yoy) dari triwulan I 2020 pada seluruh kota pantauan. Perlambatan laju inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dipengaruhi oleh fakta bahwa pasokan kelompok bahan makanan bagi seluruh kota pantauan berasal dari produksi pertanian dan peternakan domestik yang relatif sama, dimana pada triwulan laporan pasokan bahan makanan utama cenderung mengalami *over supply*.

3.3.1. Disagregasi Inflasi Kota Semarang

Kota Semarang mencatatkan perlambatan laju inflasi tahunan pada triwulan laporan. Realisasi Inflasi kota Semarang pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 2,83% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan I 2020 yang sebesar



Grafik 3.11 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Pantauan di Jawa Tengah

3,64% (yoy). Dengan perlambatan inflasi tahunan tersebut, andil Kota Semarang terhadap perlambatan inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah masih menempati posisi pertama dibandingkan 5 (lima) kota pantauan inflasi lainnya di Jawa Tengah. Hal ini terutama disebabkan oleh pangsa konsumsi Kota Semarang yang terbesar, mencapai 61,70% terhadap pembentukan inflasi Jawa Tengah.

Sejalan dengan perkembangan indeks harga pada 5 (lima) kota pantauan lain di Provinsi Jawa Tengah, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kontributor utama perlambatan inflasi tahunan Kota Semarang. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami perlambatan signifikan dari 7,56% (yoy) pada triwulan I 2020, menjadi sebesar 4,57% (yoy) pada triwulan laporan. Perlambatan inflasi tahunan kelompok makanan, minuman, dan tembakau tersebut relatif moderat dibandingkan peningkatan inflasi kelompok yang sama di 5 (lima) kota pantauan inflasi lain di Jawa Tengah. Sejalan dengan fenomena yang berlangsung di tingkat provinsi, maupun kawasan Jawa secara keseluruhan, perlambatan tekanan inflasi kelompok makanan, minuman,

Tabel 3.5 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Semarang Berdasarkan Kelompok

INFLASI KELOMPOK (%; YOY)	JAWA TENGAH			SEMARANG		
	I 2020	II 2020	UP/DOWN	I 2020	II 2020	UP/DOWN
UMUM	3.25	2.48	-0.77	3.64	2.83	-0.81
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	6.82	4.13	-2.69	7.56	4.57	-2.99
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	1.83	1.36	-0.47	1.69	0.66	-1.03
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	3.09	3.26	0.17	4.38	4.47	0.09
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	2.22	2.19	-0.03	2.33	2.43	0.10
KESEHATAN	2.61	2.19	-0.43	2.33	1.37	-0.96
TRANSPORTASI	1.00	0.47	-0.54	1.31	0.78	-0.54
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	0.07	-0.20	-0.28	-0.03	-0.26	-0.23
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	1.50	1.29	-0.21	0.76	0.61	-0.14
PENDIDIKAN	-0.71	-0.68	0.03	0.14	0.14	0.00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	2.70	1.68	-1.02	1.85	0.62	-1.23
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	5.15	6.26	1.12	5.73	7.83	2.10

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

dan tembakau di Kota Semarang utamanya disumbang oleh sub-kelompok makanan seiring dengan melimpahnya pasokan bahan makanan utama, seperti: cabai merah, cabai rawit, cabai hijau, dan bawang putih.

Secara umum, inflasi tahunan kelompok-kelompok komoditas barang dan jasa di Kota Semarang selaras dengan yang terjadi di tingkat Provinsi, kecuali yang terjadi pada kelompok barang dan jasa perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga. Pada triwulan laporan tercatat inflasi pada kelompok komoditas barang dan jasa ini meningkat dari 2,33% (yoy) menjadi 2,43% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok barang dan jasa ini utamanya bersumber dari peningkatan indeks harga komoditas sabun detergen bubuk dan pembersih lantai.

3.3.2. Disagregasi Inflasi Kota Surakarta

Kota Surakarta juga mencatatkan perlambatan inflasi tahunan pada triwulan II 2020. Inflasi kota Surakarta tercatat sebesar 1,40% (yoy), realisasi inflasi lebih rendah dari triwulan I 2020 yaitu sebesar 2,24% (yoy). Kota Surakarta sebagai kota dengan pangsa konsumsi terbesar kedua di Jawa Tengah mengalami perkembangan inflasi yang relatif seragam dengan tren inflasi Jawa Tengah secara keseluruhan, hampir seluruh kelompok barang dan jasa mengalami laju inflasi yang selaras dengan Provinsi Jawa Tengah, kecuali kelompok barang dan jasa pakaian dan alas kaki, kesehatan, dan penyediaan makanan dan minuman / restoran.

Perlambatan laju inflasi bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Indeks harga kelompok tersebut pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 2,31% (yoy), melambat dibanding triwulan lalu yang sebesar 6,13% (yoy). Tren perlambatan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada Kota Surakarta merupakan

yang tertinggi dibandingkan kota pantauan inflasi lainnya. Perlambatan laju inflasi pada kelompok tersebut utamanya didorong oleh perlambatan laju inflasi pada sub-kelompok makanan. Tercatat inflasi pada sub-kelompok makanan mengalami perlambatan dari 5,98% pada triwulan I 2020 menjadi 1,39% pada triwulan laporan. Perlambatan laju inflasi tersebut didorong oleh penurunan harga pada beberapa komoditas utama, diantaranya aneka cabai dan bawang merah. Diantara komoditas tersebut penurunan harga pada bawang putih merupakan yang tertinggi sebagaimana terindikasi pada penurunan indeks harga komoditas tersebut sebesar 39,58% (yoy). Tingginya penurunan harga bawang putih disebabkan oleh faktor pasokan yang melimpah karena banyak pasokan impor masuk ke dalam negeri pasca triwulan sebelumnya di mana pasokan bawang putih mengalami kendala di pasar. Ditambah lagi pada saat bersamaan beberapa sentra penghasil bawang putih di Jawa Tengah telah memasuki masa panen.

Lebih lanjut dari beberapa kelompok barang dan jasa yang menunjukkan perkembangan indeks harga yang berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah, kelompok barang dan jasa penyediaan makanan dan minuman/restoran memiliki disparitas yang paling besar. Dimana kelompok komoditas tersebut di Jawa Tengah mengalami tren perlambatan laju inflasi, sementara di Kota Surakarta mengalami tren peningkatan sebesar 0,66%. Meningkatnya laju inflasi pada kelompok barang dan jasa ini bersumber dari peningkatan harga beberapa jenis makanan jadi.

3.3.3. Disagregasi Inflasi Kota Cilacap

Inflasi Kota Cilacap mencatatkan inflasi terendah kedua dibandingkan kota lain yang menjadi kota perhitungan

Tabel 3.6 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Surakarta Berdasarkan Kelompok

INFLASI KELOMPOK (%; YOY)	JAWA TENGAH			SURAKARTA		
	I 2020	II 2020	UP/DOWN	I 2020	II 2020	UP/DOWN
UMUM	3.25	2.48	-0.77	2.24	1.40	-0.84
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	6.82	4.13	-2.69	6.13	2.31	-3.82
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	1.83	1.36	-0.47	1.45	2.01	0.56
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	3.09	3.26	0.17	0.49	1.13	0.65
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	2.22	2.19	-0.03	0.60	0.15	-0.46
KESEHATAN	2.61	2.19	-0.43	3.02	3.45	0.43
TRANSPORTASI	1.00	0.47	-0.54	-0.81	-2.02	-1.21
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	0.07	-0.20	-0.28	1.12	0.60	-0.51
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	1.50	1.29	-0.21	4.70	4.03	-0.67
PENDIDIKAN	-0.71	-0.68	0.03	-2.09	-1.91	0.18
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	2.70	1.68	-1.02	4.44	5.11	0.66
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	5.15	6.26	1.12	1.58	1.74	0.15

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 3.7 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Cilacap Berdasarkan Kelompok

INFLASI KELOMPOK (%; YOY)	JAWA TENGAH			CILICAP		
	I 2020	II 2020	UP/DOWN	I 2020	II 2020	UP/DOWN
UMUM	3.25	2.48	-0.77	2.15	2.05	-0.10
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	6.82	4.13	-2.69	4.39	4.76	0.37
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	1.83	1.36	-0.47	0.83	0.61	-0.22
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	3.09	3.26	0.17	0.03	0.11	0.08
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	2.22	2.19	-0.03	2.56	1.77	-0.79
KESEHATAN	2.61	2.19	-0.43	5.07	5.18	0.11
TRANSPORTASI	1.00	0.47	-0.54	1.50	0.60	-0.90
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	0.07	-0.20	-0.28	0.46	-0.18	-0.64
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	1.50	1.29	-0.21	0.56	1.00	0.44
PENDIDIKAN	-0.71	-0.68	0.03	-5.00	-5.00	0.00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	2.70	1.68	-1.02	1.99	1.56	-0.43
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	5.15	6.26	1.12	6.13	5.63	-0.51

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

inflasi di Jawa Tengah. Inflasi tahunan kota Cilacap pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 2,05% (yoy), melambat dibandingkan triwulan I 2020 yang mencapai 2,15% (yoy). Berbeda dengan perkembangan inflasi di Jawa Tengah, perlambatan inflasi tahunan Kota Cilacap pada triwulan laporan justru didorong oleh kelompok barang dan jasa transportasi yang mencatatkan inflasi sebesar 0,60% (yoy), melambat signifikan dibandingkan triwulan I 2020 yang mencapai 1,50% (yoy). Perlambatan tekanan inflasi pada kelompok tersebut bersumber dari sub-kelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi. Indeks harga sub-kelompok tersebut mengalami penurunan sebesar 1,04% (yoy). Penurunan indeks harga didorong oleh penurunan harga pada komoditas solar, bensin, dan ban dalam motor. Penurunan indeks harga tertinggi terjadi pada komoditas bensin sebesar 2,31% (yoy). Kemudian penurunan indeks harga solar dan ban dalam motor mencatatkan angka yang sama yaitu 0,11% (yoy). Penurunan indeks harga bensin dan solar dipengaruhi oleh penyesuaian harga bensin dan solar non-subsidi seiring dengan rendahnya harga minyak dunia.

Lebih lanjut terdapat ketidakselarasan pergerakan indeks harga pada beberapa kelompok barang dan jasa di Kota Cilacap dengan Jawa Tengah secara keseluruhan. Dapat dicermati bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kesehatan; rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami tren peningkatan laju inflasi. Sementara di Jawa Tengah kelompok tersebut mengalami penurunan laju inflasi. Kelompok barang dan jasa rekreasi, olahraga, dan budaya mengindikasikan peningkatan indeks harga yang paling besar, yaitu sebesar 0,44%. Peningkatan laju inflasi pada kelompok tersebut bersumber dari peningkatan indeks

harga pada sub-kelompok koran, buku, dan perlengkapan sekolah, diantaranya komoditas buku tulis bergaris, pensil hitam, dan surat kabar harian. Buku tulis bergaris mencatatkan kenaikan indeks harga paling tinggi yaitu sebesar 5,07% (yoy).

3.3.4. Disagregasi Inflasi Kota Kudus

Sama halnya dengan kota pantauan inflasi lainnya di Jawa Tengah, Kota Kudus terpantau mengalami perlambatan laju inflasi. Pada triwulan II 2020, inflasi tahunan Kota Kudus tercatat sebesar 1,65% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,66% (yoy). Perlambatan tekanan inflasi bersumber dari perlambatan laju inflasi pada kelompok barang dan jasa informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Indeks harga pada kelompok tersebut mengalami deflasi yang semakin dalam -0,04% pada triwulan I 2020 menjadi -1,17% pada triwulan laporan. Tren perlambatan tersebut selaras dengan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, perlambatan di Kota Kudus lebih tinggi dibandingkan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap penurunan indeks harga pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan adalah komoditas televisi berwarna. Tercatat indeks harga televisi berwarna mengalami penurunan sebesar 9,16% (yoy) pada triwulan laporan, semakin dalam dari penurunan yang terjadi pada triwulan I 2020 sebesar 8,39% (yoy).

Lebih lanjut perkembangan indeks harga kelompok barang dan jasa di Kota Kudus relatif tidak selaras dengan Provinsi Jawa Tengah. Beberapa kelompok barang dan jasa yang pergerakan indeks harganya tidak selaras dengan provinsi Jawa Tengah, diantaranya kelompok makan,

Tabel 3.8 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Kudus Berdasarkan Kelompok

INFLASI KELOMPOK (%; YOY)	JAWA TENGAH			KUDUS		
	I 2020	II 2020	UP/DOWN	I 2020	II 2020	UP/DOWN
UMUM	3.25	2.48	-0.77	2.66	1.65	-1.01
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	6.82	4.13	-2.69	1.47	3.07	1.60
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	1.83	1.36	-0.47	0.23	3.97	3.74
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	3.09	3.26	0.17	0.06	0.44	0.38
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	2.22	2.19	-0.03	0.08	1.84	1.76
KESEHATAN	2.61	2.19	-0.43	0.06	1.97	1.91
TRANSPORTASI	1.00	0.47	-0.54	0.07	0.30	0.23
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	0.07	-0.20	-0.28	-0.04	-1.17	-1.13
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	1.50	1.29	-0.21	0.03	1.80	1.77
PENDIDIKAN	-0.71	-0.68	0.03	-0.06	-1.03	-0.96
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	2.70	1.68	-1.02	0.45	1.23	0.78
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	5.15	6.26	1.12	0.31	3.89	3.58

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

minuman, dan tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok transportasi; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman. Kelompok komoditas tersebut mengalami peningkatan laju inflasi di Kota Kudus, sementara di Provinsi Jawa Tengah justru mengalami perlambatan laju inflasi. Peningkatan laju inflasi tertinggi terjadi pada kelompok barang dan jasa pakaian dan alas kaki. Kelompok barang dan jasa tersebut mengalami kenaikan indeks harga dari 0,23% (yoy) pada triwulan I 2020 menjadi 3,97% (yoy) pada triwulan laporan. Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang kenaikan indeks harga pada kelompok barang dan jasa pakaian dan alas kaki, antara lain baju muslim pria, sandal kulit wanita, dan sepatu anak. Peningkatan indeks harga tertinggi terjadi pada komoditas baju muslim pria yang tercatat sebesar 20% (yoy).

3.3.5. Disagregasi Inflasi Kota Tegal

Kota Tegal mencatatkan peningkatan laju inflasi ketiga tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Pada triwulan laporan inflasi di kota ini tercatat sebesar 2,42% (yoy), melambat

dibandingkan realisasi pada triwulan I 2020 yang mencapai 3,53% (yoy). Perkembangan indeks harga komoditas di Tegal secara umum selaras dengan Provinsi Jawa Tengah. Perlambatan laju inflasi utamanya bersumber dari penurunan indeks harga pada kelompok barang dan jasa makanan, minuman, dan tembakau. Pada triwulan laporan indeks harga kelompok barang dan jasa tersebut mengalami penurunan sebesar 3,65% menjadi 2,90% (yoy). Penurunan indeks harga tersebut didorong oleh penurunan harga pada beberapa komoditas utama, diantaranya cabai merah, cabai rawit, cabai hijau, dan bawang putih. Dari empat komoditas tersebut cabai merah merupakan komoditas yang mengalami penurunan indeks harga paling dalam, yaitu sebesar 58,64% (yoy). Kemudian bawang putih yang mengalami penurunan indeks harga sebesar 42,26% (yoy). Sementara cabai rawit dan cabai hijau masing-masing mengalami penurunan indeks harga sebesar 32,97% (yoy) dan 27,91% (yoy). Indikasi penurunan harga komoditas aneka cabai dan bawang putih tersebut selaras dengan yang terjadi di provinsi Jawa Tengah seiring dengan melimpahnya pasokan komoditas tersebut pada triwulan laporan.

Tabel 3.9 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Tegal Berdasarkan Kelompok

INFLASI KELOMPOK (%; YOY)	JAWA TENGAH			TEGAL		
	I 2020	II 2020	UP/DOWN	I 2020	II 2020	UP/DOWN
UMUM	3.25	2.48	-0.77	3.53	2.42	-1.11
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	6.82	4.13	-2.69	6.55	2.90	-3.65
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	1.83	1.36	-0.47	2.81	4.27	1.45
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	3.09	3.26	0.17	0.89	0.80	-0.09
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	2.22	2.19	-0.03	2.90	2.50	-0.41
KESEHATAN	2.61	2.19	-0.43	4.25	6.13	1.88
TRANSPORTASI	1.00	0.47	-0.54	0.69	1.49	0.80
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	0.07	-0.20	-0.28	-0.50	0.27	0.77
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	1.50	1.29	-0.21	5.17	2.66	-2.51
PENDIDIKAN	-0.71	-0.68	0.03	1.55	1.48	-0.08
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	2.70	1.68	-1.02	5.04	3.61	-1.43
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	5.15	6.26	1.12	4.85	4.23	-0.62

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Apabila dicermati lebih lanjut terdapat beberapa kelompok barang dan jasa yang pergerakan indeks harganya tidak selaras dengan Provinsi Jawa Tengah.

Kelompok barang dan jasa tersebut antara lain: pakaian dan alas kaki; kesehatan; transportasi; dan informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Kelompok barang dan jasa tersebut mengalami peningkatan laju inflasi di Kota Tegal, sementara di Provinsi Jawa Tengah justru mengalami perlambatan laju inflasi. Peningkatan laju inflasi tertinggi terjadi pada kelompok barang dan jasa kesehatan, dimana pada triwulan laporan tercatat mengalami peningkatan indeks harga sebesar 6,13% (yoy). Sementara itu peningkatan indeks harga terendah terjadi pada kelompok barang dan jasa informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,27% (yoy).

3.3.6. Disagregasi Inflasi Kota Purwokerto

Kota Purwokerto juga mengalami perlambatan laju inflasi pada triwulan laporan. Inflasi tahunan Kota Purwokerto tercatat sebesar 2,55% (yoy), melambat dibandingkan triwulan I 2020 yang tercatat sebesar 2,81% (yoy). Sejalan dengan mayoritas kota lain di Jawa Tengah, melambatnya tekanan inflasi didorong oleh perlambatan laju inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Tercatat inflasi tahunan kelompok barang dan jasa tersebut sebesar 5,16% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan I 2020 yang mencapai 6,22% (yoy). Perlambatan peningkatan indeks harga ini pada kelompok barang dan jasa tersebut bersumber dari penurunan indeks harga pada komoditas cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih. Penurunan indeks harga tertinggi terjadi pada komoditas cabai merah yang tercatat sebesar 48,16% (yoy). Sementara penurunan indeks harga bawang putih tercatat sebesar

35,70% (yoy) dan penurunan indeks harga cabai rawit tercatat sebesar 27,55% (yoy).

3.4. TRACKING DAN PROYEKSI INFLASI

3.4.1. Inflasi Juli 2020

Pada Juli 2020, Provinsi Jawa Tengah mengalami deflasi sebesar -0,09% (mtm), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 0,20% (mtm). Realisasi tersebut merupakan terendah dibandingkan rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 0,49% (mtm). Tren perlambatan laju inflasi Jawa Tengah ini sejalan dengan perkembangan di tingkat nasional yang mencatatkan deflasi sebesar -0,10% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, inflasi Jawa Tengah pada tahun berjalan sebesar 0,73% (ytd) lebih rendah daripada inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,98% (ytd). Namun demikian, secara tahunan inflasi Jawa Tengah sebesar 2,08% (yoy) masih lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,54% (yoy).

Deflasi yang terjadi pada Juli 2020 bersumber dari penurunan harga kelompok barang dan jasa makanan, minuman, dan tembakau, kelompok barang dan jasa transportasi, kelompok barang dan jasa informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, serta kelompok barang dan jasa pendidikan. Kelompok barang dan jasa makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar terhadap deflasi pada bulan Juli 2020, yaitu -0,16% (mtm) dengan penurunan indeks harga sebesar -0,66% (mtm). Selanjutnya kelompok barang dan jasa transportasi memberikan andil sebesar -0,03% terhadap deflasi dengan penurunan indeks harga sebesar -0,25% (mtm). Sejalan dengan itu kelompok barang dan jasa informasi, komunikasi, dan jasa keuangan serta kelompok barang dan jasa

Tabel 3.10 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Purwokerto Berdasarkan Kelompok

INFLASI KELOMPOK (%; YOY)	JAWA TENGAH			PURWOKERTO		
	I 2020	II 2020	UP/DOWN	I 2020	II 2020	UP/DOWN
UMUM	3.25	2.48	-0.77	2.81	2.55	-0.27
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	6.82	4.13	-2.69	6.22	5.16	-1.07
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	1.83	1.36	-0.47	1.14	0.84	-0.30
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	3.09	3.26	0.17	1.05	1.57	0.52
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	2.22	2.19	-0.03	3.71	3.42	-0.29
KESEHATAN	2.61	2.19	-0.43	2.47	2.37	-0.11
TRANSPORTASI	1.00	0.47	-0.54	1.51	1.31	-0.20
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	0.07	-0.20	-0.28	0.23	-0.37	-0.60
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	1.50	1.29	-0.21	0.78	0.75	-0.03
PENDIDIKAN	-0.71	-0.68	0.03	-3.46	-3.49	-0.03
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	2.70	1.68	-1.02	2.39	2.22	-0.17
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	5.15	6.26	1.12	5.83	6.54	0.71

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

pendidikan memiliki andil yang sama terhadap deflasi, yaitu sebesar -0,01% (mtm) dengan penurunan indeks harga masing-masing adalah -0,23% (mtm) dan -0,14% (mtm).

Sumber deflasi dari kelompok barang dan jasa makanan, minuman, dan tembakau adalah sub-kelompok makanan. Deflasi pada sub-kelompok ini tercatat sebesar -0,92% (mtm), berbalik arah dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,70% (mtm). Terjadinya deflasi bersumber dari penurunan harga pada beberapa komoditas utama, diantaranya: bawang merah, bawang putih, dan daging ayam ras. Penurunan indeks harga bawang merah tercatat sebesar -23,69% (mtm), merupakan yang pertama terjadi sejak Bulan Februari lalu. Penurunan harga tersebut disebabkan oleh peningkatan pasokan bawang merah seiring dengan masa panen pada daerah sentra produksi di Kabupaten Brebes, Pati, dan Demak. Demikian halnya dengan penurunan harga bawang putih yang terus berlanjut sejak Bulan Maret 2020. Tercatat penurunan indeks harga pada bawang putih pada Bulan Juli 2020 sebesar -11,74% (mtm). Penurunan harga tersebut didorong oleh peningkatan pasokan bawang putih lokal karena masa panen yang sedang berlangsung pada daerah sentra penghasil. Sementara itu, penurunan harga daging ayam ras menandakan persoalan pasokan yang terjadi selama dua bulan berturut-turut dari Bulan Mei hingga Juni sudah mulai teratasi. Harga daging ayam ras pada Bulan Juli 2020 mengalami penurunan indeks harga sebesar -3,12% (mtm).

Kemudian deflasi pada kelompok transportasi bersumber dari sub-kelompok jasa angkutan penumpang. Indeks harga pada sub-kelompok jasa angkutan penumpang menurun dari 0,61% (mtm) pada bulan lalu menjadi -2,42% (mtm) pada bulan Juli 2020. Deflasi yang terjadi pada sub-kelompok tersebut bersumber dari penurunan tarif angkutan udara, angkutan antar kota, dan kendaraan travel. Penurunan indeks harga tertinggi terjadi pada jasa angkutan udara yang tercatat sebesar -8,54% (mtm), semakin dalam dari bulan sebelumnya yang mencatatkan penurunan indeks harga sebesar -3,93% (mtm). Hal ini disebabkan oleh faktor mulai kembali normalnya aktivitas penerbangan pasca relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada bulan lalu dan penerapan strategi oleh maskapai yang menurunkan harga tiket untuk meningkatkan *load factor* selama masa pandemi COVID-19.

Lebih lanjut, deflasi yang terjadi pada kelompok barang dan jasa informasi, komunikasi, dan jasa keuangan bersumber dari sub-kelompok peralatan informasi dan komunikasi. Penurunan indeks harga pada sub-kelompok tersebut tercatat sebesar -0,91% (mtm), semakin dalam dari bulan sebelumnya yang hanya sebesar -0,03% (mtm). Barang dan jasa yang berkontribusi terhadap penurunan indeks harga sub-kelompok ini, diantaranya: telepon seluler, laptop/notebook, printer, dan flash disk. Penurunan harga tertinggi terjadi pada telepon seluler yang mencatatkan penurunan indeks harga sebesar -1,33% (mtm) kemudian printer dan notebook/laptop yang mencatatkan penurunan indeks harga masing-masing sebesar -0,15% (mtm) dan -0,08% (mtm). Penurunan harga pada barang-barang peralatan informasi dan komunikasi tersebut merupakan faktor musiman seiring dengan kebijakan produsen/Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dari barang-barang tersebut mengeluarkan berbagai program promo harga menjelang masuknya tahun ajaran baru sekolah dan perkuliahan.

Berikutnya deflasi yang terjadi pada kelompok pendidikan bersumber dari sub-kelompok pendidikan dasar dan anak usia dini serta sub-kelompok pendidikan menengah. Penurunan indeks harga tertinggi terjadi pada sub-kelompok pendidikan dasar dan anak usia dini yang tercatat sebesar -0,38% (mtm) kemudian diikuti oleh sub-kelompok pendidikan menengah yang mencatatkan penurunan indeks harga sebesar -0,15% (mtm). Barang dan jasa yang memberikan andil terhadap penurunan indeks harga pada sub-kelompok pendidikan dasar dan anak usia dini adalah taman kanak-kanak dan kelompok bermain. Sementara barang dan jasa yang memberikan andil terhadap penurunan indeks harga pada sub-kelompok pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Atas yang tercatat sebesar -0,64% (mtm). Kebijakan beberapa sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melakukan penyesuaian biaya pendidikan karena proses belajar mengajar berlangsung di rumah menjadi faktor utama penurunan indeks harga pada kedua sub-kelompok tersebut.

Pada Bulan Juli 2020, seluruh kota pantauan mengalami deflasi dengan intensitas yang beragam. Deflasi tertinggi terjadi di Kota Purwokerto (-0,20%; mtm) yang diikuti oleh Kota Cilacap (-0,17%; mtm), kemudian Kota Semarang

(-0,10%; mtm), Kota Kudus (0,-09%; mtm), Kota Tegal (-0,05%; mtm), dan Kota Surakarta (-0,03%; mtm).

3.4.2. Inflasi Agustus 2020

Pada Bulan Agustus 2020 Provinsi Jawa Tengah terindikasi kembali mengalami deflasi secara bulanan.

Kondisi ini tercermin pada Survei Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan oleh Bank Indonesia Jawa Tengah. Hingga minggu ke IV Bulan Agustus 2020 Jawa Tengah terindikasi mengalami deflasi yang lebih dalam daripada bulan sebelumnya. Faktor pendorong terjadinya deflasi yang lebih dalam adalah berlanjutnya penurunan harga beberapa komoditas makanan utama, diantaranya daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, dan cabai merah. Penurunan harga tertinggi terjadi pada komoditas daging ayam ras dan penurunan harga terendah terjadi pada komoditas cabai merah.

Penurunan harga pada beberapa komoditas yang termasuk pada kelompok barang dan jasa makanan, minuman, dan tembakau yang masih berlanjut tersebut disebabkan oleh peningkatan pasokan ditengah permintaan yang masih terbatas. Pasokan daging ayam ras dan telur ayam ras kembali normal setelah pada bulan Juni lalu sempat mengalami kendala karena keterbatasan produksi seiring dengan penurunan pasokan *day old chicken* (DOC) pada peternak. Permasalahan pada bulan lalu tersebut dapat diatasi dan pasokan daging ayam ras dan telur ayam ras kembali normal kembali bahkan cenderung *over supply* seiring dengan masih rendahnya permintaan karena beberapa sektor usaha, seperti catering dan restoran belum beroperasi secara normal. Sejalan dengan itu, masa panen yang sedang berlangsung pada sentra penghasil bawang merah, diantaranya Brebes, Demak, dan Pati menyebabkan terjadi penurunan harga bawang merah.

3.4.3. Proyeksi Inflasi Provinsi Jawa Tengah Triwulan III 2020

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan III 2020 diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan triwulan II 2020. Perlambatan laju inflasi diperkirakan bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dan risiko inflasi diperkirakan bersumber dari kelompok barang dan jasa perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Kelompok Makanan Minuman, dan Tembakau diperkirakan akan menjadi faktor utama penahan laju inflasi pada triwulan III 2020.

Beberapa faktor yang menahan laju inflasi kelompok barang dan jasa ini adalah masuknya musim panen komoditas pangan utama, yaitu bawang merah. Diperkirakan pada Bulan Juli hingga September menjadi puncak musim panen di Provinsi Jawa Tengah, sehingga pasokan bawang merah diperkirakan akan meningkat. Lebih lanjut komoditas lain yang diperkirakan akan menahan laju inflasi adalah daging ayam ras dan telur ayam ras seiring dengan kembali meningkatnya produksi komoditas tersebut yang cenderung *over supply* ditengah keterbatasan permintaan daya beli masyarakat yang tertekan akibat menurunnya pendapatan masyarakat.

Disisi lain faktor risiko yang berpotensi mendorong tekanan inflasi diperkirakan bersumber dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Komoditas yang diperkirakan menjadi sumber peningkatan laju inflasi adalah emas perhiasan seiring dengan tren peningkatan harga emas global karena ketidakpastian yang terjadi di pasar keuangan mendorong investor mengalihkan asetnya kepada aset safe heaven yaitu emas.

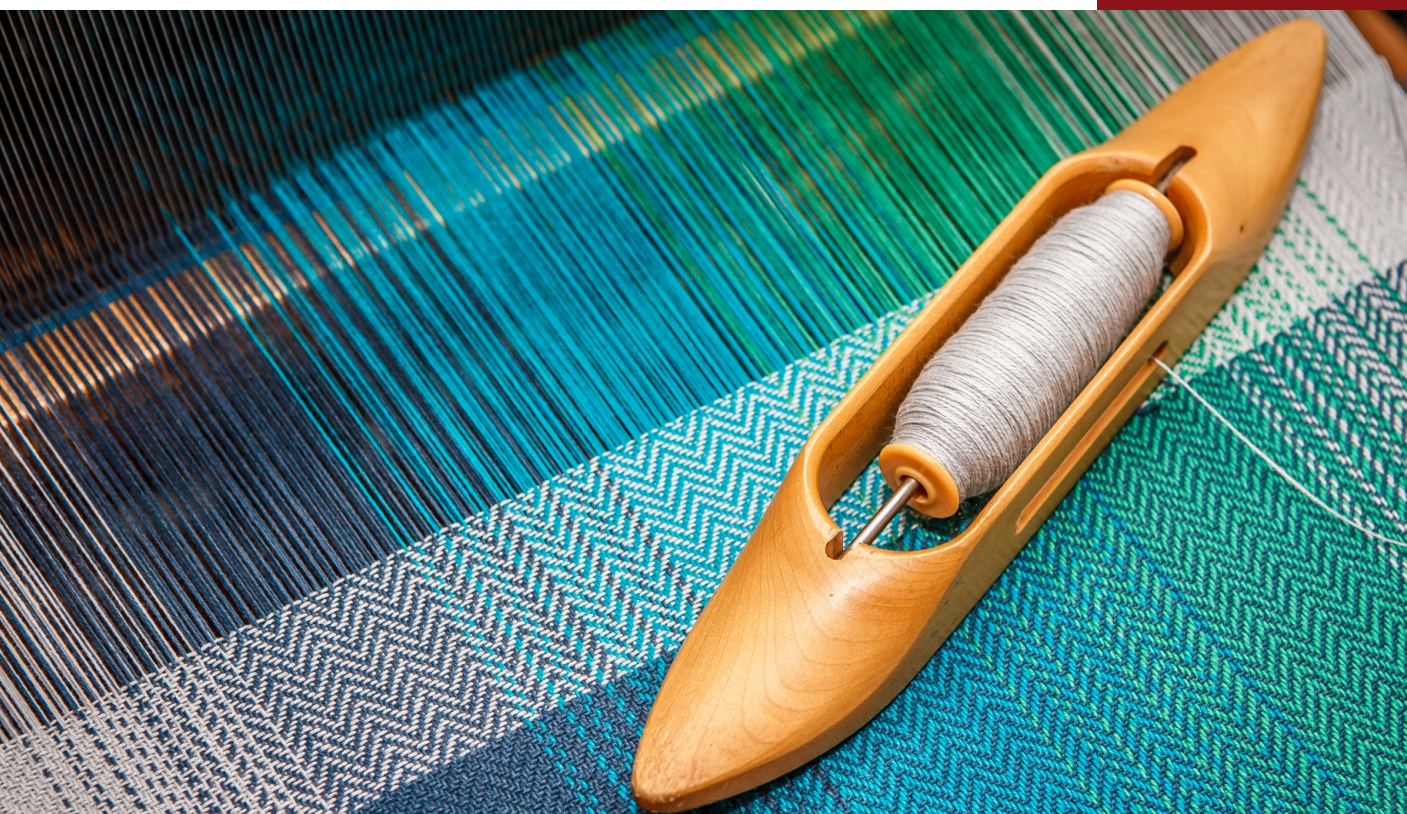
3.5. PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Dalam rangka pengendalian harga barang dan jasa, Bank Indonesia selalu berkoordinasi secara aktif dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan beberapa program kegiatan yang telah dijalankan selama triwulan laporan, diantaranya:

1. *Training of trainers* MUI mengenai belanja bijak. Hal ini dilakukan agar ulama dapat turut mensosialisasikan belanja bijak kepada masyarakat memasuki bulan suci Ramadan.
2. Penyelenggaraan Pasar Mitra Tani pada hari Senin, Rabu, dan Jumat selama triwulan II 2020. Menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 kepada kab/kota se-Jawa Tengah.
3. TPID Jawa Tengah menyelenggarakan Rakorwil TPID Jawa Tengah yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 12 Juni 2020 dengan menghasilkan beberapa poin kesepakatan, sbb:

- a. Perbaikan Kualitas Pendataan Neraca Pangan;
 - b. Digitalisasi Pertanian Hulu dan Hilir;
 - c. Pengembangan Sislogda;
 - d. Inisiasi KAD;
 - e. Antisipasi musim kemarau berikutnya dengan merencanakan produksi pertanian.
5. Koordinasi kerja sama antar daerah dengan Perusda Kalimantan Timur terkait komoditas cabai merah dan bawang merah.
 6. Melakukan evaluasi penerapan Sistem Informasi Logistik Daerah (Sislogda) dan pemantauan secara berkala terkait pengembangan kelembagaan petani dan penerapan sistem resi gudang terhadap Badan Usaha Milik Petani PT. Pengayom Tani Sejagad.
 7. Melakukan pendataan neraca pangan secara rutin setiap minggu.
 8. Optimalisasi digitalisasi pertanian hulu melalui aplikasi Jateng Agromap yang melakukan pendataan lahan tanam petani di 17 Kabupaten/Kota dengan fitur *geotagging location*.
 9. Melakukan pemetaan kerja sama antar daerah bersama Disperindag Kota Semarang.





STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN, DAN UMKM

Kerentanan pelaku ekonomi di Jawa Tengah, baik korporasi maupun perseorangan mengalami peningkatan sejalan dengan lesunya kondisi ekonomi di tingkat nasional maupun global. Hal ini mengakibatkan kinerja intermediasi perbankan di Jawa Tengah mengalami penurunan sejalan dengan kinerja perekonomian yang tumbuh melambat.

- Ditinjau dari sisi lapangan usaha, perlambatan penyaluran kredit terutama bersumber dari pelemahan kinerja lapangan usaha perdagangan besar & eceran serta lapangan usaha industri pengolahan. Sejalan dengan hal tersebut, kualitas kredit kembali menurun, seiring dengan berlanjutnya tekanan eksternal terhadap kinerja penjualan korporasi di Jawa Tengah.
- Perlambatan lapangan usaha utama di Jawa Tengah yang bersifat padat karya, berdampak lanjutan terhadap penurunan daya beli dan ketahanan keuangan rumah tangga. Kemampuan daya beli primer untuk kebutuhan tempat tinggal menunjukkan penurunan yang signifikan, baik dari kuantitas maupun kualitasnya.

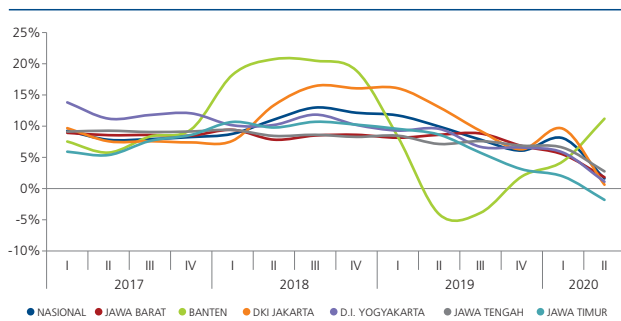


Walaupun beberapa indikator mengalami penurunan kinerja, secara umum ketahanan sistem keuangan Jawa Tengah pada triwulan II 2020 masih relatif terjaga. Ditinjau dari sisi lapangan usaha, perlambatan penyaluran kredit perbankan bersumber dari pelemahan kinerja lapangan usaha industri pengolahan maupun perdagangan besar & eceran seiring dengan pembatasan kegiatan aktivitas masyarakat yang drastis pada triwulan II 2020. Sementara itu, kinerja penyaluran kredit lapangan usaha utama lainnya yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan tercatat mengalami perbaikan ditopang oleh peningkatan penyerapan kredit modal kerja. Sejalan dengan permintaan konsumsi baik di domestik maupun global yang mengalami kelesuan, tekanan arus kas pada korporasi semakin meningkat sehingga berdampak pada kualitas kredit pada indust

Selanjutnya, permintaan rumah tangga (RT) yang melambat pada triwulan laporan turut mendorong pertumbuhan kredit yang disalurkan oleh perbankan. Dari total kredit konsumsi yang disalurkan oleh perbankan, sebesar 29,60% disalurkan kepada rumah tangga untuk pembiayaan KPR, multiguna, dan KKB, dengan risiko masing-masing kredit masih terjaga di bawah batas yang dipersyaratkan oleh otoritas.

4.1. KONDISI UMUM PERBANKAN³ JAWA TENGAH

Pada triwulan II 2020, seluruh indikator perbankan di Jawa Tengah menunjukkan penurunan kinerja. Dibandingkan triwulan I 2020, komponen kredit, dana pihak ketiga, serta aset mengalami perlambatan pertumbuhan, sehingga rasio intermediasi *loan to deposit ratio* (LDR) mengalami penurunan. Selanjutnya, kualitas penyaluran kredit juga mengalami peningkatan risiko, terindikasi dari rasio *non performing loan* (NPL) yang menunjukkan peningkatan.

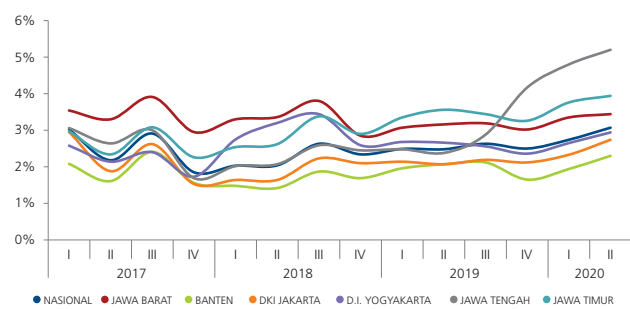


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan di Pulau Jawa

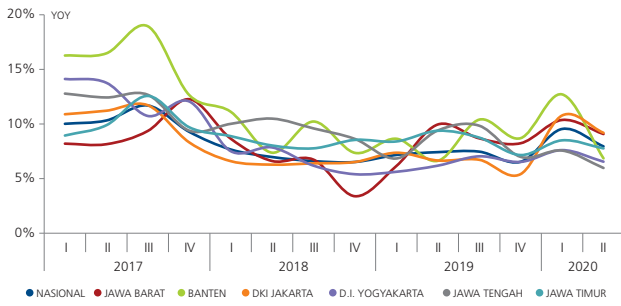
Penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah tercatat sebesar Rp295,46 Triliun, menunjukkan pertumbuhan yang melambat (2,75%; yoy) dibandingkan triwulan lalu (6,88%; yoy). Penurunan kinerja kredit di Jawa Tengah juga berlangsung pada kontributor perekonomian lainnya di kawasan Jawa, khususnya provinsi Jawa Barat dan provinsi Jawa Timur yang telah mengalami perlambatan penyaluran kredit sejak semester II 2019. Perlambatan penyaluran kredit juga berlangsung di tingkat nasional serta kawasan Jawa secara umum dengan hanya provinsi Banten yang menunjukkan peningkatan penyaluran kredit pada periode laporan. Capaian penyaluran kredit perbankan di Jawa Tengah maupun provinsi lainnya di kawasan Jawa pada triwulan laporan berada di bawah target penyaluran kredit yaitu sebesar 10%-12%.

Sejalan dengan penurunan kinerja penyaluran kredit, paparan risiko terhadap perbankan juga relatif meningkat. Perkembangan rasio NPL tercatat mengalami peningkatan baik tingkat nasional maupun seluruh provinsi di kawasan Jawa. Provinsi Jawa Tengah mencatatkan peningkatan risiko tertinggi di kawasan Jawa, dengan rasio NPL tercatat sebesar 5,20% pada triwulan II 2020, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,80%. Peningkatan risiko kredit yang berlangsung di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur khususnya disebabkan oleh peningkatan rasio NPL pada komponen kredit modal kerja yang disalurkan pada industri pengolahan. *Liaison* Bank Indonesia berhasil menyimpulkan bahwa hal tersebut sebagai dampak lesunya permintaan hasil produksi industri pengolahan, yang berlangsung baik pada komponen permintaan ekspor maupun permintaan domestik di masa pandemik COVID-19. Selanjutnya, melambatnya permintaan ekspor industri pengolahan pada periode perang dagang AS dan Tiongkok juga telah menekan arus kas pada industri pengolahan sejak awal tahun 2019.



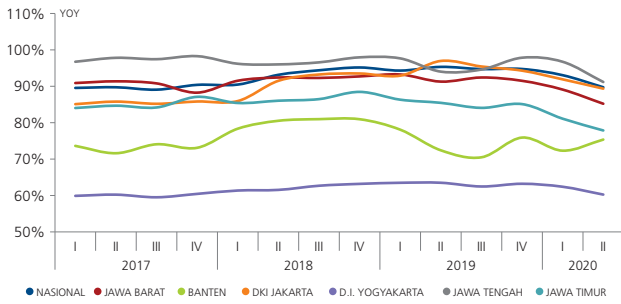
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.2 Perkembangan Rasio Non-Performing Loan (NPL) Kredit Perbankan di Pulau Jawa



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.3 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan di Jawa Tengah

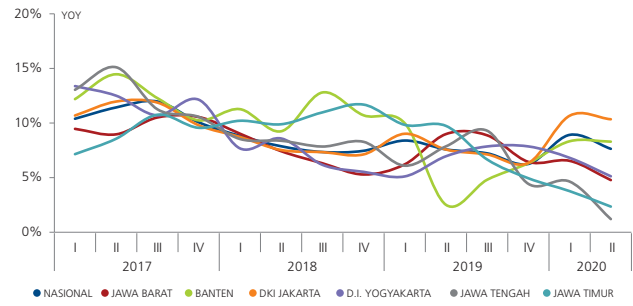


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.5 Perkembangan Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) Perbankan Jawa Tengah

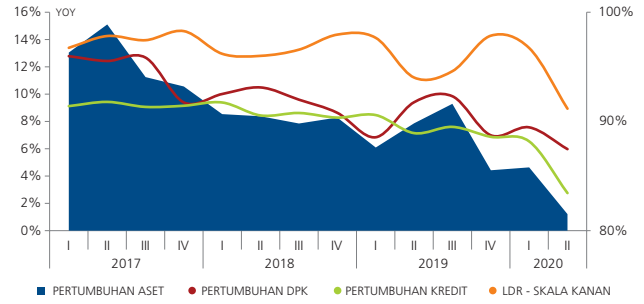
Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terhimpun oleh perbankan Jawa Tengah pada triwulan II 2020 tercatat sebesar Rp324,09 triliun atau tumbuh sebesar 5,97% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan lalu yang tercatat tumbuh sebesar 7,57% (yoy). Perlambatan ini sejalan dengan kinerja penghimpunan DPK perbankan di kawasan Jawa yang seluruhnya mencatatkan pertumbuhan di triwulan laporan yang lebih rendah dibandingkan triwulan lalu. Pertumbuhan DPK perbankan di Jawa Tengah adalah yang terendah di kawasan Jawa, diikuti oleh perbankan di Provinsi DI Yogyakarta yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,55% (yoy) pada triwulan laporan. Kinerja pertumbuhan DPK di kawasan Jawa maupun di tingkat nasional masih ditopang oleh komponen tabungan yang meningkat, sementara komponen deposito terus mengalami penurunan. Kondisi ini terutama terjadi tidak hanya pada perbankan di Jawa Tengah, namun juga terjadi pada perbankan di DKI Jakarta, Jawa Timur, serta DI Yogyakarta.

Aset perbankan Jawa Tengah tercatat sebesar Rp398,22 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,20% (yoy); tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan lalu (4,64%; yoy). Secara spasial, pertumbuhan aset perbankan di Jawa



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.4 Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

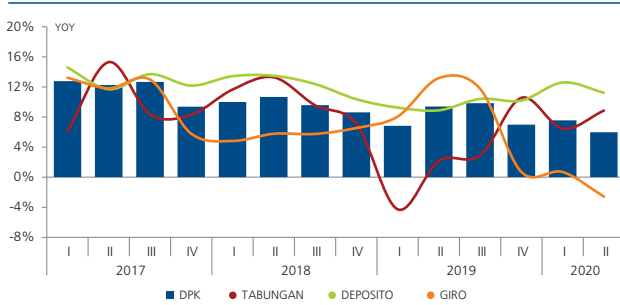
Grafik 4.6 Perkembangan Pertumbuhan Indikator Perbankan Jawa Tengah

Tengah adalah yang terendah dibanding pertumbuhan aset di Provinsi lainnya di Pulau Jawa yang seluruhnya mencatatkan perlambatan kinerja aset. Perlambatan pertumbuhan yang signifikan pada komponen kredit secara langsung menurunkan peran intermediasi perbankan di Jawa Tengah, tercermin dari *loan-to-deposit* (LDR) yang mengalami penurunan menjadi sebesar 91,17%. Perkembangan LDR kawasan Jawa secara umum mencatatkan penurunan LDR pada triwulan laporan, dengan perbankan di DI Yogyakarta masih menjadi yang terendah di tingkat 60,25%.

4.1.1. PERKEMBANGAN BANK UMUM

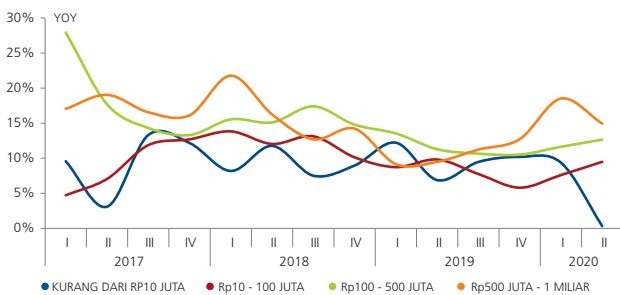
4.1.1.1. Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Pertumbuhan DPK pada triwulan II 2020 mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, utamanya disebabkan oleh kinerja komponen deposito yang terus mencatatkan penurunan hingga mengalami kontraksi, yang pertama kali sejak tahun 2013. Sementara itu kinerja komponen giro relatif menjaga kinerja penghimpunan dana oleh perbankan, dengan mencatatkan pertumbuhan pada triwulan laporan.

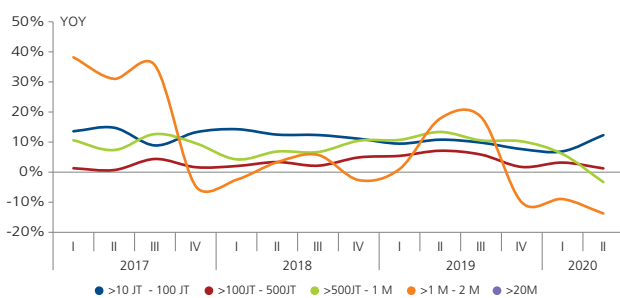


Grafik 4.7 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan Jawa Tengah

Pada II 2020, komponen tabungan mengalami pertumbuhan sebesar 11,24% (yoy); melambat dari sebesar 12,60% (yoy) pada triwulan I 2020. Komponen tabungan perbankan Jawa Tengah masih didominasi oleh nasabah dengan rentang nilai simpanan Rp10-100 juta (pangsa 35,75%) dan diikuti oleh kelompok rentang nilai simpanan Rp100-500 juta (pangsa 28,80%). Kedua kelompok tersebut masih menjadi penopang pertumbuhan komponen tabungan dengan mencatatkan pertumbuhan masing-masing menjadi sebesar 9,49% (yoy) dan 12,64% (yoy) pada triwulan laporan. Hal yang menjadi perhatian adalah terdapat lonjakan peningkatan pada komponen tabungan kelompok nilai lebih dari Rp20 miliar, yang mencatatkan pertumbuhan mencapai 46,70% (yoy).



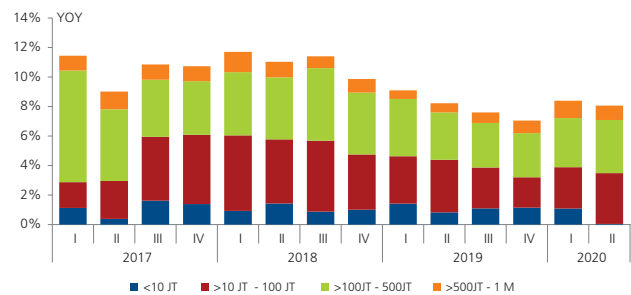
Grafik 4.8 Perkembangan Pertumbuhan Tabungan Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai



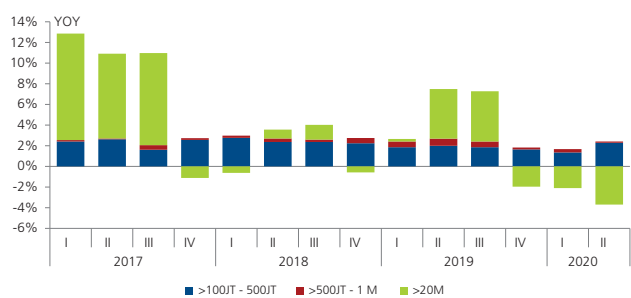
Grafik 4.10 Perkembangan Pertumbuhan Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai

Kinerja komponen simpanan berjangka atau deposito pada perbankan Jawa Tengah terus mengalami penurunan dengan mencatatkan kontraksi sebesar 2,57% (yoy) pada triwulan II 2020, terendah sejak tahun 2013. Komponen deposito didominasi oleh deposan dengan nilai lebih dari Rp20 miliar (pangsa 21,21%), serta kelompok nilai Rp 100-500 juta (pangsa 20,84%). Kinerja penghimpunan deposito beragam pada tiap kelompok, dengan kelompok-kelompok nilai besar cenderung mengalami kontraksi, khususnya pada kelompok nilai lebih dari Rp20 miliar yang melanjutkan tren kontraksi sejak triwulan IV 2020, yaitu sebesar -13,74% (yoy) pada triwulan laporan ini. Penurunan ini terutama berlangsung pada sektor swasta, baik perseorangan maupun lembaga non keuangan, yang mengindikasikan preferensi nasabah terhadap produk DPK yang lebih likuid.

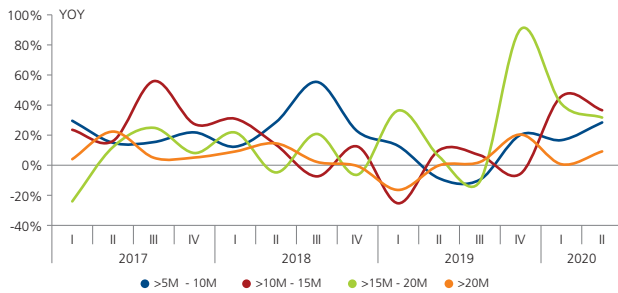
Sementara itu, pertumbuhan giro perbankan di Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 terpantau meningkat dari 6,46% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 8,86% (yoy) pada triwulan II 2020. Komponen giro didominasi oleh kelompok nilai lebih dari Rp20 miliar (pangsa 44,96%), serta kelompok nilai Rp2-5 miliar (pangsa 14,41%). Peningkatan kinerja pada komponen giro khususnya berlangsung pada kelompok nilai



Grafik 4.9 Andil Pertumbuhan Tabungan Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai



Grafik 4.11 Andil Pertumbuhan Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai



Grafik 4.12 Perkembangan Pertumbuhan Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai

Sumber: Bank Indonesia, diolah

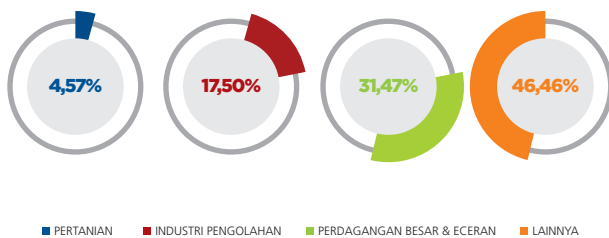
lebih dari Rp20 miliar, dengan tumbuh sebesar 9,18% (yoy) pada triwulan II 2020, meningkat signifikan dibandingkan 0,66% (yoy) pada triwulan lalu.

4.1.1.2. Penyaluran Kredit

Kinerja kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan II 2020 masih mencatatkan pertumbuhan, walau melambat dibandingkan triwulan lalu. Penyaluran kredit perbankan di Jawa Tengah pada triwulan I 2020 tercatat sebesar Rp295,46 Triliun atau bertumbuh 2,75% (yoy); melambat signifikan dibandingkan triwulan lalu (6,54%; yoy).

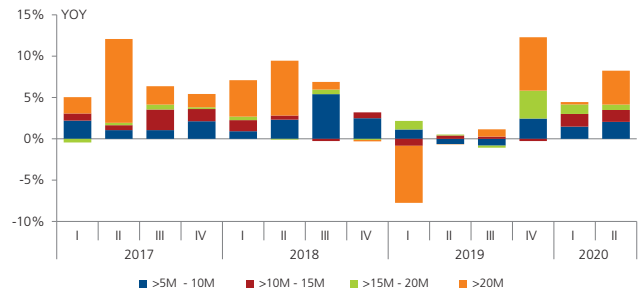
Ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah masih berfokus pada sektor utama, antara lain sektor perdagangan besar dan eceran dengan pangsa 31,47% dari total nilai kredit. Sektor utama lainnya yaitu industri pengolahan, memiliki pangsa kredit sebesar 17,50% diikuti oleh sektor pertanian yang memiliki pangsa 4,57%. Pangsa penyaluran kredit pada sektor pertanian tersebut masih terus tumbuh signifikan sejak tahun 2019, menunjukkan pembiayaan pada lapangan usaha pertanian memiliki potensi untuk diperluas.

Apabila ditinjau berdasarkan penggunaan, penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan II 2020 masih



Grafik 4.14 Pangsa Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Lapangan Usaha

Sumber: Bank Indonesia, diolah

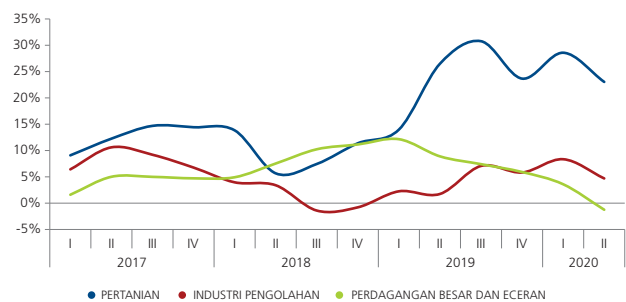


Grafik 4.13 Andil Pertumbuhan Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai

Sumber: Bank Indonesia, diolah

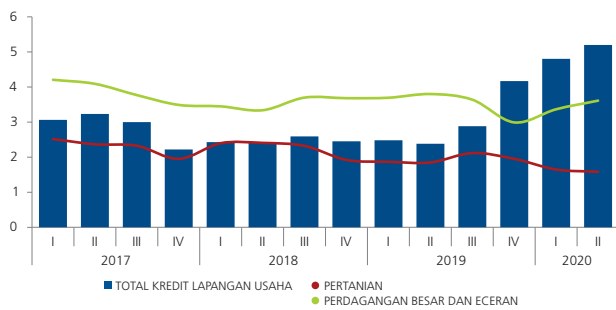
didominasi oleh kredit modal kerja dengan pangsa 53,37%. Sementara itu, kredit konsumsi dan kredit investasi menempati urutan kedua dan ketiga dengan pangsa masing-masing sebesar 29,76% dan 16,87% dari total kredit yang disalurkan oleh perbankan yang berlokasi di Jawa Tengah. Perlambatan penyaluran kredit perbankan di Jawa Tengah berlangsung pada seluruh kelompok kredit berdasarkan jenis penggunaan. Melambatnya realisasi kredit pada triwulan laporan terutama berlangsung pada kredit modal kerja dari 6,38% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 1,77% (yoy). Sementara itu, kredit investasi dan kredit konsumsi juga mencatatkan perlambatan dengan masing-masing mencatatkan pertumbuhan menjadi 4,24% (yoy) dan 3,71% (yoy) pada triwulan II 2020, dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,85% (yoy) dan 5,54% (yoy).

Berdasarkan pengelompokan nilai, dapat terlihat bahwa persentase kredit di bawah Rp500 juta memiliki pangsa sebesar 52,06% dari total kredit yang disalurkan di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa nominal penyaluran merata. Namun, ditinjau dari aspek sebaran jumlah debitur dan nominal kredit, penyaluran kredit di Jawa Tengah sebagian besar masih dikuasai oleh debitur dengan nominal kredit di atas Rp500 juta. Hal tersebut terlihat dari 1,35%



Grafik 4.15 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor

Sumber: Bank Indonesia, diolah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.16 Perkembangan Rasio NPL Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor

Tabel 4.1 Pengelompokan Kredit Berdasarkan Nilai

KREDIT	NOMINAL (RP MILIAR)	JUMLAH REKENING	PERSENTASE NOMINAL	PERSENTASE REKENING
0-100 JUTA	69,850	3,221,171	23.64%	85.44%
100-500 JUTA	83,911	498,383	28.40%	13.22%
500 JT - 1 M	14,334	24,161	4.85%	0.64%
>1 M	127,367	26,597	43.11%	0.71%
TOTAL	295,461	3,770,312	100.00%	100.00%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

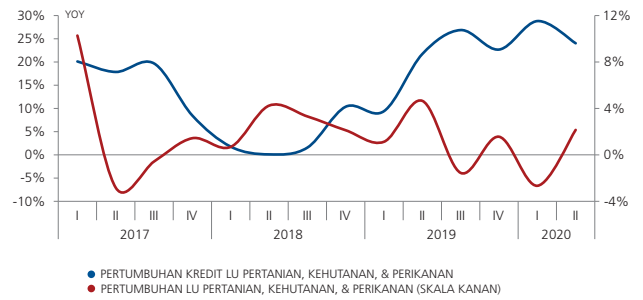
debitur dengan realisasi kredit di atas Rp500 juta, memiliki pangsa nominal kredit hingga mencapai 47,96% dari keseluruhan nominal kredit Jawa Tengah. Berdasarkan data triwulan II 2020, mayoritas debitur kredit di atas Rp 1 Miliar merupakan golongan debitur sektor swasta non lembaga keuangan.

4.2. RISIKO KETAHANAN SISTEM KEUANGAN DAERAH DI JAWA TENGAH

4.2.1. Ketahanan Lapangan Usaha Jawa Tengah Triwulan II 2020

Penyaluran kredit di Jawa Tengah⁴ tercatat sebesar Rp 361,37 triliun, atau tumbuh 7,67% (yoy). Pencapaian ini lebih rendah dibandingkan triwulan lalu yang terhitung sebesar 9,27% (yoy). Penyalurannya kredit non konsumsi masih didominasi ke lapangan usaha (LU) utama Jawa Tengah, yaitu LU perdagangan besar dan eceran (pangsa 26,60%), diikuti oleh LU industri pengolahan (pangsa 21,13%), LU konstruksi (pangsa 6,67%); serta LU pertanian, kehutanan, dan perikanan (pangsa 3,14%). Sejalan dengan kinerja penyalurannya, kredit produktif di Jawa Tengah mengalami peningkatan risiko. Hal ini tercermin dari rasio *non-performing loan* (NPL) yang meningkat, khususnya pada LU industri pengolahan.

4. Indikator kinerja perbankan ditinjau berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Jawa Tengah.

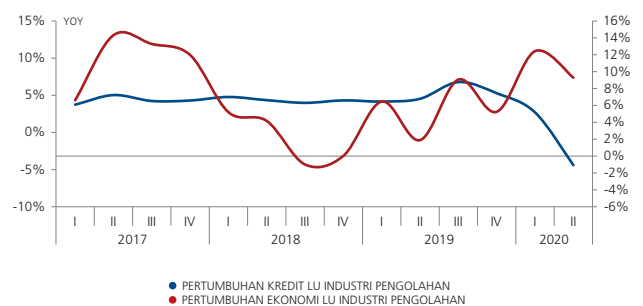


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.17 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Subsektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

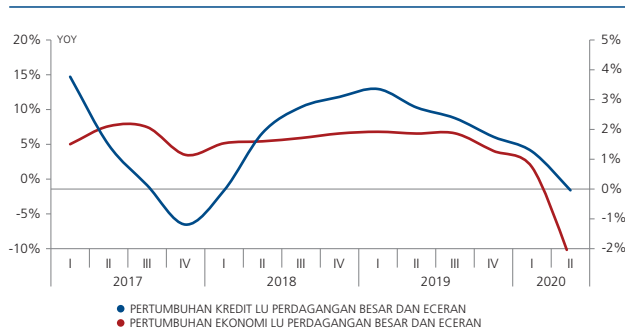
Secara umum, lapangan usaha industri pengolahan mengalami perlambatan penyaluran kredit pada triwulan II 2020, melanjutkan tren yang telah berlangsung sejak tahun 2018. Pertumbuhan realisasi kredit perbankan terhadap industri pengolahan di Jawa Tengah tercatat melambat dari sebesar 10,94% (yoy) pada triwulan I 2020, menjadi sebesar 7,37% (yoy) pada triwulan laporan. Penurunan realisasi kredit ini terutama berlangsung pada kredit modal kerja yang tercatat tumbuh sebesar 8,38% (yoy) pada triwulan II 2020; melambat signifikan dibandingkan triwulan lalu yang tercatat sebesar 11,97% (yoy).

Selanjutnya, kredit investasi juga mencatatkan pertumbuhan yang rendah, yaitu sebesar 3,57% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 4,28% (yoy). Perlambatan realisasi kredit investasi yang telah berlangsung sejak semester II 2019 diperkirakan sebagai langkah antisipasi korporasi terhadap melesunya permintaan domestik maupun ekspor dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator Survei Kegiatan Dunia



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.18 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Subsektor Industri Pengolahan



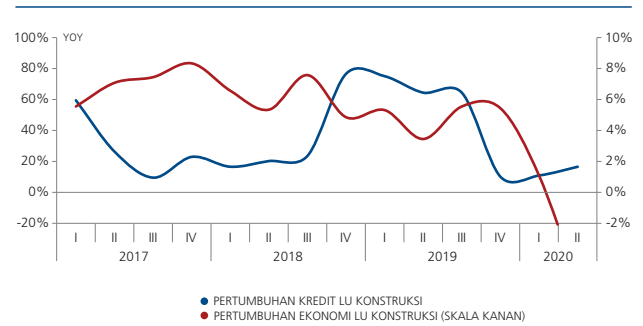
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.19 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, serta Risiko Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

Usaha (SKDU) dan *Liaison* yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha subsektor tekstil serta subsektor furnitur dan kayu olahan akan menunda kegiatannya pada tahun 2020-2021. Kredit yang disalurkan pada industri pengolahan juga terus mengalami peningkatan risiko yang telah berlangsung sejak tahun 2019 dan terus berlanjut sampai dengan triwulan II 2020.

Selanjutnya, kredit lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mencatatkan peningkatan penyaluran kredit yang tinggi dengan tumbuh sebesar 24,03% (yoy), walaupun terhitung relatif melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan lalu yang terhitung sebesar 28,81% (yoy). Tingginya penyaluran kredit pada LU pertanian, kehutanan, dan perikanan terutama berlangsung pada kredit modal kerja yang meningkat, sejalan dengan ekspektasi pelaku pertanian dan perkebunan terhadap kondisi iklim tahun 2020 yang lebih baik, setelah fenomena kekeringan panjang pada akhir tahun 2018 hingga awal tahun 2019.

Selanjutnya, penyaluran kredit pada LU perdagangan besar dan eceran melambat sejalan dengan kinerja pertumbuhan ekonominya. Nilai penyaluran kredit lapangan usaha perdagangan besar dan eceran di Jateng tercatat tumbuh sebesar -1,60% (yoy) pada triwulan laporan, melanjutkan tren kontraksi yang telah berlangsung sejak triwulan lalu sebesar 1,70% (yoy). Kredit modal kerja dengan pangsa mencapai 88% pada LU perdagangan besar dan eceran menjadi kontributor utama penurunan penyaluran kredit, dengan mencatatkan kontraksi sebesar 2,21% (yoy) pada triwulan II 2020, relatif memburuk dibandingkan 2,02% (yoy) pada triwulan lalu.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.20 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Konstruksi

Sejalan dengan hal tersebut, kualitas kredit pada LU perdagangan besar dan eceran juga menunjukkan penurunan, dengan mencatatkan rasio NPL sebesar 4,05% pada triwulan laporan, atau meningkat dibandingkan triwulan I 2020 yang tercatat sebesar 3,90%. Informasi yang diperoleh dari Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia menunjukkan bahwa tekanan penurunan kinerja LU perdagangan besar dan eceran terutama berlangsung pada perdagangan barang-barang sandang serta barang tersier lainnya, sebagai akibat penetapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah di Jawa Tengah maupun kawasan lainnya di Indonesia.

Sementara itu, penyaluran kredit di subsektor konstruksi masih relatif terjaga, dengan mencatatkan pertumbuhan terhitung sebesar 16,55% (yoy) pada triwulan I 2020, relatif stabil dibandingkan triwulan lalu yang tercatat sebesar 10,91% (yoy). Namun demikian, peningkatan realisasi kredit ini ditopang bukan oleh aktivitas konstruksinya, melainkan mencerminkan peningkatan aktivitas investasi peralatan oleh para pelaku usaha konstruksi. Hal ini terindikasi dari komponen kredit investasinya yang tumbuh 33,13% (yoy) pada triwulan II 2020; meningkat signifikan dibandingkan triwulan lalu sebesar 20,60% (yoy). Peningkatan risiko kredit ini terutama berlangsung pada komponen kredit modal kerja mengindikasikan bahwa menurunnya rasio likuiditas subsektor konstruksi akibat penundaan dan alokasi anggaran proyek pada masa penanganan pandemik COVID-19.

4.2.2. Kerentanan Sektor Rumah Tangga

4.2.2.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

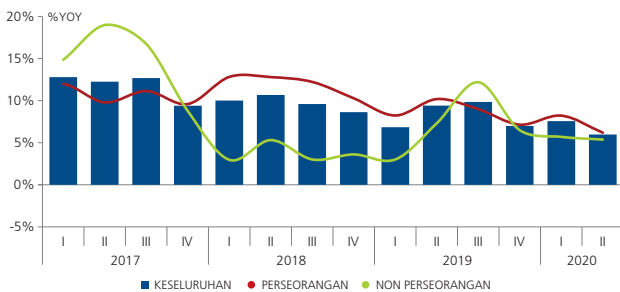
Rumah tangga (RT) memegang peranan besar terhadap perekonomian dan sistem keuangan Jawa Tengah. Konsumsi RT menyumbang $\pm 62\%$ dari total PDRB di Jawa Tengah.

Ditinjau dari sisi perbankan, Dana Pihak Ketiga (DPK) rumah tangga menyumbang 73,63% dari total DPK yang dihimpun oleh perbankan di Jawa Tengah pada triwulan II 2020. Berdasarkan jenisnya, komponen tabungan masih menjadi pembentuk utama DPK di Jawa Tengah dengan rasio sebesar 53,11%. Analisis lebih dalam mengindikasikan bahwa sekitar 0,06% depositan besar (dengan simpanan dana lebih dari Rp1 miliar) menguasai 29,10% dari total himpunan dana di tabungan serta deposito. Sementara itu, kredit konsumsi RT menyumbang 29,33% dari total kredit yang disalurkan oleh perbankan di Jawa Tengah. Kredit konsumsi menunjukkan akselerasi menjadi sebesar 2,99% (yoy) dengan kualitas NPL masih terjaga pada 1,54%. Penyaluran kredit konsumsi masih didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Multiguna.

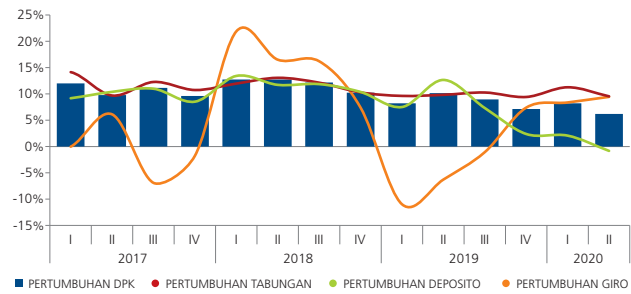
4.2.2.2. Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga/ Perseorangan (DPK RT) di Perbankan

Dana Pihak Ketiga (DPK) di Jawa Tengah yang berhasil dihimpun pada triwulan II 2020 tercatat sebesar Rp324,09 Triliun, didominasi oleh dana rumah tangga domestik sebesar Rp232,23 Triliun atau setara dengan pangsa 74,79% dari total DPK. Dana simpanan rumah tangga mengalami perlambatan menjadi sebesar 6,19% (yoy) pada triwulan laporan, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2020 (8,22% yoy).

Komposisi DPK rumah tangga pada triwulan II 2020 masih didominasi oleh tabungan (53,71%), deposito (33,17%), dan giro (13,12%). Tabungan mencatatkan pertumbuhan sebesar



Grafik 4.21 Perkembangan Pertumbuhan DPK, Perseorangan, dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah



Grafik 4.22 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Jawa Tengah Berdasarkan Komponennya

11,24% (yoy); lebih rendah dibandingkan triwulan lalu yang terhitung sebesar 12,60% (yoy). Sementara itu, deposito melanjutkan tren penurunannya yang telah berlangsung sejak semester II 2019, dengan mencatatkan kontraksi sebesar -2,57% (yoy).

Sejalan dengan pola historis, ditinjau berdasarkan kelompok nilai, ketergantungan perbankan Jawa Tengah terhadap nasabah perseorangan dengan kelompok nilai besar masih cukup tinggi. Tercatat pada triwulan II 2020, sebanyak 0,15% dari jumlah depositan perseorangan dengan nilai tabungan di atas Rp500 juta menyumbang 47,88% dari nilai keseluruhan tabungan perseorangan di Jawa Tengah.

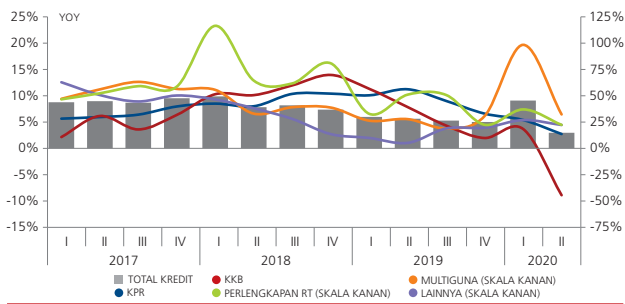
Tabel 4.2 Pengelompokan Tabungan Perseorangan Berdasarkan Nilainya

DPK	NOMINAL (RP MILIAR)	JUMLAH REKENING	PERSentase NOMINAL	PERSentase REKENING
0-100 JUTA	91,399	41,067,621	28.20%	98.95%
100-500 JUTA	77,516	374,040	23.92%	0.90%
500 JT - 1 M	24,080	32,569	7.43%	0.08%
>1 M	131,091	28,348	40.45%	0.07%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

4.2.2.3. Kredit Perseorangan di Perbankan

Pertumbuhan kredit konsumsi bagi rumah tangga (RT) di Jawa Tengah pada triwulan II 2020 mencatatkan peningkatan yang signifikan, dari sebelumnya tumbuh sebesar 9,10% (yoy) pada triwulan I 2020, menjadi sebesar 2,99% (yoy) pada triwulan laporan. Hal ini menjadi perhatian lebih lanjut dikarenakan laju realisasi kredit konsumsi RT yang mencatatkan kontraksi sebesar 4,16% (yoy) pada triwulan II 2020, mencerminkan kelesuan kinerja komponen konsumsi RT pada PDRB Jawa Tengah.

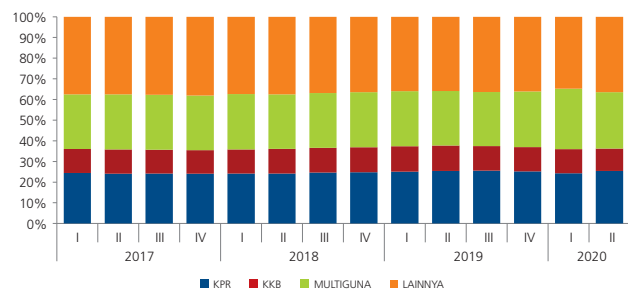


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.23 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah

Sesuai dengan historis, struktur kredit rumah tangga sebagian besar masih disalurkan dalam kredit multiguna, kredit pemilikan rumah (KPR), dan kredit kendaraan bermotor (KKB). Berdasarkan andilnya, perlambatan realisasi kredit RT pada triwulan II 2020 terutama disebabkan oleh kelompok kredit pemilikan rumah serta kelompok kredit multiguna. Pada triwulan laporan ini, realisasi KPR tercatat kontraksi sebesar 1,09% (yoy) atau terendah dalam 4 (enam) tahun terakhir. Selanjutnya, kualitas kredit rumah tangga juga memburuk, walaupun masih batas yang relatif terjaga, dengan rasio NPL tercatat sebesar 2,66% pada pada triwulan laporan ini.

Pada triwulan laporan, kredit kendaraan bermotor (KKB) mengalami kontraksi sebesar 2,73% (yoy), turun signifikan dibandingkan triwulan lalu (5,40%; yoy). Penyaluran KKB mayoritas ditujukan untuk membiayai kepemilikan mobil roda empat (73,17%) dan sepeda bermotor (22,89%). Penurunan kinerja penyaluran KKB terutama disebabkan oleh kelompok pembiayaan kendaraan mobil roda empat yang mencatatkan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.24 Perkembangan Pangsa Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah

kontraksi 5,50% (yoy) pada triwulan II 2020; jauh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,13% (yoy). Hasil liaison Bank Indonesia mengidentifikasi bahwa penurunan penghasilan masyarakat akibat lesunya sektor produksi, menyebabkan masyarakat memilih untuk menahan konsumsi barang tahan lama.

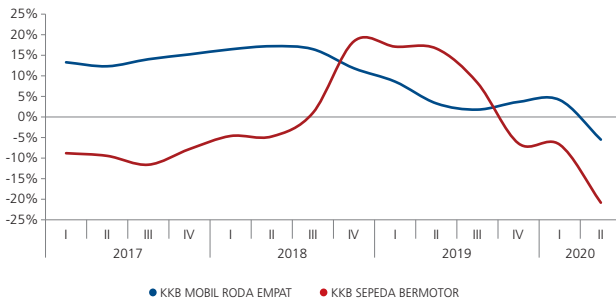
Secara agregat, kualitas kredit kendaraan bermotor (KKB) masih terjaga, walaupun mengalami peningkatan rasio NPL dari sebesar 1,47% pada triwulan lalu, menjadi sebesar 2,78% pada triwulan II 2020. Kualitas KKB relatif terjaga pada seluruh subkomponen kredit kendaraan bermotor, dengan pengecualian pembiayaan pada kelompok kendaraan bermotor lainnya atau kendaraan niaga, yang mencatatkan rasio NPL sebesar 6,82% pada triwulan laporan.

Selanjutnya, sebagai pembentuk kredit konsumsi RT terbesar di Jawa Tengah, laju penyaluran KPR pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 2,73% (yoy), melambat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar

Tabel 4.3 Perkembangan Rasio Non-Performing Loan Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah

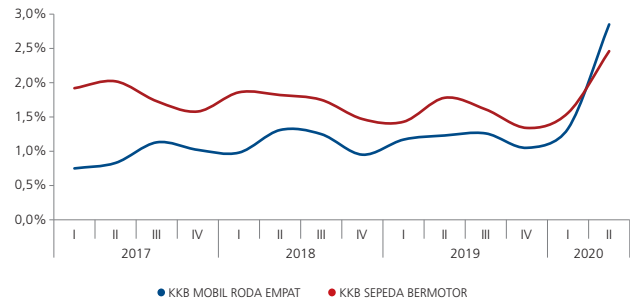
KATEGORI	2018				2019				2020	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
PEMILIKAN RUMAH TINGGAL S.D. TIPE 21	2,69%	3,02%	3,18%	2,78%	2,98%	3,59%	4,13%	3,95%	5,53%	6,05%
PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE 22 S.D. 70	1,46%	1,54%	1,51%	1,24%	1,37%	1,38%	1,40%	1,44%	1,40%	1,51%
PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70	3,58%	2,76%	2,78%	2,53%	2,78%	2,68%	2,87%	2,86%	3,29%	3,54%
PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN S.D. TIPE 21	8,45%	8,81%	37,08%	17,78%	2,08%	0,70%	0,94%	0,93%	0,00%	0,02%
PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE 22 S.D. 70	1,89%	1,91%	1,89%	1,63%	2,13%	2,05%	1,97%	2,17%	2,21%	2,22%
PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE DIATAS 70	2,09%	1,81%	2,29%	0,82%	0,45%	1,65%	0,43%	0,43%	1,50%	1,36%
PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)	3,17%	3,54%	3,48%	3,54%	3,44%	5,20%	6,91%	6,90%	7,27%	6,72%
PEMILIKAN MOBIL RODA EMPAT	0,98%	1,31%	1,25%	0,95%	1,17%	1,23%	1,26%	1,35%	1,12%	1,55%
PEMILIKAN SEPEDA BERMOTOR	1,86%	1,82%	1,75%	1,47%	1,43%	1,78%	1,61%	1,57%	1,48%	1,86%
PEMILIKAN TRUK DAN KENDARAAN RODA ENAM ATAU LEBIH	1,19%	2,65%	2,72%	1,48%	1,90%	3,57%	1,79%	1,64%	2,40%	2,15%
PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA	1,04%	1,26%	2,16%	2,57%	3,49%	3,32%	3,59%	3,47%	3,04%	3,75%
PEMILIKAN FURNITUR DAN PERALATAN RUMAH TANGGA	0,28%	0,31%	0,50%	1,03%	1,21%	1,30%	0,67%	0,71%	1,03%	2,01%
PEMILIKAN TELEVISI, RADIO, DAN ALAT ELEKTRONIK	1,83%	1,96%	2,52%	2,57%	1,88%	1,92%	2,82%	2,72%	3,07%	4,45%
PEMILIKAN KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI	2,71%	4,39%	7,49%	7,26%	5,50%	4,05%	3,42%	3,11%	2,10%	6,49%
PEMILIKAN PERALATAN LAINNYA	0,50%	0,75%	0,98%	0,82%	0,61%	1,12%	1,06%	1,04%	1,26%	1,48%
KEPERLUAN MULTIGUNA	1,15%	1,20%	1,12%	0,96%	1,04%	1,03%	1,08%	1,00%	1,09%	1,29%
KEPERLUAN LAINNYA	0,61%	0,67%	0,59%	0,56%	0,60%	0,68%	0,18%	0,18%	0,17%	0,25%

Sumber: Bank Indonesia, diolah



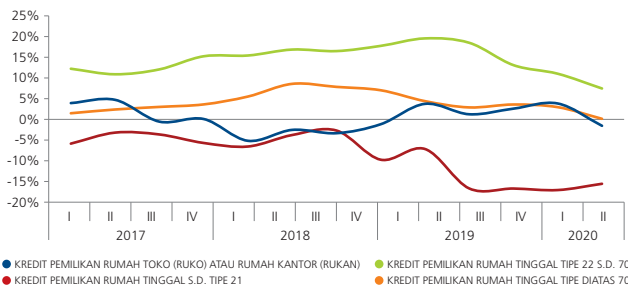
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.25 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah



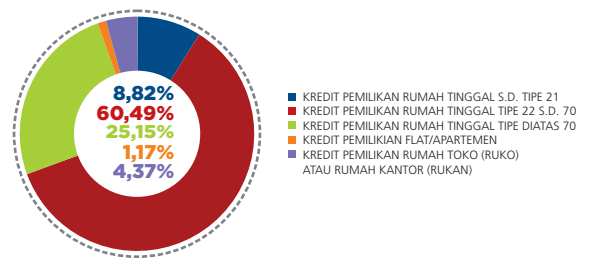
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.26 Perkembangan NPL Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah



● KREDIT PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN) ● KREDIT PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE 22 S.D. 70
● KREDIT PEMILIKAN RUMAH TINGGAL S.D. TIPE 21 ● KREDIT PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70

Grafik 4.27 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah



Sumber: D/JPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

Grafik 4.28 Pangsa Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah

5,40%. Dengan pangsa nilainya terhadap keseluruhan kredit konsumsi di Jawa Tengah sebesar 25,25%, penurunan kinerja KPR menjadi salah satu kontributor perlambatan kredit RT. Perlambatan penyaluran KPR di Jawa Tengah berlangsung pada seluruh kelompok pembiayaan pembelian rumah maupun rukan, dengan kontributor penurunan terbesar berlangsung pada segmen KPR untuk kepemilikan tipe rumah tinggal 22 s.d. 70 m². Sementara itu, pembiayaan untuk tipe rumah tinggal tipe di atas 70 m² yang menunjang kinerja KPR sejak 2018, terhitung relatif stabil pada triwulan laporan ini, dengan tercatat tumbuh 11,03% (yoy). Sementara, penyaluran kredit pada rumah tinggal s.d. tipe 21 masih melanjutkan tren kontraksi yang telah berlangsung sejak tahun 2016.

Secara umum kualitas KPR di Jawa Tengah masih relatif terjaga, dengan rasio NPL relatif stabil di tingkat 2,55% pada triwulan I 2020. Apabila ditelaah lebih lanjut berdasarkan jenis kredit, peningkatan NPL pada penyaluran KPR terutama disebabkan oleh peningkatan risiko pada kelompok kredit pembiayaan kepemilikan rumah toko atau rumah kantor. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi akibat pandemic COVID-19 yang selanjutnya akan meningkatkan tekanan dari debitur masyarakat. Hal ini juga tercermin dari peningkatan yang signifikan pada tingginya pengajuan restrukturisasi KPR pasca Pemerintah menerbitkan paket kebijakan stimulus yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional.





PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Perkembangan indikator sistem pembayaran di Jawa Tengah pada triwulan II 2020 menunjukkan penurunan kinerja perekonomian daerah secara triwulanan, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

- Nilai transaksi melalui SKNBI menunjukkan kontraksi baik secara triwulanan maupun tahunan. Pertumbuhan triwulanan mengalami kontraksi 16,36% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya, sementara pertumbuhan tahunan juga sejalan mengalami kontraksi sebesar 3,68% (yoy).
- Aliran uang di Jawa Tengah mencatatkan posisi net inflow sebesar Rp2,59 triliun, mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami net inflow sebesar Rp11,93 triliun.
- Transaksi menggunakan Uang Kertas Asing (UKA) di KUPVA BB mengalami penurunan dari sisi pembelian UKA secara triwulanan dan tahunan, seiring dengan menurunnya transfer dana dari Luar Negeri ke Jawa Tengah.
- Penyaluran bansos secara non tunai telah disalurkan kepada 1,55 juta KPM PKH dan 3,5 juta KPM Program Sembako (sebelumnya bernama BPNT) sesuai prinsip 6T (tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi).



5.1. PERKEMBANGAN TRANSAKSI SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

Penyelesaian transaksi ritel di Jawa Tengah yang diproses melalui SKNBI pada triwulan II 2020 mengalami penurunan baik secara triwulanan maupun secara tahunan. Nominal transaksi perputaran kliring pada triwulan II 2020 tercatat lebih rendah sebesar 16,36% (qtq) menjadi sebesar Rp33,49 triliun dari sebesar Rp40,05 triliun pada triwulan I 2020 yang mengalami penurunan 7,63% (qtq). Dari sisi volume, perputaran kliring pada triwulan II 2020 laporan tercatat lebih rendah 12,84% (qtq) atau setara dengan 827.970 DKE.

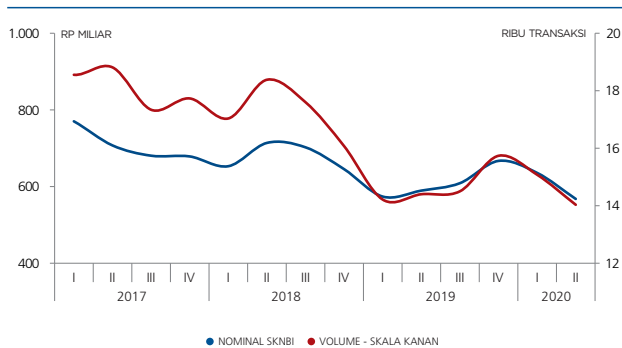
Secara tahunan, penyelesaian nominal transaksi kliring di Jawa Tengah pada triwulan II 2020 mencatatkan penurunan sebesar 3,68% (yoy) dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat meningkat sebesar 14,39% (yoy). Dari sisi volume, perputaran kliring tercatat menurun sebesar 2,55% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami peningkatan sebesar 9,55% (yoy).

Dengan perkembangan tersebut, SKNBI di Jawa Tengah masih mencatatkan kinerja transaksi yang relatif sama dibandingkan transaksi keseluruhan nasional, dengan pangsa

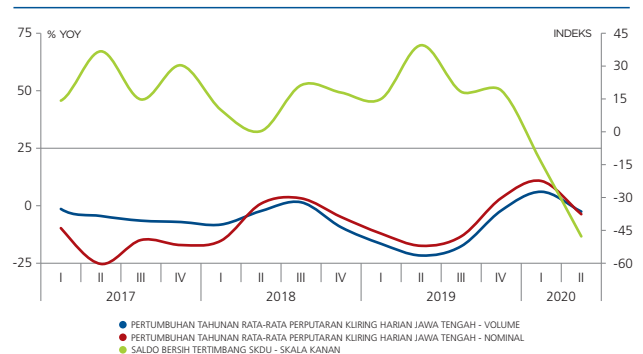
volume sebesar 2,30% dibandingkan nasional (35.948.755 DKE), serta pangsa sebesar 3,47% dibandingkan keseluruhan nominal transaksi nasional (964,93 triliun).

Perkembangan rata-rata harian transaksi kliring secara triwulanan tercatat mengalami penurunan baik dari sisi nominal maupun volume. Perputaran kliring di Jawa Tengah memproses rata-rata 14.033 DKE per hari, atau lebih rendah 6,93% (qtq) dibandingkan rata-rata harian pada triwulan sebelumnya yang memproses 15.077 DKE. Dari sisi nominal, nilai rata-rata harian perputaran kliring sebesar Rp567,73 miliar, tercatat lebih rendah 10,69% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang memproses transaksi dengan nilai Rp635,66 miliar per hari. Penurunan aktivitas kliring juga dipengaruhi oleh berkurangnya transfer dana masyarakat melalui SKNBI.

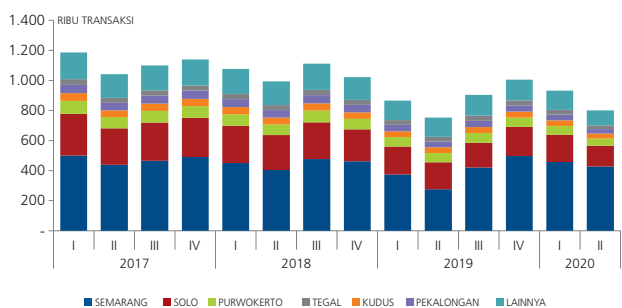
Terdapat 10 Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD) di Jawa Tengah, yaitu KPWD BI (Semarang, Solo, Purwokerto, dan Tegal) serta KPWD selain BI (Kudus, Magelang, Salatiga, Purworejo, Pekalongan, dan Cilacap). Pangsa volume transaksi KPWD selain BI pada periode Triwulan II 2020 adalah sebesar 13,52% dari jumlah seluruh transaksi kliring di Jawa



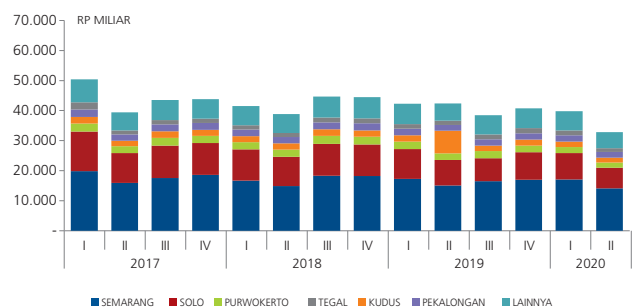
Grafik 5.1 Perkembangan Rata-Rata Perputaran Kliring Harian di Jawa Tengah



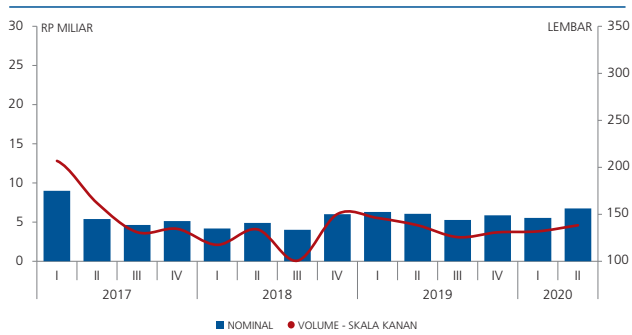
Grafik 5.2 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran Kliring dan SBT SKDU



Grafik 5.3 Pangsa Volume Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman



Grafik 5.4 Pangsa Nominal Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman



Grafik 5.5 Perkembangan Rata-Rata Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong Harian di Jawa Tengah

Tengah atau memproses 101.033 DKE. Dari sisi nominal, pangsa nilai transaksi yang diproses oleh KPWD selain BI sebesar 17,83% dari seluruh transaksi kliring di Jawa Tengah atau mencapai nilai 5,27 triliun.

KPWD Kota Semarang mencatatkan transaksi kliring terbesar di Jawa Tengah dengan pangsa volume dan nominal kliring sebesar masing-masing 57,11% dan 47,59%. Kota selanjutnya yang memberikan sumbangan terbesar terhadap perputaran kliring Jawa Tengah adalah Kota Solo dengan pangsa volume dan nominal masing-masing sebesar 18,52% dan 23,38%, sedangkan kota-kota lain hanya memberikan kontribusi di bawah 10%.

Transaksi kliring debit pengembalian dengan instrumen pembayaran berupa cek dan bilyet giro (BG) kosong mengalami penurunan dari sisi volume namun meningkat secara nominal.

Rata-rata volume cek dan BG kosong yang dikliringkan per hari pada triwulan laporan meningkat 4,90% (qtq) menjadi 138 lembar per hari dari triwulan sebelumnya sebesar 131 lembar per hari sementara rata-rata nilai penarikan cek dan BG kosong meningkat 21,81% (qtq) menjadi sebesar Rp6,76 miliar per hari pada triwulan laporan dibandingkan pada triwulan I 2020 sebesar Rp5,55 miliar per hari. Sementara itu, pertumbuhan tahunan volume pada triwulan II 2020 tidak mengalami pertumbuhan, sementara nominal rata-rata harian penarikan cek dan BG kosong pada triwulan II 2020 mengalami peningkatan sebesar 11,33% (yoy).

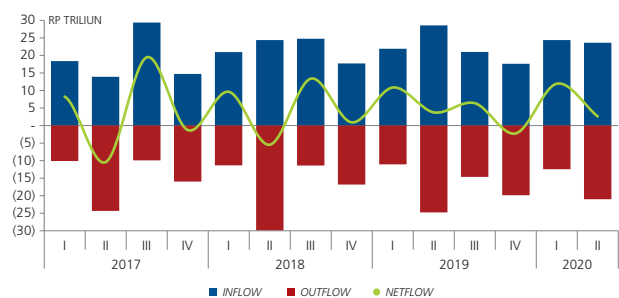
5.2. PERKEMBANGAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah pada triwulan II 2020 mencatatkan posisi *net inflow*.

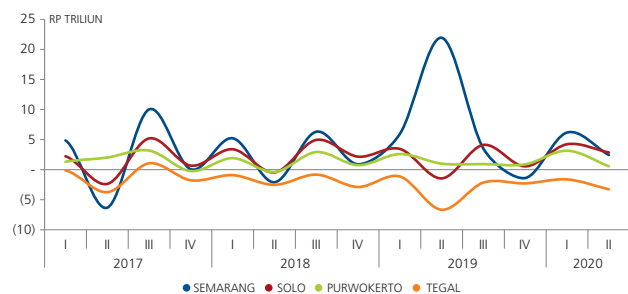
Posisi *net inflow* tercatat sebesar Rp2,59 triliun, mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami *net inflow* sebesar Rp11,93 triliun. Pada triwulan laporan, posisi aliran uang kartal dari perbankan dan masyarakat ke Bank Indonesia (*inflow*) menurun 3,18% (qtq) menjadi sebesar Rp23,60 triliun dari triwulan sebelumnya sebesar Rp24,37 triliun. Pada periode yang sama, aliran uang kartal dari Bank Indonesia (*outflow*) mengalami peningkatan 68,85% (qtq) dari triwulan sebelumnya sebesar Rp12,44 triliun menjadi Rp21,01 triliun.

Secara tahunan, *inflow* tercatat tumbuh 17,29% (yoy), lebih rendah dibandingkan *inflow* pada triwulan I 2020 yang naik sebesar 11,33% (yoy). Posisi *outflow* pada triwulan II 2020 tercatat turun sebesar 15,17% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang naik sebesar 12,70% (yoy). Secara spasial, aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Semarang, Solo, dan Purwokerto mencatat *net inflow*. Sementara itu, posisi aliran kas melalui Bank Indonesia Tegal mencatat *net outflow*.

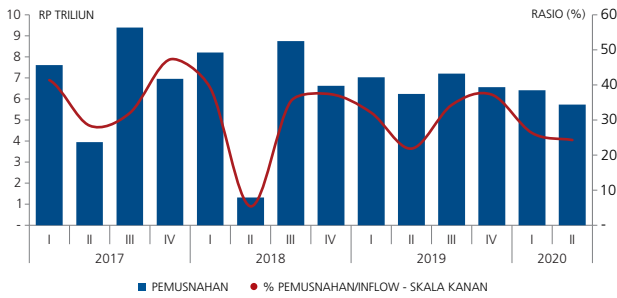
Bank Indonesia secara rutin melakukan kegiatan penarikan uang Rupiah yang tidak layak edar dari peredaran, pengolahan uang Rupiah, serta penggantian dengan uang rupiah layak edar, sebagai bentuk penerapan *clean money policy*. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan



Grafik 5.6 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah



Grafik 5.7 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal Berdasarkan Wilayah

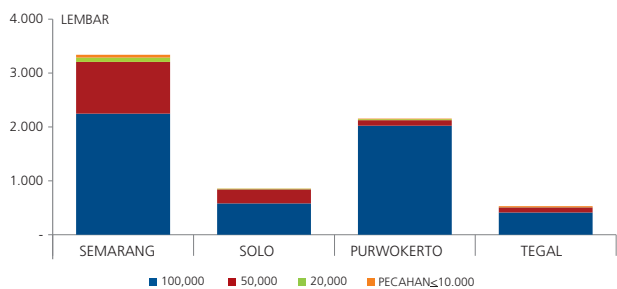


Grafik 5.8 Perkembangan Penarikan dan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar

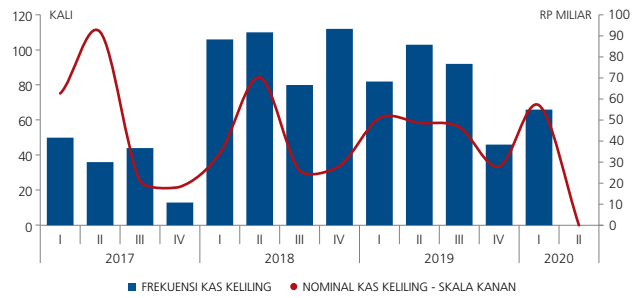
meningkatkan standar kualitas uang yang diedarkan ke masyarakat. Pemusnahan uang Rupiah tidak layak edar di Jawa Tengah pada triwulan laporan menurun sebesar 7,62% dari *inflow*. Dari sisi nonimal, nilai pemusnahan uang Rupiah pada triwulan II 2020 mengalami penurunan sebesar 10,56% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Bank Indonesia juga melakukan layanan kas yang dilaksanakan di dalam kantor maupun di luar kantor. Layanan kas bagi masyarakat di kantor Bank Indonesia dibuka untuk melayani penukaran uang rusak, uang cacat, serta uang yang sudah dicabut dari peredaran. Sementara layanan kas di luar kantor diwujudkan dengan program kas keliling. Kegiatan kas keliling tersebut secara rutin dilaksanakan di dalam kota kedudukan BI hingga menjangkau daerah terpencil. Kas keliling dapat melayani penukaran uang ke pecahan yang lebih kecil serta uang layak edar. Namun demikian, sehubungan dengan semakin meningkatnya penyebaran Covid-19 di Indonesia sekitar akhir Maret 2020, maka untuk sementara kegiatan kas keliling diberhentikan sejak bulan April 2020 hingga waktu yang tidak ditentukan.

Jumlah uang palsu yang ditemukan di Jawa Tengah pada triwulan II 2020 sebanyak 1.877 lembar. Jumlah ini mengalami penurunan 62,49% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan temuan uang palsu sebanyak



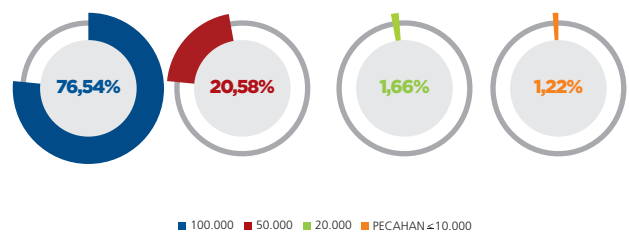
Grafik 5.10 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Wilayah



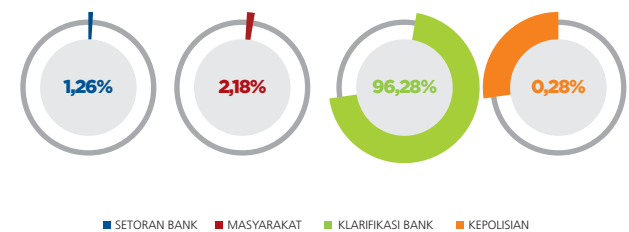
Grafik 5.9 Frekuensi dan Nominal Kas Keliling

5.004 lembar. Apabila dibedakan menurut pecahannya, pecahan yang paling banyak dipalsukan adalah Rp100.000 sebanyak 1.847 lembar (98,4%), diikuti oleh pecahan Rp50.000 sebanyak 29 lembar (1,5%). Sedangkan pecahan lainnya memiliki pangsa masing-masing pecahan kurang dari 1%.

Secara kumulatif dari awal tahun, apabila dibedakan berdasarkan daerah, uang palsu paling banyak ditemukan di Semarang sebanyak 3.341 lembar (48,55%). Sementara pangsa penemuan uang palsu di kota lain adalah Solo sebanyak 855 lembar (12,43%), Tegal sebanyak 529 lembar (7,69%), dan Purwokerto sebanyak 2.156 lembar (31,33%). Penemuan uang palsu tersebut antara lain berasal dari klarifikasi perbankan (70,02%), kepolisian (27,32%), setoran masyarakat melalui loket penukaran (1,66%), serta hasil setoran bank (1%).

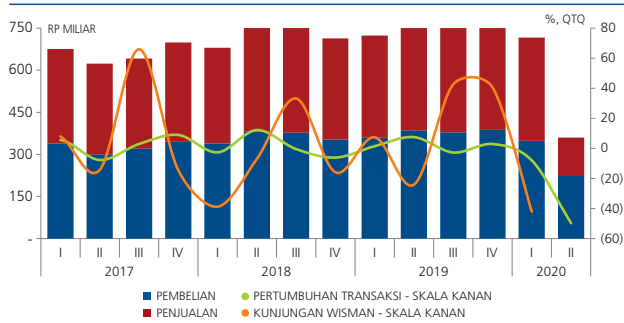


Grafik 5.11 Persentase Temuan Uang Palsu Berdasarkan Pecahan



Grafik 5.12 Persentase Temuan Uang Palsu Berdasarkan Sumber Temuan

5.3. PERKEMBANGAN TRANSAKSI PENUKARAN VALUTA ASING

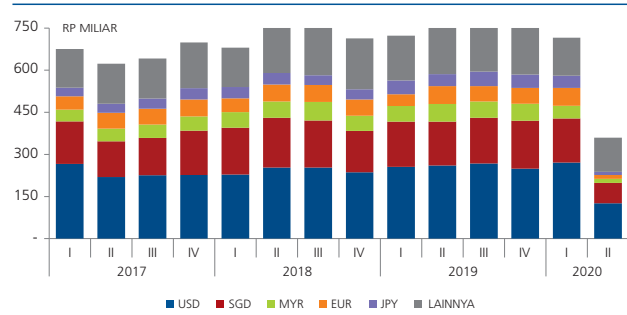


Grafik 5.13 Transaksi Penukaran Valuta Asing

Transaksi menggunakan Uang Kertas Asing (UKA) di KUPVA BB mengalami penurunan secara triwulanan maupun tahunan. Nilai transaksi penukaran valuta asing melalui KUPVA BB berizin di Jawa Tengah pada triwulan II 2020 mencapai Rp359,93 miliar, lebih rendah 49,73% (qtq) dibandingkan nilai transaksi triwulan sebelumnya sebesar Rp715,94 miliar. Apabila dibedakan berdasarkan jenis transaksi, transaksi pembelian valuta asing melalui KUPVA Bukan Bank adalah sebesar Rp223,21 miliar, menurun 35,88% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp348,10 miliar. Sementara itu, transaksi penjualan juga tercatat mengalami penurunan sebesar 62,83% (qtq) menjadi Rp136,72 miliar dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp367,84 miliar.

Sejalan dengan penurunan yang terjadi triwulanan, secara tahunan transaksi penukaran valuta asing juga tercatat menurun 53,72% (yoy). Pertumbuhan tahunan transaksi pembelian mengalami penurunan sebesar 42,15% (yoy) sementara transaksi penjualan juga mengalami penurunan sebesar 65,12% (yoy). Berdasarkan mata uang yang diperdagangkan, Dolar Amerika Serikat (USD) masih mendominasi transaksi pada triwulan II 2020 dengan pangsa sebesar 34,95%, yang diikuti oleh Dolar Singapura (SGD) sebesar 20,13%, Ringgit Malaysia (MYR) sebesar 4,00%, Euro (EUR) sebesar 3,83%, dan Yen Jepang (JPY) sebesar 3,12%. Sementara transaksi mata uang lainnya untuk 44 jenis valuta asing memiliki pangsa 33,97%.

Penyelenggaraan KUPVA BB berizin diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pasar keuangan terutama pasar valuta asing domestik. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) yang memiliki izin dari Bank Indonesia di Jawa Tengah terdapat sejumlah



Grafik 5.14 Pangsa Valuta Asing yang ditukarkan melalui KUPVA Bukan Bank di Jawa Tengah

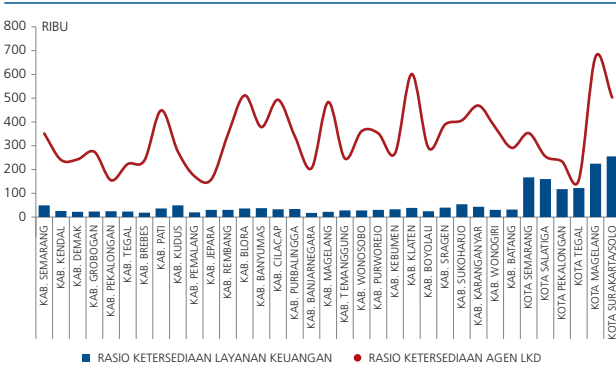
48 penyelenggara. Berdasar jumlah tersebut, 26 KUPVA (54,17%) terdapat di wilayah kerja KPwBI Provinsi Jawa Tengah, 12 KUPVA BB (25,00%) terdapat di wilayah kerja KPwBI Solo, 6 KUPVA BB (12,50%) terdapat di wilayah kerja KPwBI Purwokerto, dan 4 KUPVA BB (8,33%) terdapat di wilayah kerja KPwBI Tegal.

5.4. PERKEMBANGAN ELEKTRONIFIKASI DAN KEUANGAN INKLUSIF

Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang sistem pembayaran terus mendorong penerapan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) melalui penggunaan instrumen nontunai (elektronifikasi), antara lain pada sektor Pemda dan penyaluran bantuan sosial.

Pada tanggal 17 Agustus 2019, Bank Indonesia menerbitkan QR Code Indonesia Standard atau disingkat QRIS. QRIS adalah standar nasional QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. Ciri QR Code yang telah berstandar QRIS adalah terdapat logo QRIS di sisi kiri atas dan logo GPN (burung Garuda Merah) di sisi kanan atas. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, per tanggal 1 Januari 2020 pedagang di seluruh Indonesia wajib menggunakan QR Code dengan standar QRIS.

Posisi akhir Juni 2020 telah terdapat 327.401 merchant di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki QRIS. Berdasarkan jumlah tersebut 169.950 merchant (52%) ada di wilayah kerja KPwBI Provinsi Jawa Tengah, 76.604 merchant (23%) ada di wilayah kerja KPwBI Solo, 42.247 merchant (13%) ada di wilayah kerja KPwBI Purwokerto, dan 38.600 merchant (12%) berada di wilayah kerja KPwBI Tegal.



Grafik 5.15 Rasio Ketersediaan Layanan Keuangan di Jawa Tengah dibandingkan 1.000 km² Luas Wilayah

Pada elektronifikasi bantuan sosial, **BI melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait untuk memastikan kelancaran penyaluran bantuan sosial, baik berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (sebelumnya bernama BPNT).** Penyaluran PKH tahap Juni 2020 dilakukan kepada 1,55 juta KPM dengan persentase penyerapan jumlah KPM sebesar 94,31%, sementara itu penyaluran Program Sembako pada

bulan Juni 2020 dilakukan kepada 3,5 juta KPM dengan persentase penyerapan jumlah KPM sebesar 98%. Penyaluran bansos nontunai bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan prinsip 6T (tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi) serta meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan.

Apabila ditinjau dari luas wilayah, rasio ketersediaan layanan keuangan dibandingkan 1.000 km² luas wilayah di masing-masing kabupaten/kota Jawa Tengah, daerah yang memiliki ketersediaan layanan keuangan tertinggi dibandingkan luas wilayah adalah Kota Solo. Sementara daerah yang memiliki nilai rasio terendah adalah Kabupaten Grobogan. Aspek ini perlu menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan dan industri keuangan agar dapat meningkatkan jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil.





KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Dampak COVID-19 secara luas membuat kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah turut mengalami penurunan kinerja pada triwulan II 2020.

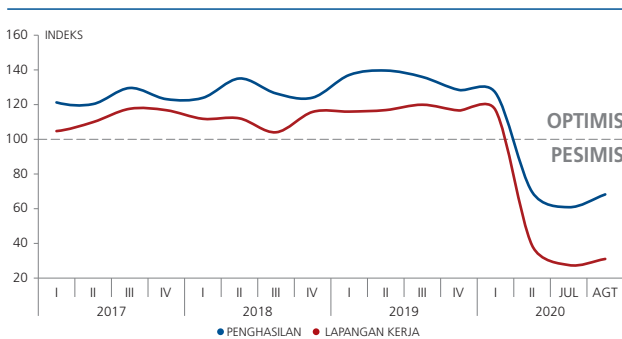
- Indeks ketersediaan lapangan kerja saat ini berada level pesimis yang rendah yaitu 38,84 pada triwulan II 2020. Penurunan indeks tersebut berlanjut hingga Agustus 2020 menjadi 31,04.
- Peningkatan biaya produksi pertanian mendorong penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juni 2020, jika dibandingkan dengan periode Maret 2020.
- Pada Maret 2020, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dengan penambahan penduduk miskin periode September 2019-Maret 2020 sebesar 301,5 ribu jiwa.
- Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Jawa Tengah pada Maret 2020 relatif stabil dengan indeks sebesar 0,362.



6.1. KETENAGAKERJAAN

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah pada triwulan II 2020 merasakan dampak wabah COVID-19. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia, pada triwulan II 2020 mengalami penurunan drastis, yang ditunjukkan indeks ketersediaan lapangan kerja menurun dari 116,83 menjadi 38,84. Hal ini juga disertai penurunan penghasilan dimana indeks penghasilan saat ini menurun dari 126,82 menjadi 69,67 pada triwulan II 2020. Penurunan permintaan di tingkat domestik dan global membuat aktivitas produksi melemah. Sehingga beberapa pelaku usaha terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan.

Penyebaran COVID-19 masih terjadi di Jawa Tengah hingga Agustus 2020 yang menyebabkan kondisi ketenagakerjaan belum membaik. Indeks ketersediaan lapangan kerja bergerak ke arah lebih rendah dibanding triwulan II 2020 dimana pada Juli 2020 tercatat sebesar 27,53 (Grafik 2.1), namun sedikit meningkat pada Agustus 2020 (31,04). Hasil diskusi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mencatat bahwa sejumlah perusahaan terkena dampak COVID-19 dalam rentang waktu April hingga Juli 2020. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terpaksa dilakukan karena penjualan korporasi turun baik pada pasar global maupun domestik. Sebagian besar korporasi berupaya untuk tidak melakukan PHK dengan merumahkan sebagian pegawainya. Terdapat pula kebijakan perusahaan yang melakukan pengurangan upah demi menghindari PHK. Melihat kondisi korporasi hingga Juli 2020, Bank Indonesia melakukan simulasi yang menunjukkan potensi penambahan tingkat pengangguran paling tidak sebesar 1,43% terhadap angkatan kerja di Jawa Tengah.



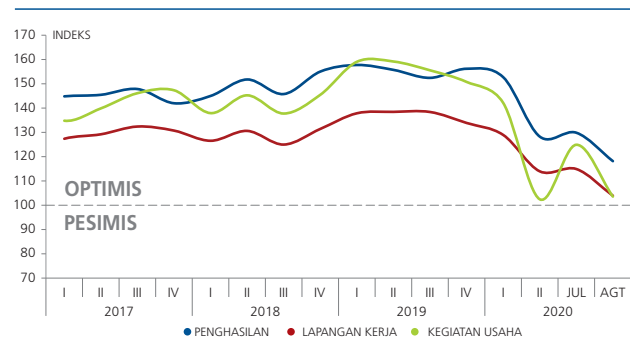
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 6.1 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan Penghasilan Saat Ini

Namun demikian, kondisi tersebut diharapkan pulih pasca pelanggaran pembatasan sosial sejak Juni 2020. Aktivitas perekonomian dan pergerakan masyarakat yang meningkat diharapkan mampu meningkatkan permintaan domestik. Ke depan, konsumen pun optimis kondisi ketenagakerjaan membaik setidaknya pada triwulan IV 2020. Indeks perkiraan kegiatan usaha masih optimis pada level 103,55. Sementara indeks perkiraan ketersediaan lapangan kerja dan penghasilan telah berada pada level optimis dengan masing-masing sebesar 103,90 dan 118,14 (Grafik 2.2).

Merujuk pada rilis terakhir Badan Pusat Statistik yang memotret kondisi ketenagakerjaan pada Februari 2020, Jawa Tengah memiliki potensi yang tinggi untuk meningkatkan produktivitas perekonomian. Jumlah penduduk usia kerja di Jawa Tengah pada periode Maret 2020 meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Indikator ini mencerminkan potensi ketersediaan tenaga kerja. Pada Februari 2020 jumlah penduduk usia kerja Jawa Tengah sebesar 26,75 juta orang, atau meningkat 1,01% (yoy) dibandingkan dengan Februari 2020 yang berjumlah 26,48 juta orang. Kondisi ini mencerminkan potensi tenaga kerja di Jawa Tengah dalam hal kuantitas penduduk usia produktif.

Jumlah penduduk usia produktif yang menjadi angkatan kerja juga mengalami peningkatan pada triwulan laporan. Jumlah angkatan kerja meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari 18,59 juta orang menjadi sebanyak 18,78 juta orang atau tumbuh 1,02% (yoy). Pertumbuhan angkatan kerja ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja pada Agustus 2019 yang tumbuh sebesar 1,11% (yoy). Jumlah



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 6.2 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan Usaha yang Akan Datang

angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah memiliki porsi sebesar 13,62% dari total angkatan kerja di tingkat nasional yaitu sebanyak 137,91 juta orang.

Penduduk yang bekerja pada Februari 2020 sebanyak 17,98 juta orang atau 95,74% dari total angkatan kerja. Jumlah pekerja ini tumbuh 0,95% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 17,81 juta orang. Sementara itu, sebesar 4,25% atau 0,8 juta orang angkatan kerja tergolong dalam kategori pengangguran. Persentase ini relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi di tingkat nasional, di mana 95,01% angkatan kerja tergolong bekerja dan 4,99% merupakan pengangguran.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode laporan juga mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun lalu. TPAK merupakan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Pada Februari 2020 tercatat sebesar 70,22%, atau naik dibandingkan Februari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 70,21%. Kondisi TPAK Jawa Tengah ini lebih tinggi dari tingkat nasional yang tercatat sebesar 69,17%.

Struktur tenaga kerja pada lapangan usaha di Jawa Tengah secara umum tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar

penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Pada Februari 2020, lapangan usaha pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 4,69 juta orang atau 27,19% dari total penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. Angka ini meningkat dibandingkan Februari 2019 yang mencatatkan tenaga kerja di sektor ini sebanyak 4,67 juta orang atau 26,22% dari total penduduk bekerja.

Sementara itu, jumlah tenaga kerja di lapangan usaha industri pengolahan menempati posisi kedua dengan menyerap 3,9 juta orang atau 22,61% dari penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. Jumlah pekerja lapangan usaha industri pengolahan ini tumbuh -1,27% (yoy). Adapun lapangan usaha perdagangan menempati posisi ketiga sebesar 3,35 juta orang atau menyerap 19,30% penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. Sejalan dengan kondisi di industri, tenaga kerja lapangan usaha perdagangan mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -0,60% (yoy). Penurunan jumlah pekerja di lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan terjadi akibat kondisi industri yang terpengaruh kondisi global saat itu. Perang dagang AS-Tiongkok menyebabkan ketidakpastian global meningkat. Produk ekspor andalan Jawa Tengah seperti tekstil dan pakaian jadi, mengalami penurunan permintaan.

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (juta orang)

INDIKATOR	2016		2017		2018		2019		2020
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB
ANGKATAN KERJA	17,91	17,31	18,20	18,01	18,23	18,06	18,59	18,26	18,78
BEKERJA	17,16	16,51	17,44	17,19	17,46	17,25	17,81	17,44	17,98
PENGANGGURAN	0,75	0,80	0,76	0,82	0,77	0,81	0,78	0,82	0,8
BUKAN ANKATAN KERJA	7,72	8,47	7,72	8,05	7,97	8,28	7,89	8,35	7,97
PENDUDUK USIA KERJA	25,63	25,78	25,92	26,06	26,2	26,34	26,48	26,61	26,75
TINGKAT PARTISIPASI ANKATAN KERJA (TPAK) %	69,89	67,15	70,20	69,11	69,58	68,56	70,21	68,62	70,22
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)%	4,20	4,63	4,15	4,57	4,23	4,51	4,22	4,49	4,25
PEKERJA TIDAK PENUH	4,97	4,22	4,73	4,34	4,90	4,67	5,03	4,65	4,93
SETENGAH PENGANGGUR	1,23	1,02	1,03	1,10	1,06	0,90	1,06	0,94	0,87
PARUH WAKTU	3,74	3,20	3,69	3,24	3,84	3,77	3,97	3,72	4,06

Sumber : BPS Jawa Tengah

Tabel 6.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, (juta orang)

SEKTOR EKONOMI	2016		2017		2018		2019		2020
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB
PERTANIAN	5,16	5,07	4,97	4,32	4,76	4,2	4,67	4,09	4,69
INDUSTRI	3,22	3,25	3,74	3,68	3,75	3,76	3,95	3,89	3,9
KONSTRUKSI	1,28	1,43	1,25	1,49	1,23	1,51	1,28	1,52	1,32
PERDAGANGAN	4,11	3,71	3,2	3,18	3,26	3,22	3,35	3,31	3,33
TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI	0,55	0,55	0,5	0,56	0,53	0,57	0,53	0,57	0,56
KEUANGAN	0,3	0,3	0,25	0,23	0,22	0,24	0,21	0,23	0,24
LAINNYA*	2,54	2,2	3,53	3,73	3,71	3,75	3,82	3,83	3,94
TOTAL	17,16	16,51	17,44	17,19	17,46	17,25	17,81	17,44	17,98

* Lapangan pekerjaan utama lainnya terdiri dari sektor Pertambangan, Listrik, Gas dan Air, Transportasi, Pergudangan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate dan Usaha Persewaan
Sumber : BPS Jawa Tengah

Tabel 6.3. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan (juta orang)

STATUS PEKERJAAN UTAMA	2016		2017		2018		2019		2020
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB
BERUSAHA SENDIRI	2,86	2,63	3,07	3,30	3,21	3,21	3,35	3,31	3,28
BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP	3,35	3,09	3,23	2,77	3,00	2,96	3,16	2,79	3,15
BERUSAHA DIBANTU BURUH TETAP	0,54	0,50	0,59	0,51	0,63	0,62	0,60	0,60	0,59
BURUH/KARYAWAN/PEGAWAI	5,89	5,75	6,05	6,32	6,35	6,12	6,48	6,69	6,87
PEKERJA BEBAS DI PERTANIAN	0,85	0,86	0,92	0,83	0,72	0,73	0,69	0,74	0,80
PEKERJA BEBAS DI NON PERTANIAN	1,34	1,43	1,14	1,56	1,23	1,51	1,15	1,37	1,13
PEKERJA TAK DIBAYAR	2,32	2,25	2,43	1,90	2,32	2,11	2,38	1,94	2,17
TOTAL	17,15	16,51	17,44	17,19	17,46	17,25	17,81	17,44	17,98

Sumber : BPS Jawa Tengah

Apabila ditinjau dari status pekerjaan utama, pada Februari 2020 tenaga kerja dominan di Jawa Tengah adalah kelompok orang yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Jumlah kelompok orang yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai mencapai 6,87 juta orang, meningkat dibandingkan dengan Februari 2019 yang tercatat sebesar 6,48 juta orang. Apabila jumlah kelompok tersebut ditambahkan dengan kelompok berusaha dibantu buruh tetap, maka akan membentuk proksi kelompok pekerja sektor formal. Pada Februari 2020, jumlah pekerja sektor formal Jawa Tengah sebanyak 7,46 juta orang atau 41,49% dari jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah pekerja sektor formal tersebut meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 7,08 juta orang. Sementara itu, jumlah pekerja di sektor informal mengalami penurunan. Pada Februari 2020, pekerja informal tercatat sebanyak 10,52 juta orang atau 58,51% dari jumlah penduduk bekerja, mengalami penurunan dibandingkan dengan Februari 2020 yang tercatat sebanyak 10,73 juta orang (60,25%).

Jumlah pekerja waktu penuh Jawa Tengah pada Februari 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Jumlah kelompok pekerja ini tercatat sebanyak 13,06 juta orang atau mengalami peningkatan sebesar 2,27% (yoy) dibandingkan Februari 2019 yang tercatat sebanyak 12,77 juta orang. Rasio utilisasi yang tinggi tercermin dari rasio pekerja berwaktu penuh (*full time*

worker)⁵ sebesar 72,64% terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah.

Pada kategori lainnya, pekerja paruh waktu mengalami peningkatan, yaitu dari 3,97 juta orang pada periode Februari 2019 menjadi 4,06 juta orang pada periode laporan. Dengan peningkatan kuantitas tersebut, proporsi pekerja paruh waktu terhadap tenaga kerja di Jawa Tengah juga mengalami peningkatan dari sebesar 22,29% pada Februari 2019 menjadi 22,58% pada Februari 2020. Hal ini mengindikasikan kondisi ketersediaan lapangan kerja penuh waktu yang mulai menurun sehingga pencari kerja berupaya mendapat penghasilan melalui pekerjaan paruh waktu.

Peningkatan kuantitas tenaga kerja di Jawa Tengah relatif turut diimbangi oleh peningkatan kualitas. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menetapkan Prioritas Nasional Pembangunan Pendidikan yang menargetkan tingkat pendidikan penduduk usia di atas 15 tahun adalah 8,8 tahun atau setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan demikian, penetapan standar indikator kualitas tenaga kerja mengacu pada target Pembangunan Pendidikan tersebut, yaitu tingkat pendidikan SMP.

Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Tengah dengan tingkat pendidikan SMP ke atas pada Februari 2020 tercatat mencapai 55,28% dari jumlah tenaga kerja atau sebanyak

Tabel 6.4. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (juta orang)

PENDUDUK YANG BEKERJA	2016		2017		2018		2019		2020
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB
PEKERJA TIDAK PENUH	4,97	4,22	4,73	4,34	4,90	4,67	5,03	4,65	4,93
SETENGAH PENGANGGUR	1,23	1,02	1,03	1,10	1,07	0,90	1,06	0,94	0,87
PEKERJA PARUH WAKTU	3,74	3,2	3,69	3,24	3,84	3,77	3,97	3,72	4,06
PEKERJA PENUH	12,19	12,29	12,71	12,85	12,56	12,57	12,77	12,79	13,06
TOTAL	17,16	16,51	17,44	17,19	17,46	17,25	17,81	17,44	17,98

Sumber : BPS Jawa Tengah

5. Pekerja berwaktu penuh (*full time worker*) yaitu penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam ke atas per minggu.

9,94 juta orang, meningkat sebesar 6,77% (yoy) dibandingkan Februari 2019 yang tercatat sebanyak 9,31 juta orang. Peningkatan kualitas pendidikan tenaga kerja di Jawa Tengah tersebut utamanya disumbang oleh pertumbuhan tenaga kerja terampil dari tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas/Umum (SMA/SMU) yang tercatat sebesar 2,40 juta orang atau meningkat 11,63% (yoy) dibandingkan Februari 2019 lalu. Perbaikan kualitas dan kuantitas tenaga terampil ini diharapkan dapat memenuhi permintaan tenaga kerja di industri pengolahan, mengingat sejak 2015 terjadi tren relokasi usaha dari Jawa Barat dan Banten menuju Jawa Tengah.

Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah pada Februari 2020 tercatat sebanyak 8,04 juta orang atau menurun dibandingkan Februari tahun 2019 yang tercatat sebanyak 8,50 juta orang. Begitu pula secara proporsi yang mengalami penurunan dari sekitar 47,7% terhadap jumlah tenaga kerja pada Februari 2019 menjadi 44,7% pada Februari 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan jumlah tenaga kerja dengan keterampilan rendah di Jawa Tengah menunjukkan tren yang semakin menurun seiring dengan penurunan angka partisipasi kerja angkatan tua.

6.2. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Merujuk pada rilis Badan Pusat Statistik terkini, angka pengangguran mengalami sedikit peningkatan pada Februari 2020 dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau pengangguran pada Februari 2020 tercatat sebanyak 0,80 juta orang, atau bertambah 2,56% (yoy) dibandingkan kondisi Februari 2019 yang berjumlah 0,78 juta orang. Walaupun terjadi peningkatan jumlah pengangguran, namun peningkatan relatif terbatas. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa terjadi penyerapan tenaga siap kerja di Jawa Tengah yang lebih baik sejalan dengan pertumbuhan lapangan kerja. Berdasarkan data tersebut, Provinsi Jawa Tengah menyumbang 11,63% dari total angka pengangguran nasional yang berjumlah 6,88 juta orang.

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)⁶ Jawa Tengah mengalami peningkatan. TPT Jawa Tengah terpantau meningkat dari 4,22% pada Februari 2019 menjadi 4,25% pada Februari 2020. Angka TPT Jawa Tengah ini masih lebih

baik dibandingkan angka TPT nasional yang sebesar 4,99%. Berdasarkan lokasi tempat tinggal, TPT pada Februari 2020 untuk wilayah perkotaan (5,02%) cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT di wilayah perdesaan (3,46%). Persentase pengangguran di Jawa Tengah tersebut diperkirakan mengalami peningkatan jika potret tenaga kerja dilakukan pada masa penyebaran wabah COVID-19 meningkat yaitu triwulan II 2020.

6.3. NILAI TUKAR PETANI

Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juni 2020 mengalami penurunan dibandingkan Maret 2020. NTP pada Juni 2020 tercatat sebesar 101,10, menurun dari Maret 2020 sebesar 102,12. Jika melihat historis dalam rentang waktu 2016 hingga 2019, NTP Jawa Tengah berada dalam tren yang meningkat.

Penurunan NTP pada Juni 2020 terutama didorong kenaikan biaya yang dibayar petani lebih tinggi dari kenaikan penghasilan yang diterima petani pada Juni 2020. Kenaikan biaya terjadi di tengah inflasi perdesaan yang menurun pada Juni 2020 yang tercatat sebesar -0,12% (mtm). Penurunan harga kebutuhan di desa terutama disebabkan permintaan domestik yang sedang dalam tren menurun.

Penerimaan petani pada Juni 2020 mengalami penurunan dibandingkan Maret 2020. Penerimaan petani yang dicerminkan oleh indeks yang diterima petani (IT) mencatatkan penurunan dari sebesar 108,53 pada Maret 2020, menjadi sebesar 107,47 pada Juni 2020. Di sisi lain, harga yang dibayar petani (IB) mengalami peningkatan dari sebelumnya 106,28 pada Maret 2020 menjadi 106,30 pada Juni 2020.

Hampir seluruh subsektor NTP mengalami penurunan kecuali subsektor hortikultura dan peternakan. Pendorong utama penurunan NTP di Jawa Tengah yaitu subsektor tanaman pangan mengalami penurunan dari 104,61 pada Maret 2020, menjadi sebesar 102,65 pada Juni 2020. Subsektor lain yang mengalami penurunan NTP yaitu perkebunan rakyat dan perikanan.

Pada Juni 2020, subsektor tanaman pangan sebagai kontributor utama lapangan usaha pertanian di Jawa Tengah, mencatatkan penurunan indeks yang diterima petani (IT). Subsektor tanaman pangan mencatatkan indeks yang

6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

7. Nilai Tukar Petani (NTP) periode data tahun Desember 2019 dan seterusnya menggunakan NTP Tahun Dasar 2018 sedangkan NTP periode data sebelum periode Desember 2019 menggunakan data NTP Tahun Dasar 2012.

Tabel 6.5. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang)

PENDIDIKAN	2016		2017		2018		2019		2020
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB
SD KE BAWAH	8,92	8,44	8,69	8,40	8,49	8,25	8,50	8,03	8,04
SMP	3,28	3,29	3,47	3,35	3,59	3,38	3,46	3,47	3,54
SMA UMUM	1,9	1,78	1,97	2,11	1,95	2,17	2,15	2,23	2,4
SMA KEJURUAN	1,64	1,71	1,85	1,82	2,03	1,93	2,08	2,15	2,3
DIV/III DAN UNIVERSITAS	0,36	0,35	0,35	0,39	0,34	0,39	0,38	0,39	0,46
UNIVERSITAS	1,06	0,93	1,12	1,12	1,06	1,12	1,24	1,17	1,24
TOTAL	17,16	16,5	17,44	17,19	17,46	17,25	17,81	17,44	17,98

Sumber : BPS Jawa Tengah

Tabel 6.6. NTP Jawa Tengah dan Komponen Penyusunnya

NILAI TUKAR PETANI	2018*				2019*				2020	
	MAR	JUN	SEP	DES	MAR	JUN	SEP	DES	MAR	JUN
INDEKS YANG DITERIMA PETANI (It)	132.96	133.89	136.83	138.55	138.29	140.79	145.23	108.92	108.53	107.47
INDEKS YANG DIBAYAR PETANI (Ib)	131.28	132.10	132.45	133.68	134.49	136.50	137.04	104.61	106.28	106.30
NILAI TUKAR PETANI	101.29	101.36	103.31	103.64	102.83	103.15	105.98	104.11	102.12	101.10

Sumber : BPS Jawa Tengah

diterima petani (IT) sebesar 109,01 pada Juni 2020, atau menurun dari sebelumnya sebesar 117,07 pada Maret 2020. Sementara itu, subsektor hortikultura mencatatkan subsektor yang mengalami peningkatan NTP dari sebesar 114,73 pada Maret 2020, menjadi sebesar 115,80 pada Juni 2020. Kenaikan IT pada subsektor hortikultura didorong kenaikan harga pada komoditas kelompok sayur-sayuran, khususnya bawang merah, melinjo, petai, kol/kubis, jengkol, dan kacang merah.

Pengeluaran petani pada Juni 2020, yang digambarkan oleh indeks yang dibayarkan petani (IB) dari sebelumnya 106,28 pada Maret 2020 menjadi 106,30 pada Juni 2020. Data historis menunjukkan bahwa indeks yang dibayar petani mengalami tren peningkatan secara persisten. Peningkatan

biaya pengeluaran petani pada periode laporan juga berlangsung pada hampir seluruh subsektor, dengan kenaikan tertinggi pada subsektor hortikultura (0,37%, qtq), diikuti oleh subsektor perkebunan (0,16%, qtq), serta subsektor perikanan (0,12%; qtq). Lebih lanjut, peningkatan biaya yang harus dibayarkan oleh petani terjadi di komponen biaya kebutuhan proses produksi dan penambahan barang modal. Pengeluaran untuk kegiatan usaha pertanian meningkat untuk seluruh jenis komponen biaya yaitu bahan baku, barang modal kerja, dan upah buruh. Peningkatan upah buruh petani relatif tinggi pada triwulan II 2020 yang didorong tren penurunan minat masyarakat untuk bekerja di bidang pertanian.

Tabel 6.7. NTP Jawa Tengah per Subsektor

NILAI TUKAR PETANI	2018*				2019*				2020	
	MAR	JUN	SEP	DES	MAR	JUN	SEP	DES	MAR	JUN
TOTAL	101.29	101.36	103.31	103.64	102.83	103.15	105.98	104.11	102.12	101.10
TANAMAN PANGAN	100.72	99.67	103.81	108.71	106.77	104.22	108.39	107.54	104.61	102.65
HORTIKULTURA	97.43	97.74	101.27	99.70	98.42	102.17	103.81	106.04	108.18	108.80
TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT	111.40	111.14	107.86	105.09	106.62	106.63	113.10	92.68	89.78	89.35
PETERNAKAN	99.11	100.47	101.39	99.62	99.05	100.15	100.25	96.17	93.97	94.52
PERIKANAN	101.67	103.80	105.66	104.24	104.72	104.97	104.97	107.10	105.42	103.07

Sumber : BPS Jawa Tengah

Tabel 6.8. Indeks yang Diterima berdasarkan Subsektor

INDEKS YANG DITERIMA PETANI	2018*				2019*				2020	
	MAR	JUN	SEP	DES	MAR	JUN	SEP	DES	MAR	JUN
TOTAL	132.96	133.89	136.83	138.55	138.29	140.79	145.23	108.92	108.53	107.47
TANAMAN PANGAN	135.93	135.23	140.89	148.76	147.27	146.25	152.61	112.38	111.07	109.01
HORTIKULTURA	129.08	130.27	134.97	134.03	133.14	140.68	143.36	110.57	114.73	115.80
TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT	147.13	147.78	143.76	141.34	144.39	146.66	155.99	96.91	96.19	95.88
PETERNAKAN	124.15	126.80	129.09	128.24	127.88	130.36	131.28	101.36	100.11	100.27
PERIKANAN	131.37	134.64	137.09	137.11	138.41	141.01	142.17	111.83	111.05	108.70

Sumber : BPS Jawa Tengah

Tabel 6.9. Indeks yang Dibayar berdasarkan Subsektor

INDEKS YANG DITERIMA PETANI	2018*				2019*				2020	
	MAR	JUN	SEP	DES	MAR	JUN	SEP	DES	MAR	JUN
TOTAL	131.28	132.10	132.45	133.68	134.49	136.50	137.04	104.61	106.28	106.30
TANAMAN PANGAN	134.95	135.67	135.72	136.84	137.93	140.33	140.80	104.50	106.18	106.20
HOLTIKULTURA	132.48	133.28	133.28	134.43	135.27	137.69	138.09	104.27	106.05	106.44
TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT	132.07	132.97	133.29	134.50	135.43	137.54	137.93	104.57	107.14	107.31
PETERNAKAN	125.27	126.21	127.32	128.73	129.10	130.16	130.95	105.40	106.52	106.09
PERIKANAN	129.21	129.71	129.76	131.53	132.17	134.34	135.44	104.42	105.34	105.47

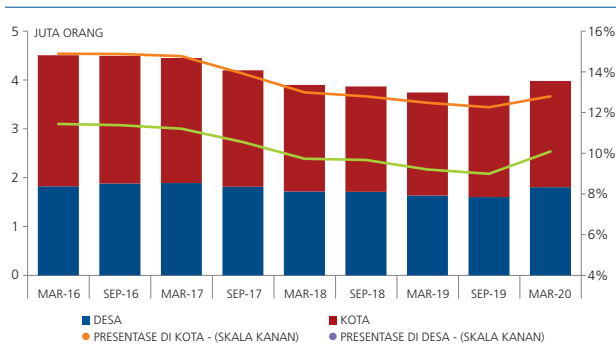
Sumber : BPS Jawa Tengah

6.4. TINGKAT KEMISKINAN

Data rilis Badan Pusat Statistik terkini menunjukkan tingkat kemiskinan Jawa Tengah mengalami peningkatan, baik dari jumlah maupun rasio penduduk miskin. Tingkat kemiskinan Jawa Tengah pada Maret 2020 terhitung sebesar 3,98 jiwa atau meningkat bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 3,74 juta jiwa. Dengan perkembangan tersebut, rasio penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami peningkatan menjadi sebesar 11,41% dari total penduduk Jawa Tengah, atau meningkat dibandingkan periode Maret 2019, yaitu 10,80% dari jumlah penduduk.

Peningkatan persentase jumlah penduduk miskin tersebut terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Adapun jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami peningkatan dari 1,63 juta jiwa pada Maret 2019, menjadi sebesar 1,81 juta jiwa pada Maret 2020. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin yang berada di perdesaan juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,18 juta jiwa pada periode Maret 2020, meningkat dari 2,11 juta jiwa pada periode yang sama di 2019.

Peningkatan kemiskinan terjadi pada Maret 2020 disebabkan produktivitas pertanian yang menurun jika merujuk pada rilis PDRB BPS. Lapangan usaha pertanian pada triwulan I 2020 tumbuh -2,66% (yoy). Penurunan produksi pertanian



Grafik 6.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah

disebabkan adanya pergeseran musim tanam karena pada tahun 2019 terjadi musim kemarau berkepanjangan. Mengingat tenaga kerja sektor pertanian di Jawa Tengah merupakan yang tertinggi, pendapatan masyarakat menurun pada triwulan I 2020.

Angka kemiskinan di tingkat nasional juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penduduk miskin nasional pada Maret 2020 tercatat sebesar 26,42 juta jiwa, lebih tinggi dibandingkan Maret 2019 sebesar 25,14 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin tingkat nasional ini mengalami peningkatan sebesar 5,09% (yoy). Peningkatan jumlah penduduk miskin tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat yaitu sejumlah 544,3 ribu jiwa bergerak ke bawah garis kemiskinan pada periode September 2019 – Maret 2020. Peringkat kedua ditempati oleh Provinsi Jawa Timur (363,1 ribu jiwa) dan Provinsi Jawa Tengah (301,5 ribu jiwa) menyusul di peringkat ketiga nasional. Dengan perkembangan tersebut, peningkatan penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah selanjutnya juga berdampak pada penurunan pangsa penduduk miskin terhadap nasional menjadi sebesar 18,4%.

Sejalan dengan realisasi inflasi, garis kemiskinan terus mengalami peningkatan⁸, baik di tingkat nasional maupun di Provinsi Jawa Tengah. Sesuai definisi yang digunakan oleh

Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan akan digolongkan menjadi penduduk miskin. Peningkatan nilai garis kemiskinan di Jawa Tengah terutama didorong oleh peningkatan garis kemiskinan di perkotaan. Berdasarkan pembagian kelompok kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan, garis kemiskinan perkotaan di Jawa Tengah mengalami peningkatan tahunan sebesar 7,75% (yoy) menjadi Rp401.771 per kapita/bulan pada periode laporan,

8. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai pengeluaran kebutuhan minimum yang harus dikeluarkan oleh satu orang.

Tabel 6.10 Garis Kemiskinan Jawa Tengah Menurut Daerah

GARIS KEMISKINAN	MAR 2015	MAR 2016	MAR 2017	MAR 2018	MAR 2019	MAR 2020
KOTA	Rp299.011	Rp315.269	Rp334.522	Rp353.240	Rp372.882	Rp401.771
DESA	Rp296.864	Rp319.188	Rp331.673	Rp348.206	Rp365.607	Rp388.796
KOTA & DESA	Rp297.851	Rp317.348	Rp333.224	Rp350.875	Rp369.385	Rp395.407

Sumber : BPS, diolah

dari sebelumnya sebesar Rp372.882 per kapita/bulan pada Maret 2019. Sementara itu garis kemiskinan di pedesaan juga mengalami kenaikan sebesar 6,34% (yoy), dari sebesar Rp365.607 per kapita/bulan pada Maret 2019 menjadi Rp388.796 per kapita/bulan pada Maret 2020.

Laju peningkatan nilai garis kemiskinan Jawa Tengah baik untuk daerah perkotaan dan pedesaan, terhitung lebih tinggi dibandingkan laju inflasi umum di Jawa Tengah. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan laju inflasi komoditas-komoditas utama pembentuk nilai garis kemiskinan, khususnya komoditas bahan makanan. Peningkatan laju garis kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan laju inflasi umum menunjukkan bahwa nilai barang-barang konsumsi masyarakat pra sejahtera meningkat lebih tinggi dibandingkan laju peningkatan nilai barang-barang konsumsi masyarakat menengah sejahtera. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, mengingat kenaikan garis kemiskinan berpotensi dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin.

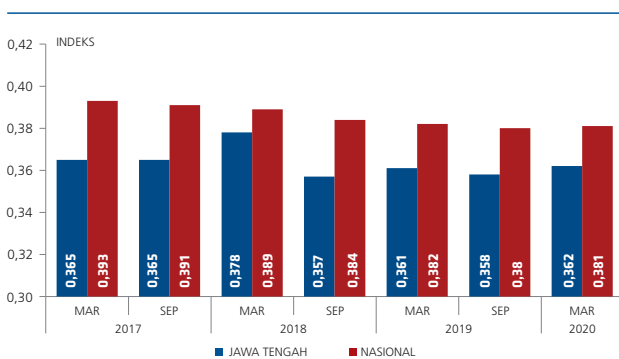
6.5. PEMERATAAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK

Secara tahunan, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Jawa Tengah pada Maret 2020 relatif stabil. Hal ini tercermin dari koefisien Gini yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan melalui pengukuran yang berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti

terjadi pemerataan sempurna di dalam suatu daerah, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Pada Maret 2020, koefisien Gini Jawa Tengah tercatat sebesar 0,362; relatif sama dibandingkan Maret 2019 yang sebesar 0,361. Apabila dibandingkan dengan nasional, koefisien Gini Jawa Tengah tersebut masih lebih rendah dibandingkan koefisien Gini Nasional yang sebesar 0,381. Dengan demikian, tingkat pemerataan pendapatan di Jawa Tengah relatif lebih baik dibandingkan dengan nasional.

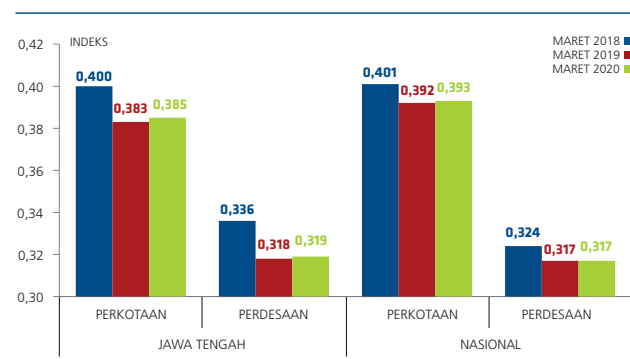
Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di kawasan Jawa, koefisien Gini Jawa Tengah masih mencatatkan yang terendah, diikuti oleh Banten dan Jawa Timur. Sementara itu, tingkat ketimpangan tertinggi terjadi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat. Perbaikan tingkat ketimpangan tercepat yang berlangsung dalam rentang Maret 2019 – Maret 2020 dicatatkan oleh Provinsi Jawa Timur.

Ditinjau berdasar wilayah, tingkat ketimpangan yang lebih tinggi berada di kawasan perkotaan. Pada Maret 2020, koefisien Gini perkotaan Jawa Tengah tercatat sebesar 0,385; lebih tinggi dibandingkan pedesaan yang sebesar 0,319. Tingkat ketimpangan yang lebih tinggi di daerah perkotaan juga terjadi di tingkat nasional. Koefisien Gini perkotaan tingkat nasional sebesar 0,393; lebih tinggi dibandingkan pedesaan yang sebesar 0,317.



Sumber : BPS, diolah

Grafik 6.4. Perkembangan Koefisien Gini Jawa Tengah dan Nasional



Sumber : BPS, diolah

Grafik 6.5. Perbandingan Ketimpangan Jawa Tengah dan Nasional berdasarkan daerah

Tabel 6.11 Perbandingan Koefisien Gini Provinsi Peers

PROVINSI	KOEFSIEN GINI								
	MAR-16	SEP-16	MAR-17	SEP-17	MAR-18	SEP-18	MAR-19	SEP-19	MAR-20
JAWA TENGAH	0.366	0.357	0.365	0.365	0.378	0.357	0.361	0.358	0.362
BANTEN	0.394	0.392	0.382	0.379	0.385	0.367	0.365	0.361	0.363
JAWA TIMUR	0.402	0.402	0.396	0.415	0.379	0.371	0.370	0.364	0.366
JAWA BARAT	0.413	0.402	0.403	0.393	0.407	0.405	0.402	0.398	0.403
DKI JAKARTA	0.411	0.397	0.413	0.409	0.394	0.390	0.394	0.391	0.399
DI YOGYAKARTA	0.420	0.425	0.432	0.440	0.441	0.422	0.423	0.428	0.434
INDONESIA	0.397	0.394	0.393	0.391	0.389	0.384	0.382	0.380	0.381

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah



PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Kondisi penyebaran COVID-19 masih faktor risiko utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ke depan baik di triwulan IV 2020 maupun keseluruhan tahun 2020.

- Ditinjau dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2020 akan membaik karena aktivitas masyarakat yang diperkirakan telah normal. Selain itu, kinerja investasi diperkirakan mulai meningkat untuk mengakomodir berbagai kegiatan yang tertunda pada periode sebelumnya.
- Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan mengalami perlambatan akibat pandemi COVID-19 yang menekan kinerja konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri.



7.1. KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL

Penyebaran pandemi COVID-19 yang meluas ke berbagai negara telah mempengaruhi perekonomian global di triwulan II 2020. Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2020 di sejumlah negara maju dan berkembang mengalami kontraksi tajam akibat pembatasan mobilitas masyarakat dalam rangka mitigasi penyebaran pandemi COVID-19. Namun demikian, realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan II 2020 lebih baik dari prakiraan sebelumnya, ditopang oleh stimulus kebijakan fiskal yang dilakukan untuk mendorong konsumsi dan investasi di berbagai negara. Sebagai gambaran, perekonomian AS terkontraksi 9,5% (yoy) pada triwulan II 2020.

Perekonomian global diperkirakan membaik pada paruh kedua 2020. Indikasi perbaikan ekonomi mulai terlihat di beberapa negara, khususnya di Tiongkok, didorong dampak penyebaran pandemi COVID-19 yang telah berkurang dan stimulus kebijakan fiskal yang besar. Sejumlah indikator dini mengindikasikan arah pemulihan global, seperti peningkatan mobilitas masyarakat global, termasuk mobilitas untuk aktivitas berpergian dan untuk belanja retail serta rekreasi. Keyakinan konsumen dan bisnis di banyak negara juga menunjukkan peningkatan, disertai peningkatan aktivitas produksi tercermin dari peningkatan Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur di AS, Eropa, dan Tiongkok. Kecepatan pemulihan ekonomi global ke depan dipengaruhi perkembangan pandemi COVID-19, mobilitas ekonomi merespons pandemi, besaran dan kecepatan stimulus kebijakan, terutama stimulus fiskal, kondisi sektor keuangan dan korporasi, serta struktur perekonomian suatu negara.

Prospek perbaikan pertumbuhan ekonomi global pada semester II 2020 berpotensi meningkatkan volume perdagangan dunia. Aktivitas ekonomi di negara utama yang membaik, seperti AS dan Tiongkok telah meningkatkan

permintaan barang ekspor dan impor dunia sehingga membuat kontraksi volume perdagangan dunia menurun. Pemulihan aktivitas sektoral terutama di Tiongkok mendorong permintaan barang manufaktur, seperti logam, kimia, dan peralatan transportasi. Dengan perkembangan tersebut, kontraksi volume perdagangan dunia pada 2020 diperkirakan lebih rendah dari prakiraan sebelumnya, dan diperkirakan kembali positif pada 2021 sejalan dengan pemulihan ekonomi global.

7.2. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV 2020 DAN TAHUN 2020

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan IV 2020 diperkirakan semakin membaik dibanding triwulan III 2020. Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan pada triwulan IV 2020 terutama didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor luar negeri. Penyebaran COVID-19 diperkirakan mereda sehingga aktivitas perekonomian dapat lebih baik pada periode akhir 2020. Pergeseran cuti bersama ke akhir tahun 2020 juga dapat memicu peningkatan konsumsi rumah tangga. Sementara pada sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada 2020 diperkirakan akan bergerak di bawah kapasitasnya. Penyebaran COVID-19 yang meluas di domestik maupun global berdampak besar terhadap ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2020. Pelemahan pertumbuhan ekonomi terutama didorong penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor luar negeri. Dari sisi lapangan usaha, perlambatan ekonomi diperkirakan terjadi pada lapangan usaha utama yaitu industri

Tabel 7.1 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan

PENGELUARAN	2018**	2019**					2020p				
	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	IIIp	IVp	TOTALp
KONSUMSI RUMAH TANGGA	4.69	4.79	5.16	4.18	4.36	4.62	3,46	-4,16	↑	↑	↓
KONSUMSI LNPR	7.62	13.85	13.64	8.23	8.15	10.90	-1,88	-5,41	↑	↑	↓
KONSUMSI PEMERINTAH	2.98	4.57	6.28	7.75	0.10	3.98	1,92	-9,42	↑	↓	↓
PMTB	7.68	6.92	4.17	5.54	2.98	4.85	0,16	-12,69	↑	↑	↓
EKSPOR LUAR NEGERI	11.77	3.75	-2.23	17.87	-0.62	4.92	4,58	-7,81	↓	↑	↓
IMPOR LUAR NEGERI	32.61	6.13	-11.24	-19.14	-10.10	-9.33	-5,99	-37,93	↑	↑	↓
NET EKSPOR ANTARDAERAH	49.00	3.89	-5.12	-39.41	-0.14	-11.75	-9,29	-50,96	↑	↑	↓
PDRB	5.31	5.13	5.52	5.64	5.34	5.41	2,61	-5,94	↑	↑	↓

Ket : *) angka sementara, **) angka sangat sementara, p) proyeksi Bank Indonesia
 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah, proyeksi oleh Bank Indonesia

pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Potensi ekonomi yang tidak optimal di 2020 akibat pengaruh terbatasnya produksi global akibat virus COVID-19, diperkirakan menyebabkan perekonomian Jawa Tengah terakselerasi di 2021.

7.2.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Permintaan domestik diperkirakan masih menjadi mesin utama penggerak ekonomi Jawa Tengah, dengan pangsa di atas 60%. Permintaan domestik pada triwulan IV 2020 diperkirakan terutama pada konsumsi RT, diperkirakan akan semakin meningkat dibanding triwulan III 2020. Dampak penyebaran COVID-19 yang mereda disertai kondisi penghasilan yang lebih baik, akan meningkatkan tendensi konsumsi masyarakat. Ketersediaan lapangan pekerjaan akan membaik pada periode ini sehingga pemulihan perekonomian dapat berlangsung.

Secara keseluruhan tahun 2020, konsumsi rumah tangga diperkirakan menurun didorong semakin terbatasnya pendapatan. Aktivitas dunia usaha terutama sektor industri dan perdagangan tertahan karena kondisi global dan domestik yang tidak kondusif. Keyakinan konsumen menurun drastis hingga ke level pesimis menjadi indikasi kondisi stabilitas keuangan rumah tangga akan terganggu selama 2020.

Dampak stimulus fiskal dari pemerintah diperkirakan mampu mengurangi pelemahan daya beli rumah tangga terutama pada kebutuhan pangan. Beberapa stimulus yang diberikan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah Pandemi COVID-19 antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) yang mulai bulan April 2020 disalurkan setiap bulan, penyaluran kartu sembako, subsidi gaji bagi karyawan swasta, Program Kartu Prakerja, dan pembebasan tarif listrik bagi pelanggan golongan 450 VA dan diskon 50% bagi pelanggan golongan 900 VA.

Capaian inflasi yang rendah dan terkendali diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2020, yang selanjutnya dapat menjaga daya beli masyarakat. Indeks Ekspektasi Konsumen dari hasil Survei Konsumen menunjukkan peningkatan dimana konsumen meyakini wabah COVID-19 akan mereda sehingga penghasilan dan lapangan kerja akan membaik. Inflasi kelompok bahan makanan diperkirakan lebih rendah seiring tingkat permintaan yang tidak setinggi tahun sebelumnya didukung komitmen pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.

Selanjutnya, kinerja investasi diperkirakan mengalami perbaikan di triwulan IV 2020 namun melambat secara keseluruhan tahun 2020. Hal ini sejalan dengan melemahnya prospek ekspor dan permintaan domestik, serta menurunnya keyakinan pelaku usaha. Penurunan investasi diperkirakan terjadi pada investasi bangunan dan nonbangunan. Pertumbuhan investasi bangunan diperkirakan berkontraksi akibat penundaan proyek investasi, baik Proyek Strategis Nasional, pembatalan pembangunan nonstrategis maupun konstruksi swasta. Investasi nonbangunan juga diperkirakan berkontraksi lebih dalam sejalan lemahnya kinerja eksternal dan turunnya permintaan domestik di tengah melemahnya kinerja industri. Prakiraan penurunan investasi juga disebabkan menurunnya keyakinan pelaku usaha terhadap pandemi COVID-19 tercermin pada hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan penurunan *Purchasing Manager Index* (PMI).

7.2.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

Pada sisi lapangan usaha, ekonomi Jawa Tengah masih ditopang oleh lapangan usaha industri pengolahan; pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sejalan dengan pelemahan permintaan domestik dan global, permintaan terhadap produk industri Jawa Tengah

Tabel 7.2 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

LAPANGAN USAHA	2018**	2019**					2020p				
	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	IIIp	IVp	TOTALp
PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	2.62	1.13	4.65	-1.55	1.56	1.36	-2.66	2.15	↑	↓	↑
INDUSTRI PENGOLAHAN	4.35	4.16	4.53	6.78	5.28	5.19	2.70	-4.40	↑	↑	↓
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	5.77	6.80	6.55	6.59	4.05	5.98	1.79	-11.59	↑	↑	↓
PDRB	5.31	5.13	5.52	5.64	5.34	5.41	2.61	-5.94	↑	↑	↓

Ket : *) angka sementara, **) angka sangat sementara, p) proyeksi Bank Indonesia
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah, proyeksi oleh Bank Indonesia

diperkirakan mengalami penurunan baik di dalam maupun luar negeri. Pembatasan sosial membuat pelaku industri membatasi jam operasional produksi. Selain itu, tingkat permintaan yang menurun mendorong sektor industri menurunkan penggunaan kapasitas utilitasnya (*capacity utilization*). Beberapa pelaku usaha berupaya mengatur stabilitas keuangan korporasi dengan merumahkan tenaga kerja untuk mengurangi biaya operasional. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terpaksa dilakukan karena proses produksi yang tidak dapat berjalan secara normal.

Dampak penurunan kinerja industri turut menyertai kinerja lapangan usaha perdagangan. Pembatasan sosial berakibat penjualan komoditas barang kebutuhan mengalami penurunan secara agregat. Meski terlihat adanya peningkatan aktivitas perbelanjaan ritel namun nilainya tidak mampu mengangkat kinerja perdagangan. Hal ini disebabkan perdagangan berskala besar termasuk kendaraan bermotor mengalami penurunan yang signifikan. Perdagangan barang modal pun tercatat menurun akibat lesunya iklim investasi ditengah pandemi COVID-19. Transaksi digital yang diharapkan mampu menjadi alternatif bagi perdagangan yang dilakukan dari rumah, belum mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat. Keterbatasan infrastruktur teknologi dan pengetahuan menjadi hambatan meratanya ekonomi digital di Jawa Tengah.

Selanjutnya, lapangan usaha konstruksi juga terkena dampak penyebaran COVID-19. Menurunnya kemajuan kegiatan konstruksi terjadi karena adanya pembatasan sosial berlaku sehingga mengakibatkan penundaan penyelesaian beberapa proyek pembangunan. Meski secara ketentuan pembangunan infrastruktur strategis nasional tetap berjalan, kondisi yang ada menyulitkan perkembangan yang progresif. Pihak swasta cenderung menunggu COVID-19 mereda agar proses pembangunan dapat berlangsung sesuai harapan.

Komitmen pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 dan meminimalkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, diharapkan menjadi faktor pendukung dan berpengaruh positif pada perekonomian ke depan. Namun demikian beberapa risiko yang perlu diwaspadai berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian antara lain: (i) berlanjutnya ketegangan hubungan dagang AS dan Tiongkok; (ii) *second wave* wabah COVID-19 sehingga penanganan membutuhkan waktu yang lebih lama;

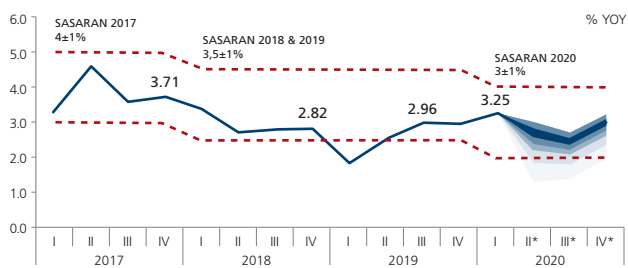
(iii) dampak sosial yang meluas akibat penurunan pendapatan sehingga meningkatkan angka kriminalitas; serta (iv) sulitnya proses *recovery* industri pasca meredanya COVID-19.

7.3. PROSPEK INFLASI TRIWULAN IV 2020 DAN KESELURUHAN TAHUN 2020

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan IV 2020 diperkirakan mengalami peningkatan. Faktor utama yang diperkirakan mendorong peningkatan laju inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok transportasi; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2020. Dari sisi permintaan faktor yang mendorong peningkatan inflasi adalah mulai pulihnya daya beli masyarakat pasca kebijakan adaptasi kebiasaan baru yang mulai diterapkan oleh pemerintah pada bulan Juni lalu yang diperkirakan akan mulai menghidupkan aktivitas perekonomian di masyarakat. Dari sisi penawaran diperkirakan pasokan bahan pangan utama akan menurun seiring dengan berakhirnya masa panen dan curah hujan yang menurun karena telah memasuki musim kemarau. Menurut perkiraan BMKG musim kemarau pada tahun ini tidak seburuk yang terjadi pada tahun lalu. Akan tetapi, perlu diwaspadai pada beberapa daerah sentra produksi pertanian diprediksi mengalami hari tanpa hujan yang termasuk kategori panjang dan sangat panjang, diantaranya adalah Brebes, Demak, dan Grobogan.

Inflasi kelompok transportasi dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya diperkirakan juga akan meningkat pada triwulan IV 2020. Faktor utama yang diperkirakan akan mendorong laju inflasi pada kelompok transportasi adalah peningkatan tarif angkutan penumpang seiring dengan mulai meningkatnya mobilitas masyarakat. Sementara itu, faktor utama yang diperkirakan akan mendorong laju inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya adalah potensi kenaikan harga emas perhiasan seiring dengan tren peningkatan harga emas dunia hingga saat ini. Tercatat kontrak emas berjangka hingga bulan Desember 2020 pada data Bloomberg per tanggal 27 Agustus 2020 adalah 1.945 USD per *troy ounce*. Angka tersebut jauh lebih tinggi daripada harga emas global pada awal tahun lalu yang berada hanya di kisaran 1.582 USD per *troy ounce*.



Sumber: BPS dan Proyeksi Bank Indonesia

Grafik 7.1 Proyeksi Inflasi Tahun 2020

Sesuai dengan mandatnya, Bank Indonesia akan berusaha menjaga capaian inflasi berada pada sasaran inflasi 2020, yaitu $3\pm 1\%$ (yoy). Koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi perlu terus diperkuat terutama dalam menghadapi sejumlah risiko terkait gangguan pasokan dan distribusi domestik. Selanjutnya, dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan komoditas pangan strategis, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah sudah mempersiapkan berbagai program pengendalian inflasi di tahun 2020. Diseminasi dan Sosialisasi penggunaan *Sislogda* untuk sinergi informasi pasokan pangan hulu-hilir, kebijakan pasar murah, operasi pasar, dan sidak lapangan di tingkat masyarakat ketika terjadi gejolak harga. TPID Jawa Tengah juga berupaya meningkatkan kelembagaan petani dengan penyusunan skema *Rice Market Center* serta untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi petani. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat tetap menjaga inflasi Jawa Tengah tahun 2020 pada level yang terkendali.



Tim Penyusun

PENGARAH

Soekowardojo

PENANGGUNG JAWAB

Iss Savitri Hafid

KOORDINATOR PENYUSUN

Berry A. Harahap

EDITOR

Myrnawati Savitri

TIM PENULIS

Anton Kisworo, Christian Octavian, Deded Tuwanda Prima,
Maya Lestarini Kusumaningrum

KONTRIBUTOR

Fungsi Data Statistik Ekonomi Dan Keuangan
Divisi Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah
Divisi Pengembangan Ekonomi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah

Divisi *Advisory* Ekonomi Dan Keuangan

Jl. Imam Bardjo Sh No. 4 Semarang 50241

Telp. +62 24 8310246

Fax. +62 24 8310339

e-mail : daek_jateng@bi.go.id